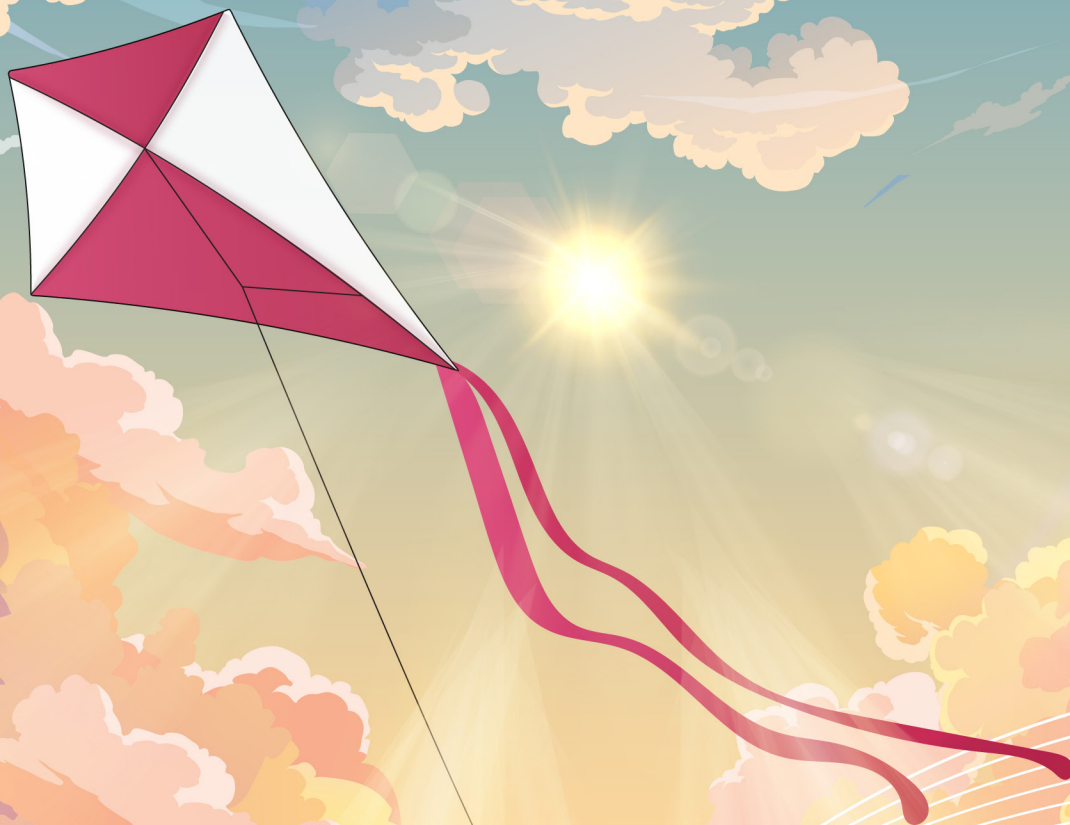




BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

MEMPERKUAT STABILITAS DAN MENJAGA PERTUMBUHAN DARI DAMPAK RAMBATAN GLOBAL



KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
NO. 44, FEBRUARI 2025



Angin kencang dan berputar menggambarkan tantangan, dan risiko yang muncul atas ketidakpastian global yang masih tinggi. Angin tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Layang-layang yang terbang dalam kondisi angin kencang merepresentasikan usaha dan strategi dalam menjaga resiliensi keuangan dan ekonomi. Agar layang-layang tetap dapat terbang tinggi, diperlukan optimisme dan kekuatan serta keteguhan dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang dipresentasikan dengan posisi orang yang berdiri kokoh di atas batuan yang tinggi.

Sinar matahari yang menerobos dengan kuat di tengah awan menggambarkan keyakinan bahwa dengan usaha, strategi, dan langkah yang tepat, stabilitas sistem keuangan dapat terus dijaga dan mampu mendorong perekonomian.







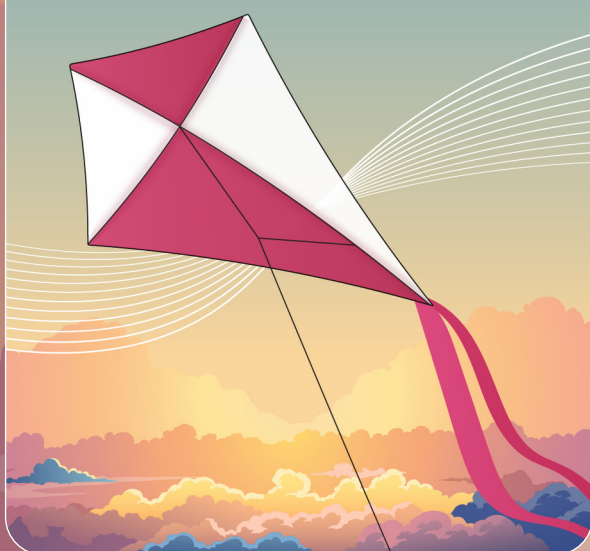
BANK INDONESIA



ISSN 2620-9241
DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Daftar Isi

Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
Prakata	x
Ringkasan Eksekutif	3



Bab 2 Sustainabilitas Intermediasi Keuangan Terjaga

13

2.1	Kapasitas Pembiayaan dan Minat Penyaluran Kredit Mendukung Keberlanjutan Intermediasi	14
2.2	Perilaku Kompetisi dan Strategi Pricing Perbankan	16
2.3	Permintaan Pembiayaan Didukung Kinerja Korporasi, Konsumsi Rumah Tangga, Insentif Sektor Properti, serta Kemudahan Akses Pembiayaan IKNB	18
Boks 2.1	Demand Constraint Beberapa Sektor Kredit Berdasarkan Disequilibrium Model	22

Bab 1 Ketahanan Ekonomi Indonesia Memitigasi Dampak Gejolak Global

7

1.1	Dinamika Geopolitik Berdampak Pada Perkembangan Ekonomi dan Sistem Keuangan Global	8
1.2	Ketahanan Ekonomi Domestik Kuat dan Sistem Keuangan Berdaya Tahan Dalam Memitigasi Dampak Rambatan Global	8
1.3	Persepsi Sumber Kerentanan dan Guncangan Sistem Keuangan Indonesia pada Semester II 2024	10
Boks 1.1	Tantangan Kebijakan “America First” Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan	11

Bab 3 Ketahanan Sistem Keuangan Mendukung Kinerja Intermediasi

25

3.1	Risiko dan Kemampuan Bayar Korporasi Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global	26
3.2	Risiko dan Kemampuan Bayar Rumah Tangga Terjaga	29
3.3	Ketahanan Industri Perbankan dan IKNB Mendukung Intermediasi	32
3.4	Perkembangan Risiko ULN Korporasi dan Perbankan di Tengah Dinamika Suku Bunga dan Nilai Tukar	37
Boks 3.1	Potensi Peningkatan Ketahanan Rumah Tangga melalui Dorongan Sektor Labor Intensive	40
Boks 3.2	Ketahanan Sistem Keuangan Indonesia dari Risiko Siber dan Fraud	42

Bab 4 Keuangan Inklusif dan Hijau

46

4.1	Kinerja UMKM dan Perbaikan Kualitas Aset Kredit Masih Membayangi Pertumbuhan Pembiayaan Inklusif	46
4.2	Optimalisasi Pembiayaan Hijau Untuk Mendukung Pencapaian Target Transisi Hijau Nasional	51
Boks 4.1	Dukungan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah	53
Boks 4.2	Inisiatif UMKM Hijau Bank Indonesia	55

Bab 5 Kebijakan Makroprudensial Menjaga Ketahanan dan Mendorong Intermediasi

57

5.1	Kebijakan Makroprudensial Tetap Longgar	58
5.2	Sinergi Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	62
Boks 5.1	Penguatan KLM Juni 2024 Berdampak pada Peningkatan Likuiditas	64
Boks 5.2	Penguatan Kerangka Kebijakan Makroprudensial sebagai Dukungan terhadap Implementasi UU P2SK	65

Bab 6 Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

67

6.1	Ekonomi Domestik Diprakirakan Tetap Baik di Tengah Tantangan Ekonomi Global	68
6.2	Potensi Pertumbuhan Kredit Perbankan Seiring Terjaganya Makroekonomi Domestik	69
6.3	Arah Kebijakan: Penguatan Kebijakan Makroprudensial <i>Pro-growth</i>	70
Boks 6.1	Penguatan KLM Mendorong Sektor Penciptaan Lapangan Kerja	71
Boks 6.2	Prospek Kredit 2025: Potensi Pembiayaan Baru dalam Mendukung Program Pemerintah "Asta Cita"	73

Daftar Tabel

Bab 2

Sustainabilitas Intermediasi Keuangan Terjaga

Tabel 2.1.1	Kredit Total, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi per Sektor Ekonomi	14
Tabel 2.1.2	Pembiayaan oleh IKNB	16
Tabel 2.3.1	Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan <i>Capex</i> Korporasi Tbk. menurut Sektor	19

Bab 3

Ketahanan Sistem Keuangan Mendukung Kinerja Intermediasi

Tabel 3.3.1	Perkembangan NPL per Sektor Ekonomi	32
Tabel 3.4.1	Perkembangan ULN Korporasi Sektoral	37
Tabel B3.1.1	Perkembangan Jumlah TK, PHK dan Upah Sektor <i>Labor Intensive</i>	41

Bab 4

Keuangan Inklusif dan Hijau

Tabel 4.1.1	Tabel Kredit UMKM per Sektor Ekonomi	46
Tabel B4.1.1	Perkembangan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Unggulan Ekonomi Syariah	54

Bab 5

Kebijakan Makroprudensial Menjaga Ketahanan dan Mendorong Intermediasi

Tabel 5.1.1	Rasio LTV/FTV untuk Kredit/ Pembiayaan Properti dan Kredit/ Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan	60
--------------------	---	-----------

Bab 6

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Tabel B6.1.1	Rincian Penguatan KLM Januari 2025 Dibandingkan dengan Juni 2024	71
Tabel B6.1.2	Besaran Insentif Sektoral KLM	72
Tabel B6.2.1	Realisasi Perlinsos 2024	74
Tabel B6.2.2	Distribusi Lapangan Kerja Berdasarkan Tipe Kontrak per Sektor Industri (2024)	75
Tabel B6.2.3	Pertumbuhan Kredit Subsektor Terkait Asta Cita	76

Daftar Grafik

Bab 1 Ketahanan Ekonomi Indonesia Memitigasi Dampak Gejolak Global

Grafik 1.2.1	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	9
---------------------	-----------------------------------	---

Bab 2 Sustainabilitas Intermediasi Keuangan Terjaga

Grafik 2.1.1	Indeks <i>Lending Standard</i>	14
Grafik 2.1.2	Indeks <i>Lending Requirement</i> (ILR) per Sektor Ekonomi	15
Grafik 2.1.3	Perkembangan Rasio Alat Likuid dan <i>Lending Capacity</i> Perbankan	15
Grafik 2.1.4	Kuadran Kredit dan NIM bank per KBMI	15
Grafik 2.2.1	Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK	16
Grafik 2.2.2	Perkembangan Biaya Dana dan Pangsa Pendanaan Bank	17
Grafik 2.2.3	Perkembangan <i>Funding Gap</i> Perbankan	17
Grafik 2.2.4	Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan <i>Yield</i> Surat Berharga	18
Grafik 2.2.5	Perkembangan Pangsa Kredit Kelompok Bank terhadap Suku Bunga Kredit	18
Grafik 2.3.1	Perkembangan Pertumbuhan Penjualan dan KMK Korporasi	19
Grafik 2.3.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Capex</i> dan KI Korporasi	19
Grafik 2.3.3	Pertumbuhan <i>Retained Earnings</i> Korporasi	19
Grafik 2.3.4	Pertumbuhan Pembiayaan UDN & ULN Korporasi	20
Grafik 2.3.5	Pertumbuhan Pembiayaan Saham Korporasi	20
Grafik 2.3.6	Perkembangan Konsumsi RT Berdasarkan Sektor	20

Grafik 2.3.7	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	20
Grafik 2.3.8	Andil Pertumbuhan KK RT menurut Kelas Pendapatan	21
Grafik 2.3.9	Andil Pertumbuhan KK RT menurut Jenis Kredit	21
Grafik 2.3.10	Andil Pertumbuhan KPR Berdasarkan Jenis KPR	21
Grafik B2.1.1	Perkembangan Pertumbuhan M2, PDB, dan Pertumbuhan Kredit (a) serta Kontribusi Faktor Pertumbuhan M2 di Indonesia (b)	22
Grafik B2.1.2	Hasil Simulasi Model <i>Equilibrium Directional</i> (a) dan <i>Deterministic</i> (b)	23
Grafik B2.1.3	Hasil Estimasi Disekuilibrium Kredit untuk Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri	23

Bab 3 Ketahanan Sistem Keuangan Mendukung Kinerja Intermediasi

Grafik 3.1.1	Perkembangan <i>Net Profit Margin</i>	26
Grafik 3.1.2	Perkembangan <i>Interest Coverage Ratio</i>	26
Grafik 3.1.3	Perkembangan <i>Debt at Risk</i>	26
Grafik 3.1.4	Perkembangan <i>Current Ratio</i>	27
Grafik 3.1.5	Perkembangan <i>Cash Ratio</i>	27
Grafik 3.1.6	ICR, PD <i>Market Signal</i> dan PD Fundamental Korporasi	27
Grafik 3.1.7	Persebaran Produk berdasarkan Kesamaan dan Keunggulan terhadap Produk Tiongkok	28
Grafik 3.1.8	Dampak Terbatas <i>Oversupply</i> Produk Tiongkok terhadap Ketahanan Korporasi	28
Grafik 3.1.9	Kinerja Korporasi Agregat	29

Grafik 3.1.10	Perkembangan DER Korporasi Berbasis Komoditas	29
Grafik 3.1.11	Perkembangan NPL Korporasi Berbasis Komoditas	29
Grafik 3.2.1	Perkembangan TK Formal dan Informal	30
Grafik 3.2.2	Perkembangan Upah TK Formal dan Informal	30
Grafik 3.2.3	Perkembangan Indeks Penghasilan RT	30
Grafik 3.2.4	Perkembangan Realisasi Bantuan Sosial	30
Grafik 3.2.5	Perkembangan NPL RT	31
Grafik 3.2.6	Perkembangan NPL RT per Kelas Pendapatan	31
Grafik 3.2.7	Perkembangan DSR RT	31
Grafik 3.3.1	Perkembangan NPL (bruto) Berdasarkan Segmen	32
Grafik 3.3.2	Perkembangan Komposisi <i>Loan at Risk</i> (LaR) Perbankan	33
Grafik 3.3.3	Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen	33
Grafik 3.3.4	Kepemilikan SBN Pada Perbankan	33
Grafik 3.3.5	AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank	34
Grafik 3.3.6	Perkembangan LCR dan NSFR	34
Grafik 3.3.7	ROA, NIM, dan BOPO Perbankan	34
Grafik 3.3.8	Perkembangan Pendapatan Bersih Nonbunga Bank (Disetahunkan)	34
Grafik 3.3.9	Perkembangan <i>Coverage</i> CKPN terhadap Risiko Kredit	35
Grafik 3.3.10	Perkembangan Permodalan	35
Grafik 3.3.11	Perkembangan Komposisi Modal	35
Grafik 3.3.12	NPF dan GR Perusahaan Pembiayaan	36
Grafik 3.3.13	Risiko Pembiayaan <i>Fintech Lending</i>	36
Grafik 3.3.14	Eksposur PP pada Total DPK Perbankan	36

Grafik 3.3.15	Eksposur PP dan <i>Fintech Lending</i> pada Total Kredit Perbankan	36
Grafik 3.4.1	Pertumbuhan Pembiayaan UDN dan ULN serta Pangsa	37
Grafik 3.4.2	Perkembangan ULN pada Periode Depresiasi & Suku Bunga Tinggi	38
Grafik 3.4.3	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Berdasarkan Jenis ULN	38
Grafik 3.4.4	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Korporasi Berdasarkan Jatuh Tempo	38
Grafik 3.4.5	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Berdasarkan Suku Bunga	38
Grafik 3.4.6	Perkembangan <i>Outstanding</i> ULN Bank	39
Grafik 3.4.7	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Jangka Panjang Bank Berdasarkan Jenis ULN	39
Grafik 3.4.8	Posisi <i>Outstanding</i> ULN Perbankan Berdasarkan Jatuh Tempo	39
Grafik B3.1.1	Penjualan Sektor <i>Labor Intensive</i> dan <i>Capital Intensive</i>	40
Grafik B3.1.2	Perkembangan TK Informal berdasarkan Kelas Pendapatan	40
Grafik B3.2.1	Pemetaan Tingkat Maturitas Siber PUSK	42
Grafik B3.2.2	Tren Pengaduan Konsumen ke Bank Indonesia perihal <i>Fraud</i>	43
Grafik B3.2.3	Tren Rasio Frekuensi <i>Fraud</i> terhadap Volume Transaksi SP Ritel	43

Bab 4 Keuangan Inklusif dan Hijau

Grafik 4.1.1	Pertumbuhan Kredit UMKM per Segmen	46
Grafik 4.1.2	Indeks Kinerja UMKM	46
Grafik 4.1.3	Indeks Permintaan Kredit UMKM	47
Grafik 4.1.4	Indeks Ketahanan Keuangan UMKM	47
Grafik 4.1.5	ILR UMKM	47
Grafik 4.1.6	NPL Kredit UMKM per Segmen	47

Grafik 4.1.7	LAR Kredit UMKM per Segmen	48
Grafik 4.1.8.	Pertumbuhan dan NPF Pembiayaan Syariah ke UMKM	48
Grafik 4.1.9	Perkembangan Pembiayaan PP Kepada UMKM	48
Grafik 4.1.10	Kontribusi Pertumbuhan Pembiayaan PP Kepada UMKM	48
Grafik 4.1.11	NPF UMKM PP	49
Grafik 4.1.12	Perkembangan Pinjaman <i>Fintech Lending</i> Kepada UMKM	49
Grafik 4.1.13	Perkembangan <i>Fund Raise SCF</i> Berdasarkan Nominal	49
Grafik 4.2.1	Pertumbuhan KPR dan KKB Hijau	51
Grafik 4.2.2	Rasio NPL KPR dan KKB Hijau	52
Grafik B4.1.1	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	53
Grafik B4.1.2	Perkembangan Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah	53
Grafik B4.1.3	Perkembangan Pembiayaan pada Sektor Unggulan Ekonomi Syariah	53
Grafik B4.1.4	Kuadran Sisi <i>Supply</i> Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah per TW IV 2024	54
Grafik B4.1.5	Kuadran Sisi <i>Demand</i> Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah per TW III 2024	54
Grafik B4.2.1	Indeks Kinerja UMKM Hijau dan Nonhijau	55
Grafik B4.2.2	Permintaan Kredit UMKM Hijau dan Nonhijau	55

Daftar Gambar

Bab 1 Ketahanan Ekonomi Indonesia Memitigasi Dampak Gejolak Global

Gambar B1.1.1	Transmisi Kebijakan <i>America First</i> Terhadap SSK	11
----------------------	---	----

Bab 5 Kebijakan Makroprudensial Menjaga Ketahanan dan Mendorong Intermediasi

Grafik 5.1.1	Rasio Intermediasi Makroprudensial Perbankan	61
Grafik 5.1.2	Grafik SSB/DPK dan PLM	61
Grafik B5.1.1	Insentif Berdasarkan Kelompok Bank	64
Grafik B5.1.2	Simulasi Kredit Perbankan Tanpa KLM	64

Bab 6 *Outlook* Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Grafik 6.3.1	Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia	70
Grafik B6.2.1	Pertumbuhan Penjualan Tahunan Top 4 Sektor Terdampak <i>First Round Effect</i> Asta Cita	73
Grafik B6.2.2	Pertumbuhan KMK Top 4 Sektor Terdampak <i>First Round Effect</i> Asta Cita	73
Grafik B6.2.3	Distribusi Pekerja Berdasarkan Status Gaji di Bawah dan di Atas UMP	75
Grafik B6.2.4	<i>Outlook</i> Kredit Konsumsi Rumah Tangga 2025	76

Bab 6 *Outlook* Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Gambar B6.2.1	Perlinsos 2025 dan Alokasinya	74
----------------------	-------------------------------	----

Daftar Singkatan

AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
AS	Amerika Serikat
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Bansos	Bantuan Sosial
BBM	Bahan Bakar Minyak
BEI	Bursa Efek Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	<i>basis points</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
Capex	<i>capital expenditure</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CI	<i>capital intensive</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DaR	<i>Debt at Risk</i>
DAR	<i>Debt to Asset Ratio</i>
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSK	Dewan Standar Keberlanjutan
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>
FaR	<i>Financing at Risk</i>
FFR	<i>Federal Funds Rate</i>
fintech	<i>financial technology</i>
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GR	<i>Gearing Ratio</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>

IHK	Indeks Harga Konsumen
IHKEI	Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
ILR	Indeks <i>Lending Requirement</i>
ILS	Indeks <i>Lending Standard</i>
ISSK	Indeks <i>Stabilitas Sistem Keuangan</i>
KBMI	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKS	Ketahanan dan Keamanan Siber
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KMG	Kredit Multiguna
KMK	Kredit Modal Kerja
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LaR	<i>Loan at Risk</i>
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LGA	Listrik, Gas, dan Air
LI	<i>labor intensive</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
M2	Pertumbuhan uang dalam arti luas dan menggambarkan likuiditas perekonomian
mtm	<i>month to month</i>
NIM	<i>Net Interest Margin</i>

NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PD	<i>Probability of Default</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDN	Posisi Devisa Neto
Perlinsos	Perlindungan Sosial
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PP	Perusahaan Pembiayaan
PPN DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PSI	<i>Product Similarity Index</i>
PSP	Penyedia Sistem Pembayaran
RCA	<i>Revealed Comparative Advantage</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
ROA	<i>Return on Asset</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RT	Rumah Tangga
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBI	Sertifikat Bank Indonesia

SBN	Surat Berharga Negara
SCF	<i>Securities Crowdfunding</i>
SKI	Siklus Keuangan Indonesia
SP	Sistem Pembayaran
SPK	Standar Pengungkapan Keberlanjutan
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSB	Surat-Surat Berharga
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SVBI	Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
TK	Tenaga Kerja
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendali Inflasi Pusat
TWP 90	Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
UDN	Utang Dalam Negeri
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU P2SK	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UMP	Upah Minimum Provinsi
UMR	Upah Minimum Regional
UUS	Unit Usaha Syariah
Valas	valuta asing
yoy	<i>year on year</i>
ytd	<i>year to date</i>

Prakata



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44, Edisi Februari 2025 dengan tema “**Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak Rambatan Global**” dapat tersusun untuk disampaikan sebagai bagian dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Kajian ini memberikan gambaran terkini dan prospek sistem keuangan Indonesia berdasarkan evaluasi dan asesmen terhadap tiga pilar kebijakan makroprudensial, yaitu intermediasi, ketahanan, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Kinerja ekonomi Indonesia selama tahun 2024 terjaga baik dan kuat dalam memitigasi dampak ketidakpastian global yang tetap tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang disertai dengan perbedaan laju pertumbuhan antarnegara menjadi tantangan utama. Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru Amerika Serikat yang memberikan tekanan pada pasar keuangan, memperkuat dolar AS, serta mendorong kenaikan *yield* US Treasury dan premi risiko obligasi negara berkembang, berdampak pada arus modal global dan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Namun demikian, ekonomi domestik tetap tumbuh didukung dengan stabilitas nilai tukar dan inflasi terkendali dalam kisaran target.

Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia tetap terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Intermediasi terus tumbuh dengan risiko kredit yang terkelola dengan baik, ketahanan permodalan yang kuat, dan likuiditas yang memadai di tengah perlambatan pertumbuhan DPK. Pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, didukung oleh permintaan pembiayaan dari Industri Keuangan Non-Bank melalui Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, *Fintech Lending*, dan Lembaga Keuangan Mikro.

Sepanjang tahun 2024, Bank Indonesia terus menjalankan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter *pro-market* dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar tetap diterapkan untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta optimalisasi

pinjaman luar negeri bank berbasis risiko melalui kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). Bank Indonesia juga mempertahankan kebijakan *Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV)*, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), rasio *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)*, serta Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, kebijakan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) tetap dipertahankan, termasuk fleksibilitas *repurchase agreement (repo)* dalam PLM. Kebijakan Makroprudensial berupa KLM juga diarahkan untuk bersinergi dengan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait pada sektor-sektor prioritas, khususnya dalam mendukung program Asta Cita Pemerintah. Penguatan koordinasi kebijakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus

ditingkatkan guna memitigasi risiko dan memperkuat peran intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional.

Ke depan, prospek intermediasi perbankan diperkirakan tetap solid dan tumbuh, didukung ketahanan sistem keuangan. Dalam kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2025, kebijakan makroprudensial akan terus diarahkan longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.

Kami berharap Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 ini dapat memberikan wawasan mengenai perkembangan terkini dan prospek sistem keuangan serta menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional dan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.

Jakarta, Februari 2025



Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo



BANK INDONESIA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga pada 2024, di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Ekonomi global diperkirakan tumbuh melambat pada 2024, dengan divergensi pertumbuhan antarnegara yang meningkat. Ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh kuat, di tengah pemulihan Tiongkok dan kawasan Eropa yang tertahan, serta negara berkembang yang masih baik. Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat pada akhir 2024, didorong kekhawatiran atas dampak arah kebijakan AS terhadap prospek ekonomi dan keuangan global ke depan. Tertahannya penurunan inflasi (disinflasi) global memengaruhi arah kebijakan moneter negara maju, terutama AS. Ekspektasi penurunan *Federal Funds Rate* (FFR) menjadi lebih terbatas dan defisit fiskal AS berpotensi meningkat sehingga memicu kenaikan *yield US Treasury* dan aliran masuk investasi portofolio asing ke AS. Kondisi ini selanjutnya menaikkan premi risiko obligasi pemerintah dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang.

Di tengah tantangan ketidakpastian global, kinerja ekonomi Indonesia tetap baik didukung terjaganya ketahanan SSK. Pemulihan ekonomi nasional berlanjut, tumbuh sebesar 5,03% pada 2024, dengan inflasi yang terjaga rendah. Ketahanan eksternal mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Ketidakpastian global menyebabkan Rupiah terdepresiasi sebesar 4,34% (*point-to-point*) dibandingkan 2023, namun lebih baik dari mata uang negara berkembang lainnya. Kinerja ekonomi nasional yang tetap baik ini didukung SSK yang terjaga, dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada pada zona Normal. Ketahanan SSK dikontribusikan oleh terjaganya kemampuan bayar korporasi dan ketahanan perbankan. Kuatnya ketahanan perbankan tecermin pada intermediasi yang tumbuh tinggi, kualitas kredit yang membaik dan permodalan yang tinggi. Intermediasi yang tumbuh kuat mendukung kecukupan pembiayaan bagi perekonomian. Namun, intermediasi perbankan pada 2024 menghadapi tantangan berupa terbatasnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan belum pulihnya kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga menyebabkan divergensi kinerja antarbank. Di tengah potensi kerentanan dan guncangan yang dapat memengaruhi SSK Indonesia, masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ketahanan SSK Indonesia ke depan.

Intermediasi perbankan terjaga pada 2024, didukung faktor penawaran berupa baiknya minat penyaluran kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan. Kredit perbankan tumbuh tinggi sebesar 10,39%, ditopang

kredit korporasi pada jenis kredit investasi, dan kredit rumah tangga (RT) pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di tengah perlambatan kredit UMKM. Minat penyaluran kredit terjaga, dengan Indeks *Lending Requirement* (ILR) longgar pada mayoritas sektor ekonomi. Terbatasnya pertumbuhan DPK sebesar 4,48% pada 2024 tidak berdampak negatif pada kapasitas pembiayaan perbankan, didukung ketersediaan ruang realokasi aset dan tambahan likuiditas dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia. Dari sisi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), intermediasi perekonomian didukung pertumbuhan positif dari Perusahaan Pembiayaan (PP), Pegadaian, *Fintech Lending* dan Lembaga Keuangan Mikro.

Tingginya kinerja intermediasi turut didukung oleh dampak positif kompetisi pada keterjangkauan harga kredit bagi dunia usaha dan masyarakat. Kenaikan kompetisi di pasar dana menyebabkan kenaikan suku bunga DPK selama 2024. Sebaliknya, kompetisi di pasar kredit menyebabkan penurunan suku bunga kredit, didukung strategi bank untuk mempertahankan suku bunga kredit pada level yang kompetitif. Strategi ini bertujuan untuk menjaga daya saing dan penguasaan pangsa kredit, utamanya terlihat pada perilaku bank Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4. Kendati menghadapi tekanan margin suku bunga, minat penyaluran kredit tetap tinggi, didukung suku bunga kredit yang tetap menarik. Perbankan mampu menjaga dampak penurunan margin suku bunga pada profitabilitas, didukung optimalisasi imbal hasil dari aset likuid, diversifikasi pendapatan nonbunga, keuntungan derivatif, dan efisiensi operasional.

Dari sisi permintaan, sustainabilitas intermediasi didukung membaiknya kinerja korporasi, terjaganya konsumsi RT, serta kemudahan akses pembiayaan IKNB. Membaiknya penjualan dan pertumbuhan investasi korporasi mendukung terjaganya permintaan kredit. Korporasi juga memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap kredit perbankan sebagai sumber pendanaan eksternal, di tengah melambatnya pertumbuhan dana internal korporasi. Namun perlu diwaspadai dampak ketidakpastian global terhadap kinerja korporasi yang memengaruhi permintaan pembiayaan ke depan. Di sisi lain, terjaganya daya beli dan konsumsi RT pada 2024 mendukung meningkatnya pertumbuhan kredit RT, dengan KPR sebagai penopang utama. Di tengah suku bunga yang masih kompetitif, kredit KPR tercatat tumbuh melambat pada 2024. Namun, sinergi kebijakan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menahan pertumbuhan KPR agar tidak melambat lebih dalam.

Di tengah kecenderungan perilaku kehati-hatian dari perbankan, pembiayaan IKNB melalui *fintech lending* meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagi RT, termasuk kelas bawah, didukung adopsi digitalisasi yang meningkatkan kecepatan layanan.

Ketahanan korporasi terjaga didukung kemampuan bayar yang meningkat. Kemampuan bayar korporasi meningkat didukung profitabilitas yang tumbuh positif dan likuiditas yang memadai. Kenaikan margin laba (*profit margin*) berkontribusi pada peningkatan profitabilitas, utamanya pada korporasi eksportir akibat pemulihan harga komoditas. Likuiditas korporasi juga memadai, seiring dengan dampak positif dari kenaikan penjualan terhadap peningkatan rasio likuiditas korporasi. Selanjutnya, kondisi ini berkontribusi pada terkendalinya rasio utang berisiko (*debt-at-risk/DaR*), di tengah kecenderungan depresiasi nilai tukar pada 2024. Ketahanan korporasi tecermin pula pada rendahnya *probability of default* (PD). Korporasi diperkirakan tetap berdaya tahan dan mampu menyerap dampak kebijakan perdagangan AS, baik melalui jalur perdagangan dan harga komoditas. Ke depan, perlu diwaspadai berlanjutnya tren kenaikan rasio utang berisiko, serta dampak melambatnya produksi komoditas energi dan pangan terhadap ketahanan korporasi.

Ketahanan RT terjaga didukung peningkatan penghasilan, kendati dengan perbedaan laju pemulihan antar kelas penghasilan. Kemampuan bayar RT tetap terjaga didukung membaiknya penghasilan RT. Di tengah terjaganya kemampuan bayar, risiko kredit RT meningkat, utamanya pada kelas menengah dan bawah. Dinamika ini dipicu perbedaan laju pemulihan RT antar kelas pendapatan. Akibatnya, risiko kredit pada RT kelas atas menurun, sedangkan risiko kredit pada RT kelas menengah dan bawah meningkat. Dinamika ini turut dipengaruhi tingginya pangsa tenaga kerja informal dalam struktur tenaga kerja Indonesia, dengan tingkat upah yang lebih rendah dan potensi kenaikan penghasilan yang lebih terbatas. Ke depan, perlu diwaspadai potensi berlanjutnya pelemahan daya beli RT kelas bawah, serta dampak rambatannya pada kinerja dan ketahanan UMKM dan korporasi.

Ketahanan perbankan terjaga didukung rendahnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta kuatnya permodalan bank. Risiko kredit perbankan terjaga rendah, dengan *Non-Performing-Loan* (NPL) dan *Loan-at-Risk* (LaR) menurun selama 2024. Risiko pasar yang berasal dari suku bunga dan nilai tukar terjaga rendah didukung penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN), rendahnya pangsa surat

berharga dengan imbal hasil tetap, dan terbatasnya posisi devisa neto bank. Ketahanan likuiditas memadai, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan rasio alat likuid terhadap DPK tetap tinggi sebesar 25,59%. Profitabilitas bank terjaga didukung upaya diversifikasi pendapatan, perbaikan kualitas kredit yang memicu koreksi cadangan kerugian kredit dan efisiensi operasional. Tingginya permodalan bank juga turut mendukung ketahanan perbankan. Hasil *stress test* menunjukkan bahwa kondisi permodalan tergolong kuat dan likuiditas bank tergolong memadai untuk menyerap potensi kerugian dari skenario *shock* makroekonomi. Ketahanan IKNB juga terjaga didukung permodalan yang kuat, serta kualitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dan *fintech lending* yang terjaga kendati sedikit meningkat. Potensi dampak rambatan dari kegagalan IKNB juga terbatas, sebagaimana tecermin pada terbatasnya eksposur *interconnectedness* antara IKNB dan perbankan, baik di sisi aset maupun kewajiban.

Ketahanan korporasi dan perbankan terjaga dari risiko gagal bayar Utang Luar Negeri (ULN). ULN korporasi hingga November 2024 tercatat berkontraksi, di tengah rendahnya pertumbuhan ULN perbankan. Perkembangan suku bunga dan nilai tukar selama 2024 turut memengaruhi dinamika ULN ini. Korporasi cenderung mengurangi pemanfaatan ULN sebagai sumber pembiayaan pada periode suku bunga tinggi dan pelemahan nilai tukar. Risiko ULN korporasi relatif terjaga didukung karakteristik instrumen, jangka waktu, dan jenis suku bunga. Di sisi lain, masih positifnya pertumbuhan ULN perbankan dipengaruhi pemanfaatan ULN untuk kepentingan pengelolaan likuiditas dan pembiayaan kredit dalam valuta asing (*valas*). Ketahanan ULN perbankan tetap terjaga didukung oleh relatif rendahnya pangsa ULN terhadap aset bank, dominasi tenor jangka panjang, suku bunga yang tetap, dan kecukupan likuiditas.

Pembiayaan inklusif selama 2024 tumbuh melambat dipengaruhi belum pulihnya kinerja keuangan UMKM dan strategi perbaikan kualitas kredit oleh perbankan. Kredit kepada UMKM tumbuh terbatas pada seluruh segmen debitur, utamanya pada segmen mikro, dan sektor ekonomi dengan pangsa kredit UMKM terbesar. Kinerja keuangan UMKM yang belum pulih pada periode pascapandemi menyebabkan penurunan kemampuan bayar sehingga menahan permintaan kredit dari UMKM. Sebaliknya, strategi perbaikan kualitas kredit mendorong bank untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Pada IKNB, kondisi serupa turut mendorong melambatnya pertumbuhan pembiayaan dari PP dan

kontraksi pertumbuhan dari *fintech lending*. Di sisi lain, pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM tumbuh kuat, didukung kualitas pembiayaan yang membaik. Minat penyaluran kredit UMKM pada perbankan syariah cenderung kuat pada sektor dengan ekosistem yang telah terbentuk, termasuk *Islamic Ecosystem*.

Kebijakan makroprudensial longgar tetap dipertahankan selama 2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*) dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Untuk mendukung kinerja intermediasi optimal, Bank Indonesia memperkuat instrumen KLM pada 1 Juni 2024 untuk mendukung kinerja intermediasi optimal dengan memberikan tambahan likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor ekonomi penopang pertumbuhan. Implementasi Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) pada 1 Agustus 2024 turut memberikan pula ruang fleksibilitas bagi bank dalam pengelolaan pendanaan luar negeri jangka pendek guna mendukung kebutuhan pembiayaan nasional, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk turut menjaga SSK, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), termasuk ruang fleksibilitas repo guna menjaga ketahanan likuiditas perbankan. Bank Indonesia juga mendukung kebijakan Pemerintah terkait keuangan inklusif dan hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata, melalui optimalisasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), KLM untuk sektor inklusif dan berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM hijau melalui fasilitasi model bisnis yang berkelanjutan. Sinergi dan koordinasi kebijakan terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, otoritas terkait, maupun mitra strategis lainnya, termasuk koordinasi kebijakan nasional dalam rangka menjaga SSK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun koordinasi secara bilateral antar anggota KSSK.

Prospek pertumbuhan intermediasi perbankan diperkirakan lebih tinggi pada 2025, didukung ketahanan sistem keuangan dan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan ekonomi keuangan global pada 2024 diperkirakan berlanjut

dan meningkat pada 2025, namun ekonomi nasional diperkirakan tetap tumbuh baik pada kisaran 4,7-5,5%, didukung terjaganya permintaan domestik, membaiknya kinerja ekspor, terjaganya inflasi dan terkendalinya nilai tukar Rupiah. Kredit diperkirakan tumbuh meningkat dalam kisaran 11-13% didukung terjaganya prospek perekonomian nasional dan kenaikan harga komoditas global. Dari sisi permintaan, permintaan kredit dari korporasi diperkirakan meningkat didukung membaiknya kinerja keuangan, menurunnya pertumbuhan pendanaan internal, dan terjaganya preferensi pembiayaan pada kredit perbankan. Sedangkan, permintaan kredit konsumsi RT utamanya kelas atas diperkirakan meningkat seiring membaiknya kemampuan membayar. Dari sisi penawaran, minat perbankan dalam penyaluran kredit diperkirakan tetap tinggi didukung lebih kondusifnya tingkat suku bunga, memadainya kondisi likuiditas didukung insentif likuiditas, terjaganya risiko kredit dan kuatnya permodalan perbankan. Kendati demikian, keberlanjutan pertumbuhan kredit pada 2025 dibayangi risiko melemahnya daya beli RT kelas menengah bawah dan kinerja UMKM, serta membutuhkan dukungan kecukupan pertumbuhan pendanaan dan likuiditas perbankan, utamanya pada bank yang merupakan penopang pertumbuhan kredit.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga SSK.

Kebijakan makroprudensial longgar akan ditempuh untuk mendukung pertumbuhan yang optimal melalui akselerasi pembiayaan kepada sektor prioritas yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Siklus keuangan Indonesia diperkirakan belum mencapai puncaknya hingga 2028, sehingga membuka ruang bagi peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut. Bauran kebijakan makroprudensial dilanjutkan melalui berbagai instrumen kebijakan sesuai dengan sasaran kredit yang optimal, ketahanan sistem keuangan, serta keuangan yang inklusif dan hijau. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan sinergi bauran kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk program Asta Cita Pemerintah.

Bab 1

KETAHANAN EKONOMI INDONESIA MEMITIGASI DAMPAK GEJOLAK GLOBAL

Kinerja ekonomi global pada 2024 diwarnai dinamika perubahan geopolitik dan peningkatan ketidakpastian yang berlangsung cepat selama paruh kedua 2024. Perekonomian global pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih rendah dari 2023, dengan divergensi pola pertumbuhan antarnegara yang semakin meningkat. Ekonomi AS tetap kuat, Tiongkok dan Kawasan Eropa melemah, sementara negara berkembang tumbuh moderat. Ketidakpastian global meningkat pada penghujung 2024 akibat eskalasi geopolitik dan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan keuangan dari arah kebijakan AS yang mengutamakan kepentingan AS ("America First"). Sejalan dengan hal tersebut, proses disinflasi AS dan global diperkirakan tertahan sehingga suku bunga kebijakan AS (FFR) diproyeksikan tetap tinggi. Dampak rambatannya menyebabkan penguatan dolar AS serta peningkatan yield US Treasury dan premi risiko obligasi pemerintah yang kemudian memicu pembalikan arus modal dan pelemahan nilai tukar negara berkembang pada akhir 2024.

Pemulihan ekonomi domestik berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi Pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, serta ekspor yang tetap tumbuh ditengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi LU, pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi tetap baik. Inflasi IHK tercatat terkendali pada sasaran $2,5 \pm 1\%$. SSK tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kredit perbankan 2024 berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 10 – 12%. Sistem keuangan tetap menghadapi beberapa tantangan selama 2024, antara lain terbatasnya pertumbuhan DPK dan pemulihan kinerja UMKM, serta konsentrasi pertumbuhan kredit pada beberapa bank utama. Kendati demikian, masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap SSK, di tengah berbagai potensi kerentanan dan guncangan terhadap sistem keuangan.

1.1 Dinamika Geopolitik Berdampak Pada Perkembangan Ekonomi dan Sistem Keuangan Global

Perekonomian global mengalami fenomena “*slower and divergence growth*” akibat dinamika geopolitik yang berubah cepat. Prospek ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pada 2023 sebesar 3,3%. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara semakin meningkat. Ekonomi AS diperkirakan tetap kuat akibat insentif fiskal dan kenaikan produktivitas, sementara perekonomian Tiongkok dan Eropa akan cenderung melambat akibat lemahnya permintaan domestik dan dampak kebijakan tarif dagang AS. Di sisi lain, pertumbuhan sejumlah negara berkembang masih cukup baik, didukung terjaganya permintaan domestik. Ketidakpastian global kembali meningkat pada akhir 2024 akibat eskalasi geopolitik dan kekhawatiran dampak arah kebijakan “*America First*” Presiden AS, terhadap perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan.

Proses disinflasi global yang tertahan mengubah arah kebijakan moneter negara maju, dengan dampak negatif pada ketidakpastian keuangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 menjadi 5,2% pada 2024. Namun, proses disinflasi negara maju tertahan oleh persistensi inflasi jasa dan harga pangan yang masih tinggi. Dinamika inflasi dan eskalasi konflik geopolitik global mengubah arah kebijakan moneter bank sentral negara utamanya AS di penghujung tahun 2024. Ekspektasi penurunan FFR yang lebih rendah dari prakiraan dan potensi defisit fiskal AS yang melebar memicu kenaikan *yield US Treasury* pada semua tenor, serta terjadinya fenomena “*strong US Dollar*” dan “*invest in America*” yang mendorong aliran portofolio asing ke AS. Kondisi ini berdampak negatif pada kenaikan premi risiko obligasi pemerintah dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang.

1.2 Ketahanan Ekonomi Domestik Kuat dan Sistem Keuangan Berdaya Tahan Dalam Memitigasi Dampak Rambatan Global

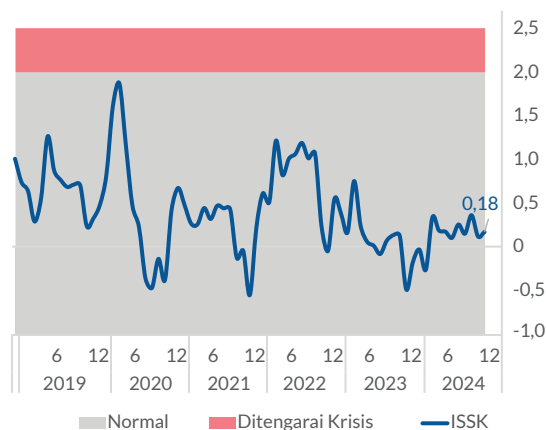
Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global. Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan yang tetap baik sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi didukung konsumsi Pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, serta ekspor yang tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi LU, pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi sebagai kontributor utama tetap baik. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi didukung pencapaian inflasi yang terjaga rendah. Hal tersebut didukung sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Inflasi IHK pada 2024 tercatat 1,57%, lebih rendah dibandingkan dengan 2023 sebesar 2,61%. Ke depan, Bank Indonesia

memprakirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5% pada 2025, sebelum meningkat dalam kisaran 4,8-5,6% pada 2026. Bank Indonesia juga terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi pada 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didukung ketahanan eksternal dan stabilitas nilai tukar Rupiah. NPI tetap sehat dan diperkirakan surplus pada 2024, didukung rendahnya defisit transaksi berjalan, dalam kisaran 0,1-0,9% dari PDB, dan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2024 tercatat tinggi sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Terjaganya ketahanan eksternal dan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada akhir

2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095 per dolar AS, melemah sebesar 4,34% dibandingkan dengan akhir 2023. Pelemahan ini lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah nilai tukar mata uang negara lain seperti Won Korea, Peso Mexico, Real Brasil, Yen Jepang, dan Lira Turki. Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah dan optimalisasi instrumen operasi moneter *pro-market* melalui penerbitan SRBI sehingga berhasil menjaga daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik dan menarik kembali aliran masuk portofolio asing.

SSK mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap baik pada 2024. Kondisi tersebut tecermin dari ISSK¹ yang tetap berada di zona Normal selama 2024 (Grafik 1.2.1). Pertumbuhan kredit tetap kuat dan berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 10 – 12% sehingga mendukung pembiayaan perekonomian. Sistem keuangan berdaya tahan dalam memitigasi dampak rambatan global, kendati dihadapkan beberapa tantangan antara lain terbatasnya pertumbuhan DPK dan kinerja UMKM, serta ketergantungan atau konsentrasi pertumbuhan kredit pada beberapa bank kontributor utama.



Grafik 1.2.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan merupakan suatu indeks yang mencerminkan kondisi kestabilan sistem keuangan.

Intermediasi perbankan yang tetap kuat mendukung pembiayaan perekonomian. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 10,39% pada 2024, terutama didorong segmen debitur korporasi dan jenis kredit investasi. Dari sisi penawaran, minat perbankan untuk menyalurkan kredit tetap terjaga. Tantangan berupa terbatasnya pertumbuhan DPK direspons perbankan dengan melanjutkan realokasi aset likuid ke kredit dan penerbitan instrumen pendanaan non-DPK, antara lain surat berharga dan pinjaman luar negeri. KLM dari Bank Indonesia turut mendukung proses realokasi aset dimaksud dan memastikan kecukupan pendanaan bagi penyaluran kredit, khususnya kepada debitur pada sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perekonomian. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh kinerja korporasi yang terjaga, di tengah konsumsi rumah tangga yang tumbuh terbatas.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik, didukung ketahanan perbankan yang kuat dan kemampuan bayar korporasi yang terjaga. Ketahanan perbankan tecermin dari risiko kredit yang rendah, permodalan yang kuat, dan likuiditas yang memadai dalam menopang pertumbuhan kredit. Perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, tecermin dari berlanjutnya tren penurunan rasio NPL dan LaR, masing-masing menjadi sebesar 2,08% dan 9,28% pada Desember 2024. Ketahanan likuiditas terjaga dan permodalan perbankan tetap tinggi, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59% dan CAR sebesar 26,87%. Ketahanan perbankan tersebut didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang terjaga, tecermin dari ICR sebesar 2,09, serta konsumsi rumah tangga yang terjaga baik. Pertumbuhan pembiayaan inklusif melambat, sejalan dengan masih berlangsungnya pemulihan kinerja keuangan debitur UMKM dan strategi perbaikan kualitas kredit oleh perbankan dan IKNB. Di tengah potensi rambatan ketidakpastian global yang masih tinggi kepada perekonomian domestik, beberapa kerentanan dan guncangan perlu diwaspadai dampaknya terhadap kinerja perbankan, korporasi, dan rumah tangga.

1.3

Persepsi Sumber Kerentanan dan Guncangan Sistem Keuangan Indonesia pada Semester II 2024²

SSK terjaga di tengah kerentanan (*vulnerabilities*)³ dan guncangan (*shocks*)⁴ yang bersumber dari dinamika global dan domestik. Hasil survei persepsi masyarakat atas sumber risiko sistemik pada semester II 2024 memperlihatkan lima hal yang dipersepsikan sebagai sumber kerentanan utama. Pertama, dominasi bank besar dalam sistem keuangan. Pertumbuhan kredit utamanya dikontribusikan oleh bank besar yang tergolong KBMI 3 dan 4⁵, dengan peran yang lebih terbatas pada kelompok bank lainnya. Akibatnya, dinamika kapasitas intermediasi dan minat penyaluran kredit pada bank KBMI 3 dan 4 ke depan berpotensi memengaruhi prospek kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Kedua, penyaluran kredit perbankan yang terkonsentrasi pada debitur besar. Penurunan kemampuan bayar debitur besar, tentunya akan memiliki dampak peningkatan risiko kredit bagi perbankan. Ketiga, pendanaan perbankan yang terkonsentrasi pada deposito inti. Kondisi ini mencerminkan tingginya daya tawar deposito inti sehingga berpotensi menyebabkan tingginya biaya dana perbankan. Keempat, sumber pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kelima, literasi keuangan yang tersegmentasi dan tidak merata sehingga berpotensi turut menghambat pengembangan sektor keuangan.

Hasil survei juga menunjukkan lima guncangan (*shocks*) utama yang dapat mengganggu SSK. Pertama, perilaku *wait-and-see* dari dunia usaha di tengah proses transisi Pemerintah. Perilaku ini dapat memengaruhi realisasi ekspansi usaha debitur dan penyaluran kredit perbankan. Kedua, potensi melambatnya perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan kinerja korporasi eksportir. Ketiga, peningkatan volatilitas harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia yang dapat memperburuk kinerja korporasi eksportir. Keempat, perlambatan ekonomi nasional yang disebabkan konsumsi domestik yang belum kuat. Kelima, dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap volatilitas nilai tukar rupiah dan potensi aliran modal keluar dari Indonesia.

Di tengah kerentanan dan potensi guncangan tersebut, masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ketahanan sektor keuangan Indonesia. Mayoritas responden survei meyakini SSK tetap kuat dalam menghadapi berbagai potensi risiko sistemik. Kondisi tersebut didukung oleh sinergi bauran kebijakan nasional antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta mengurangi dampak ketidakpastian global pada perekonomian.

2 Berdasarkan RAM yang disusun dari hasil Survei Risiko Sistemik Semester II 2024 (154 responden dari institusi keuangan, korporasi, pengamat ekonomi, dan akademisi, data per 9 Oktober 2024).

3 Kerentanan atau *vulnerabilities* adalah kondisi sistem keuangan saat ini yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran *shock*.

4 Guncangan atau *Shocks* adalah peristiwa tertentu yang memicu atau membarengi terjadinya krisis. Risiko termaterialisasi ketika *shock* berinteraksi dengan *vulnerability* dan akan memiliki dampak sistemik apabila tidak diimbangi ketahanan sistem keuangan yang memadai.

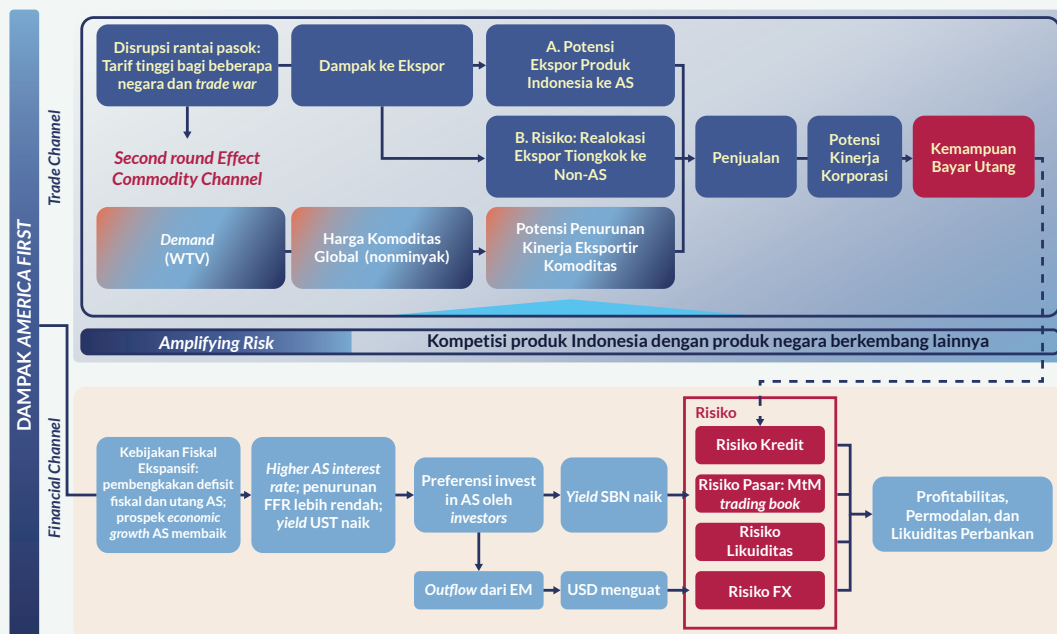
5 Pengelompokan bank berdasarkan modal inti sebagaimana diatur pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Boks 1.1

Tantangan Kebijakan “America First” Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Kebijakan *America First* Presiden AS, diperkirakan membawa dampak signifikan pada aspek ekonomi, perdagangan, investasi, dan harga komoditas global. Kebijakan perdagangan menjadi salah satu prioritas utama tujuan memperbaiki kinerja perdagangan AS melalui pemberlakuan tarif tinggi terhadap negara dengan surplus perdagangan yang besar terhadap AS. Tiongkok, Kanada, Meksiko, Eropa, Jepang dan Vietnam merupakan negara-negara yang berpotensi terdampak dari kebijakan ini. Dampaknya akan dirasakan produk Tiongkok berupa mesin, elektronik dan kimia, ataupun produk Uni Eropa dan Inggris berupa besi, aluminium, dan kendaraan bermotor. Dengan cakupan pemberlakuan yang luas, arah kebijakan perdagangan AS ini berpotensi menimbulkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dan menahan penurunan inflasi global. Perang dagang dan fragmentasi perdagangan akan mendorong perlambatan ekonomi global akibat pelemahan kinerja ekspor berbagai negara.

Pemerintahan AS berencana memberikan insentif kebijakan fiskal berupa pemotongan pajak bagi perorangan dan dunia usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, akibat kenaikan daya beli masyarakat dan investasi dunia usaha. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini akan meningkatkan tekanan signifikan pada beban fiskal dan utang pemerintah AS. Kebijakan imigrasi untuk membatasi tenaga kerja asing juga dikhawatirkan menimbulkan keketatan di pasar tenaga kerja. Dampaknya akan terlihat pada inflasi yang meningkat dan memengaruhi tertahannya ekspektasi penurunan FFR dan kenaikan *yield US Treasury*. Selain itu, keputusan Presiden AS untuk menarik diri dari komitmen transisi hijau “Paris Agreement” akan memengaruhi perkembangan harga komoditas dan energi global. Terlebih, jika arah kebijakan luar negeri AS terutama terhadap North Atlantic Treaty Organization, Rusia-Ukraina, dan Timur Tengah berdampak pada meningkatnya eskalasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B1.1.1. Transmisi Kebijakan *America First* Terhadap SSK

konflik yang merambat kepada sektor keuangan. Hasil pemilihan umum AS ini telah berdampak negatif terhadap kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, akibat ketidakpastian yang meningkat. Ke depan, kebijakan *America First* ini diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global, fragmentasi perdagangan, dan perilaku investor global untuk lebih selektif dalam alokasi modal khususnya ke negara berkembang.

Ketidakpastian global dapat memengaruhi kondisi SSK Indonesia melalui dua jalur transmisi yaitu jalur perdagangan dan jalur keuangan. Dari jalur perdagangan (*trade channel*), kebijakan *America First* berpotensi berdampak pada kinerja korporasi eksportir Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang ekspor ke AS bagi negara yang tidak dikenakan tarif tinggi seperti Indonesia, menggantikan pangsa ekspor negara yang terkena tarif tinggi. Namun, peluang ekspor produk Indonesia akan menghadapi persaingan yang kuat dari produk serupa dari negara berkembang lainnya. Di sisi lain, korporasi Indonesia juga akan menghadapi tantangan dari potensi realokasi produk Tiongkok akibat pembatasan ekspor ke AS. Selanjutnya kebijakan ini juga berpotensi memiliki *second round effect* melalui jalur harga komoditas (*commodity channel*). Fluktuasi harga komoditas, utamanya non-migas, berpengaruh terhadap permintaan global. Berbagai hal tersebut tentunya akan memengaruhi kinerja penjualan

dan kemampuan bayar korporasi Indonesia. Asesmen Bank Indonesia memperlihatkan ketahanan korporasi terjaga dari dampak negatif kebijakan AS dari jalur perdagangan, termasuk jalur harga komoditas.

Dari jalur keuangan (*financial channel*), arah kebijakan *America First* akan menyebabkan terjadinya fragmentasi investasi dan keketatan pasar keuangan global. Prospek pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi akan mendorong pembalikan aliran modal investasi global ke AS. Selain itu, tingginya kebutuhan utang Pemerintah AS akan mendorong kenaikan *yield US Treasury* dan berdampak pada tingginya suku bunga global. Kondisi ini, dapat memicu investor global untuk meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi atas kepemilikan pada obligasi pemerintah negara berkembang, termasuk SBN Pemerintah Indonesia. Risiko terjadinya aliran keluar portofolio asing dari Indonesia ini dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Kenaikan *yield* SBN dapat menimbulkan kerugian risiko pasar dari eksposur kepemilikan *trading book* perbankan. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi menekan pendapatan bank yang memiliki posisi devisa neto *short* serta debitur dengan hutang valas yang besar. Kendati demikian, hasil *stress-test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko dampak kebijakan AS dari jalur keuangan.

Bab 2

SUSTAINABILITAS INTERMEDIASI KEUANGAN TERJAGA

Sustainability intermediasi keuangan terjaga, didukung tetap baiknya minat dan kapasitas pembiayaan perbankan dan IKNB dari sisi penawaran. Kredit bank pada 2024 tumbuh kuat mencapai 10,39%, terutama didistribusikan kredit korporasi. Kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, dengan ILR cenderung longgar pada mayoritas sektor ekonomi. Penyaluran kredit juga ditopang DPK yang tumbuh meningkat menjadi 4,48% pada 2024 dan pengelolaan likuiditas yang baik, didukung dampak positif KLM. Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan kredit perbankan menghadapi tantangan divergensi kinerja antarbank akibat terbatasnya pertumbuhan DPK dan belum pulihnya kinerja UMKM. Dari sisi nonbank, penyaluran kredit ditopang oleh PP, Pegadaian, Fintech Lending, dan Lembaga Keuangan Mikro, yang mencatatkan pertumbuhan kredit positif.

Kinerja intermediasi turut dipengaruhi kompetisi yang kondusif di pasar kredit dan pasar dana, sehingga berdampak positif bagi keterjangkauan harga kredit bagi dunia usaha dan masyarakat. Selama 2024, suku bunga kredit menurun sebesar 5 bps, sementara suku bunga DPK naik sebesar 10 bps. Di pasar dana, kenaikan suku bunga DPK mendorong kompetisi bank untuk mendapatkan pendanaan di tengah terbatasnya pertumbuhan DPK. Di pasar kredit, bank mempertahankan suku bunga kredit di level yang kompetitif untuk menjaga daya saing dan penguasaan pangsa kredit. Minat pembiayaan bank tetap tinggi, mendorong tingkat suku bunga kredit yang masih lebih menarik dibandingkan tingkat pengembalian surat

berharga. Kompetisi dalam penghimpunan dana dan tekanan margin suku bunga mendorong bank melanjutkan realokasi aset likuid ke kredit, sebagai strategi optimalisasi tingkat pendapatan dengan mengurangi alokasi aset dengan imbal hasil rendah.

Dari sisi permintaan, sustainability intermediasi didukung perbaikan kinerja korporasi, terjaganya konsumsi RT, serta kemudahan akses pembiayaan nonbank. Kinerja korporasi meningkat didukung pertumbuhan penjualan dan investasi korporasi, sehingga mendorong penguatan permintaan pembiayaan KMK dan KI korporasi. Permintaan kredit juga didukung tetap tingginya preferensi korporasi pada pembiayaan perbankan, di tengah perlambatan pertumbuhan dana internal korporasi. Meski demikian, perlu diwaspadai tantangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kinerja korporasi dan permintaan pembiayaan ke depan. Sementara itu, terjaganya konsumsi RT mendorong meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi RT, terutama kelas atas. Kredit konsumsi RT tetap ditopang KPR yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Meski demikian, suku bunga KPR yang masih kompetitif, insentif pemerintah berupa PPN DTP dan kebijakan LTV Bank Indonesia, berhasil menahan perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam sehingga KPR masih tumbuh tinggi pada 2024. Pembiayaan nonbank melalui fintech lending meningkatkan akses pembiayaan bagi RT, termasuk kelas bawah, didukung adopsi digitalisasi yang mengedepankan kemudahan dan kecepatan layanan.

2.1

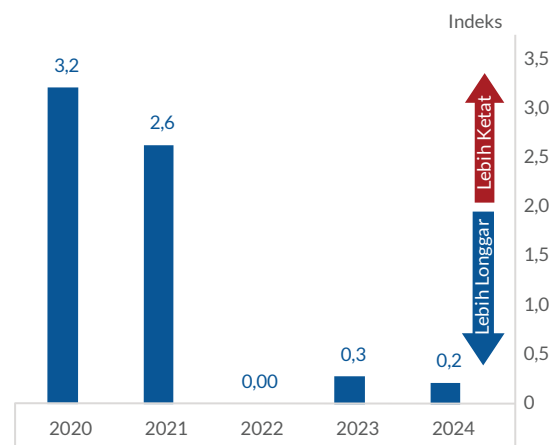
Kapasitas Pembiayaan dan Minat Penyaluran Kredit Mendukung Keberlanjutan Intermediasi

Intermediasi perbankan pada 2024 terjaga, pertumbuhan kredit tetap kuat. Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39%, relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,38%. Kelompok KBMI 4 berkontribusi besar terhadap pencapaian kredit, dengan pertumbuhan sebesar 13,01%. Sementara itu dari sisi segmen kredit, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit korporasi yang tumbuh mencapai 15,59%. Penyaluran kredit kepada korporasi mendorong peningkatan pertumbuhan KI, khususnya sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Kontruksi, Pengangkutan, serta LGA, sehingga turut mendukung penguatan kapasitas perekonomian nasional (Tabel 2.1.1). Meski penyaluran kredit modal kerja kepada korporasi juga masih tinggi, perlambatan kredit UMKM menahan KMK sehingga tumbuh melambat. Belum pulihnya kredit UMKM turut dipengaruhi strategi beberapa bank dengan pangsa kredit UMKM tinggi yang berfokus pada upaya perbaikan kualitas kredit setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19.

Sustainability intermediasi didukung minat penyaluran kredit perbankan yang tetap baik. Hal tersebut tecermin dari ILS yang relatif stabil sejak 2022 (Grafik 2.1.1), dengan kebijakan penyaluran kredit yang cenderung longgar pada aspek suku bunga kredit dan biaya persetujuan kredit. Sejalan dengan ILS, ILR terindikasi masih tetap longgar pada mayoritas sektor

ekonomi, termasuk sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan kredit (Grafik 2.1.2). Relatif longgarnya ILR mengindikasikan masih tetap tingginya minat perbankan dalam menyalurkan kredit.

Strategi realokasi aset dan pengelolaan likuiditas yang baik mampu mendukung intermediasi perbankan, di tengah terbatasnya pertumbuhan DPK. Akselerasi penyaluran kredit bank sebesar 10,39% di tengah moderatnya pertumbuhan DPK sebesar 4,48% mendorong berlanjutnya realokasi aset pada 2024, terutama pada kelompok bank BUMN.



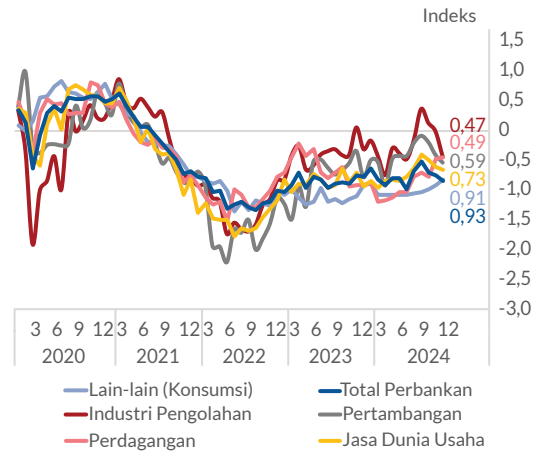
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.1. Indeks Lending Standard

Tabel 2.1.1. Kredit Total, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi per Sektor Ekonomi

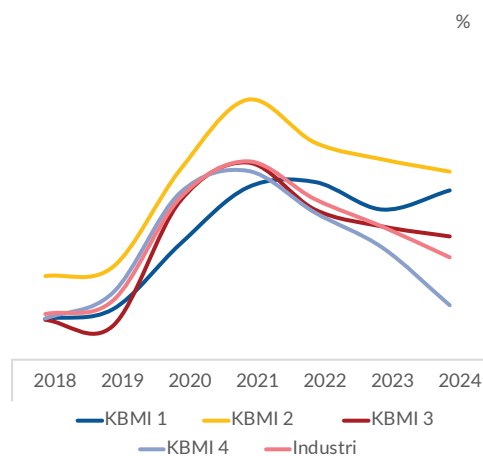
Sektor Ekonomi	Total				KMK				KI			
	Pertumbuhan (% yoy)		Kontribusi (yoy)		Pertumbuhan (% yoy)		Kontribusi (yoy)		Pertumbuhan (% yoy)		Kontribusi (yoy)	
	Des-23	Des-24	Des-24	Des-24	Des-23	Des-24	Des-24	Des-24	Des-23	Des-24	Des-24	Des-24
1. Pertanian	8,45	4,84	0,35	6,94	11,60	1,05	0,08	7,18	5,69	8,35	1,17	13,37
2. Pertambangan	22,36	28,59	1,17	4,77	18,83	33,03	1,51	5,61	26,24	23,98	1,78	8,10
3. Industri Pengolahan	4,72	9,56	1,51	15,64	3,64	8,92	2,19	24,66	7,45	11,13	1,87	16,47
4. Listrik, Gas, Air	13,33	19,75	0,51	2,81	8,03	-11,42	-0,12	0,83	14,54	26,50	2,09	8,77
5. Konstruksi	-0,37	0,02	0,00	5,05	4,18	-8,27	-0,62	6,36	-6,89	13,28	1,05	7,89
6. Perdagangan	8,77	4,27	0,77	16,92	7,23	2,79	0,86	29,33	14,92	9,76	1,37	13,56
7. Pengangkutan	19,28	19,16	1,01	5,69	19,56	19,90	0,78	4,36	18,70	19,22	2,45	13,39
8. Jasa Dunia Usaha	16,98	13,09	1,34	10,49	20,38	16,64	2,54	16,46	10,33	5,48	0,66	11,16
9. Jasa Sosial	35,06	21,15	0,84	4,37	30,15	24,94	1,13	5,20	40,75	17,07	1,21	7,30
10. Lain-lain (Konsumsi)	9,10	10,61	2,89	27,32								
Total	10,38	10,39	10,39	100	10,05	8,35	8,35	100	12,26	13,62	13,62	100

Sumber: Bank Indonesia, diolah



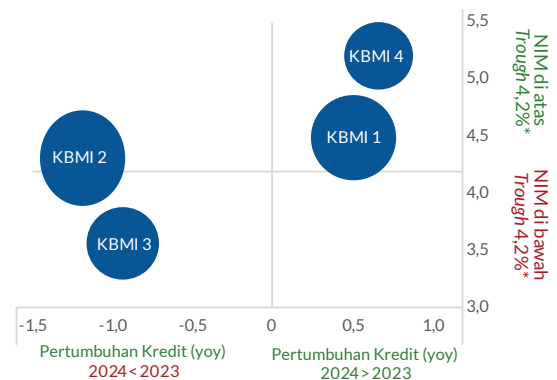
Grafik 2.1.2. Indeks Lending Requirement (ILR) per Sektor Ekonomi

Bank mengurangi penempatan alat likuid untuk mendukung penyaluran kredit yang lebih ekspansif dan hal ini menjadi salah satu strategi untuk optimalisasi pendapatan melalui pengurangan porsi aset likuid dengan imbal hasil rendah (Grafik 2.1.3). Akselerasi kredit ditengah moderasi pertumbuhan DPK ini mengakibatkan kapasitas penyaluran kredit (*lending capacity*) pada kelompok bank BUMN menjadi semakin terbatas, dengan rasio AL/DPK telah kembali ke level prapandemi. Meski demikian, kelompok bank BUMN juga memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendanaan non-DPK⁶ untuk mendukung target penyaluran kreditnya. Pada kelompok bank lainnya, rasio *lending capacity* berada di atas level industri dan mengindikasikan masih tingginya potensi penyaluran kredit ke depan. KLM turut mendukung proses realokasi aset ke kredit dan kecukupan pendanaan bagi penyaluran kredit.

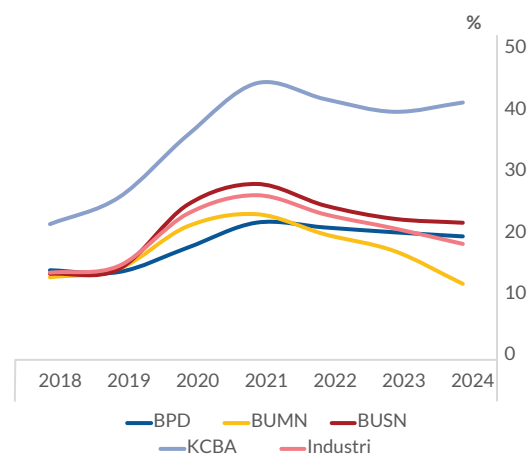


Grafik 2.1.3. Perkembangan Rasio Alat Likuid dan Lending Capacity Perbankan

Keberlanjutan pertumbuhan kredit perbankan menghadapi tantangan divergensi kinerja antarbank. Perbedaan laju pertumbuhan intermediasi antarkelompok bank berdampak pada keberagaman kinerja profitabilitas. Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, KBMI 4 dan KBMI 1 mencatatkan level profitabilitas (NIM) yang lebih tinggi dibandingkan kinerja terlemah industri secara historis. Sementara itu, KBMI 3 dengan tantangan perlambatan kredit mencatatkan NIM yang lebih rendah. Di sisi lain, dukungan pendapatan bunga nonkredit dan keuntungan transaksi derivatif dapat menopang profitabilitas bank KBMI 2 di tengah lemahnya pertumbuhan kredit (Grafik 2.1.4).



Grafik 2.1.4. Kuadran Kredit dan NIM bank per KBMI



⁶ Pinjaman dan penerbitan surat berharga

Pembiayaan IKNB turut mendukung intermediasi keuangan, didorong positifnya pertumbuhan PP, Pegadaian, *Fintech Lending*, dan Lembaga Keuangan Mikro. Sampai dengan September 2024, pembiayaan PP tumbuh sebesar 9,39% dan masih mendominasi penyaluran pembiayaan IKNB dengan pangsa 54,59%. *Fintech lending* mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 33,73%, tertinggi dibandingkan IKNB lainnya. Adopsi digitalisasi, persyaratan pengajuan

pinjaman yang mudah dan proses pencairan yang cepat terindikasi menjadi faktor pendorong bagi peningkatan pertumbuhan pembiayaan oleh *fintech lending*. Sementara itu, Pegadaian dan Lembaga Keuangan Mikro mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 26,53% dan 2,80%. Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan Lembaga Keuangan Khusus, PP Infrastruktur, dan modal ventura menahan laju pertumbuhan intermediasi IKNB (Tabel 2.1.2).

Tabel 2.1.2. Pembiayaan oleh IKNB

IKNB*	Total Pembiayaan (Miliar Rp)					Pertumbuhan (% yoy)			Share
	2021	2022	2023	2023	2024	2022	2023	2024	2024
	Des	Des	Sep	Des	Sep	Des	Des	Sep	Sep
Perusahaan Pembiayaan	364.232	415.864	458.703	470.863	501.784	14,18%	13,23%	9,39%	54,59%
Lembaga Keuangan Khusus**	138.919	149.221	240.478	239.982	230.883	7,42%	60,82%	-3,99%	25,12%
Pegadaian	52.420	59.053	67.415	69.491	85.301	12,65%	17,68%	26,53%	9,28%
<i>Fintech Lending</i>	29.880	51.123	55.697	59.644	74.484	71,09%	16,67%	33,73%	8,10%
Modal Ventura	15.330	17.325	17.684	17.343	16.252	13,02%	0,10%	-8,10%	1,77%
PP Infrastruktur**	86.510	97.388	10.795	11.556	10.550	12,57%	-88,13%	-2,27%	1,15%
Lembaga Keuangan Mikro***	836	946	1.002	1.008	1.030	13,09%	6,57%	2,80%	0,11%
Total Pembiayaan	688.126	790.920	851.774	869.888	919.254	14,94%	9,98%	7,92%	100%

Keterangan:

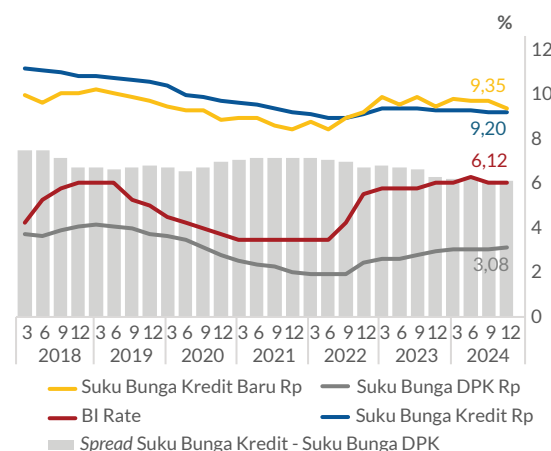
*Total Pembiayaan Netto.

**Sejak Agustus 2023 PT SMI tidak dikategorikan sebagai PP Infrastruktur dan dikategorikan menjadi Lembaga Keuangan Kecil.

***Total Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro posisi September 2023 dan 2024 merupakan posisi Agustus 2023 dan 2024

2.2 Perilaku Kompetisi dan Strategi Pricing Perbankan

Kinerja intermediasi turut dipengaruhi kompetisi yang kondusif di pasar kredit dan pasar dana, sehingga berdampak positif bagi keterjangkauan harga kredit bagi dunia usaha dan masyarakat. Bank merespons perubahan BI Rate selama 2024 dengan menyesuaikan suku bunga kredit dan suku bunga DPK secara bertahap dengan besaran penyesuaian yang berbeda. Suku bunga kredit menurun sebesar 5 bps selama 2024, sementara suku bunga DPK naik sebesar 10 bps (Grafik 2.2.1). Hal tersebut menunjukkan respons suku bunga DPK terhadap kenaikan BI Rate yang lebih cepat dibandingkan suku bunga kredit dan masih kondusifnya kompetisi di pasar kredit dan pasar dana. Di tengah tekanan terhadap margin, profitabilitas bank masih terjaga. Terjaganya profitabilitas turut didukung oleh strategi bank untuk mengoptimalkan



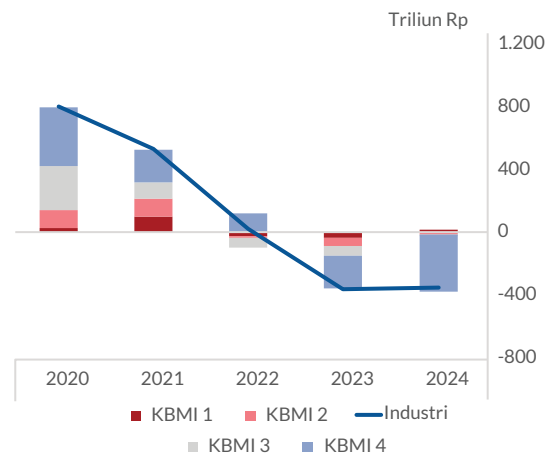
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.1. Perkembangan Suku Bunga Kredit dan DPK

pendapatan nonkredit, terutama *fee-based income*, pendapatan bunga nonkredit, keuntungan transaksi derivatif, dan efisiensi operasional.

Kenaikan suku bunga DPK didorong oleh kompetisi antarbank untuk mendapatkan pendanaan di tengah terbatasnya pertumbuhan DPK. Berlanjutnya peningkatan suku bunga DPK Rupiah pada 2024 lebih didorong oleh kenaikan biaya dana pada segmen nominal besar (di atas Rp2 miliar), sejalan dengan tingginya pangsa DPK nominal besar dalam struktur pendanaan bank. Kenaikan suku bunga DPK nominal besar kemudian berdampak pada peningkatan biaya dana sebesar 44 bps selama 2024 (Grafik 2.2.2). Meski demikian, kenaikan suku bunga DPK pada 2024 masih lebih rendah dibandingkan periode suku bunga tinggi sebelumnya pada 2018 – 2019.

Kompetisi penghimpunan pendanaan selama 2024 mendorong bank melanjutkan realokasi aset likuid untuk menutup *funding gap*⁷. Akselerasi penyaluran kredit mendorong melebarinya *funding gap* perbankan pada 2024, terutama pada KBMI 4 yang menjadi motor pertumbuhan kredit (Grafik 2.2.3). Untuk membatasi ketergantungan pada dana mahal, bank melakukan realokasi aset likuid sebagai strategi bank untuk melakukan optimalisasi imbal hasil dari efisiensi likuiditas dengan mengurangi porsi aset

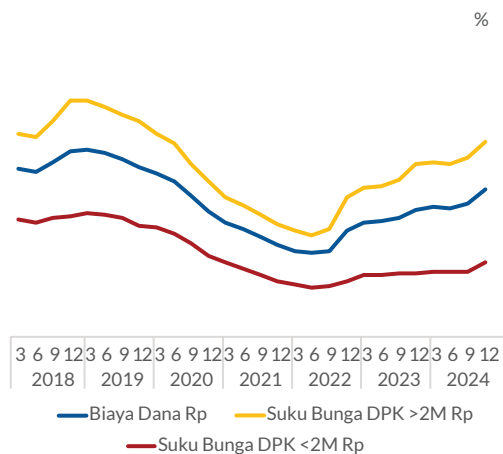


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.3. Perkembangan Funding Gap Perbankan

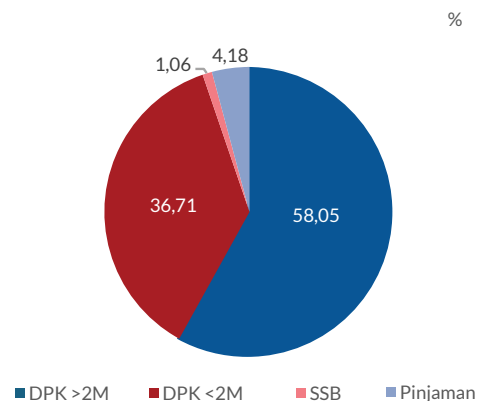
dengan imbal hasil rendah. Kendati dinamika tersebut menyebabkan penurunan alat likuid, namun rasio likuiditas AL/DPK masih memadai pada level 25,59%. Selain itu, insentif likuiditas melalui KLM Bank Indonesia berdampak positif pada proses realokasi aset ke kredit dan memastikan kecukupan pendanaan bagi penyaluran kredit.

Terjaganya minat pembiayaan mendorong bank mempertahankan suku bunga kredit di level yang kompetitif, terutama KBMI 4. Respons ini



Sumber: Bank Indonesia, diolah

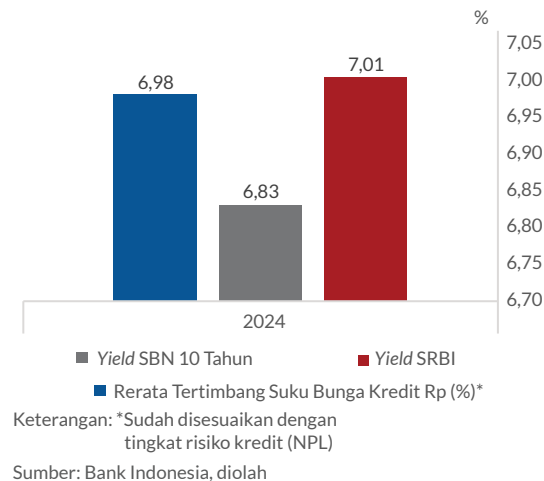
Grafik 2.2.2. Perkembangan Biaya Dana dan Pangsa Pendanaan Bank



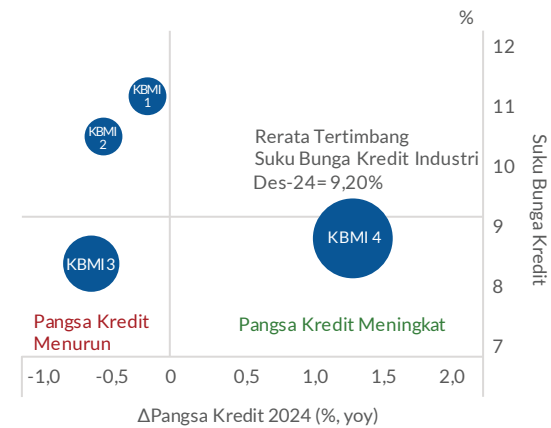
⁷ *Funding gap* terjadi ketika kenaikan DPK pada suatu bank selama satu tahun masih lebih rendah dibandingkan kenaikan penyaluran kreditnya. Sementara itu, kondisi *funding surplus* terjadi ketika kenaikan DPK dalam satu tahun lebih tinggi dibandingkan kenaikan penyaluran kreditnya.

menunjukkan upaya bank dalam menjaga daya saing dan penguasaan pangsa kredit, sehingga menopang akselerasi pertumbuhan kredit. Meskipun suku bunga kredit turun, bank tetap memiliki insentif untuk terus meningkatkan penyaluran kredit, didorong oleh tingkat suku bunga kredit (setelah memperhitungkan

risiko) yang masih lebih menarik dibandingkan tingkat pengembalian surat berharga (Grafik 2.2.4). Di sisi lain, kompetisi pasar kredit menyebabkan KBMI 1, 2, dan 3 mengalami penurunan pangsa kredit, terindikasi akibat suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan KBMI 4 (Grafik 2.2.5).



Grafik 2.2.4. Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan Yield Surat Berharga



Grafik 2.2.5. Perkembangan Pangsa Kredit Kelompok Bank terhadap Suku Bunga Kredit

2.3 Permintaan Pembiayaan Didukung Kinerja Korporasi, Konsumsi Rumah Tangga, Insentif Sektor Properti, serta Kemudahan Akses Pembiayaan IKNB

Permintaan kredit korporasi terjaga didukung perbaikan kinerja penjualan dan pertumbuhan investasi. Penjualan korporasi tumbuh positif sebesar 0,55% pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan dengan 2023 yang mengalami kontraksi. Perbaikan kinerja penjualan terutama dikonstruksikan oleh sektor Pertanian, Industri Pengolahan, LGA, Perdagangan, dan Jasa Sosial, sejalan dengan masih tingginya konsumsi domestik. Sementara perbaikan harga komoditas belum mampu mendorong pemulihan penjualan sektor Pertambangan, yang masih mengalami kontraksi pada triwulan III 2024. Perbaikan kinerja penjualan mendukung terdagangnya profitabilitas korporasi dengan ROE tercatat sebesar 9,86% pada triwulan III 2024, relatif stabil sejak 2023. Investasi korporasi juga masih tumbuh, tercermin pada pertumbuhan belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) pada triwulan III 2024 sebesar 7,47%. Pertumbuhan belanja modal didorong sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Dunia Usaha, yang masih mencatatkan pertumbuhan positif (Tabel 2.3.1).

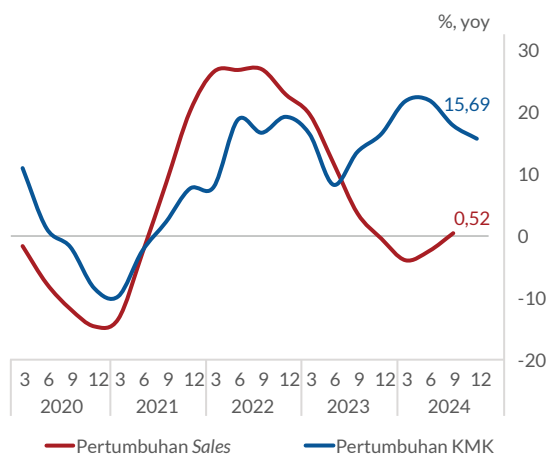
Sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi, permintaan terhadap pembiayaan produktif berupa KMK dan KI menguat. Permintaan KMK dan KI korporasi tumbuh tinggi sejalan dengan upaya korporasi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis. Pada segmen korporasi, kredit KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar 15,69% dan 15,48% pada 2024, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 2.3.1 dan Grafik 2.3.2). Meski demikian, perlu diwaspadai sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kinerja korporasi dan permintaan pembiayaan ke depan, antara lain ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan geopolitik, serta pelemahan daya beli RT, khususnya kelas menengah ke bawah.

Terdagangnya permintaan kredit turut pula didukung tetap tingginya preferensi korporasi pada pembiayaan bank dan perlambatan pertumbuhan dana internal korporasi. Perbankan masih menjadi sumber utama pembiayaan eksternal korporasi, didukung ekspektasi

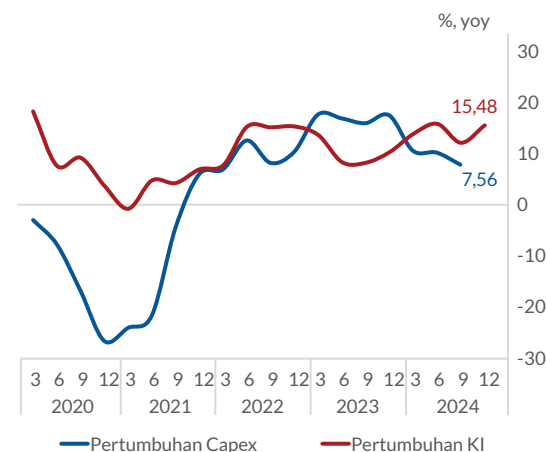
Tabel 2.3.1. Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. per Sektor

Sektor	Pertumbuhan Penjualan (% yoy)					Kontribusi Penjualan (%)	Tren 4y	Return on Equity (%)					Tren 4y	Pertumbuhan Capex (% yoy)					Tren 4y
	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024		
	Des	Des	Des	Jun	Sep			Des	Des	Des	Jun	Sep		Des	Des	Des	Jun	Sep	
Pertanian	37,88	17,00	-9,52	-1,74	2,40	0,11		9,88	14,76	3,93	6,46	6,98		-90,4	31,72	10,92	1,99	1,42	
Pertambangan	44,96	67,53	-9,00	-16,64	-6,88	-1,14		22,67	36,84	19,51	15,56	16,46		30,24	57,69	21,91	12,54	18,24	
Industri Pengolahan	18,42	12,12	-0,47	-1,05	0,17	0,07		8,66	9,40	9,14	8,84	8,45		2,78	15,31	23,50	32,26	21,96	
LGA	4,47	19,32	6,98	5,88	6,07	0,12		9,41	9,49	8,69	9,33	10,19		7,23	-39,54	1,17	-2,28	-6,29	
Konstruksi	8,94	14,74	10,45	9,24	7,86	0,44		1,97	1,98	1,49	6,10	5,60		59,19	-26,27	18,54	4,88	-4,39	
Perdagangan	17,72	26,37	5,26	1,94	3,33	0,57		10,89	18,68	15,34	14,35	15,01		-11,26	57,33	67,48	19,30	0,35	
Pengangkutan	5,25	20,04	8,01	6,45	6,05	0,58		-14,93	37,72	14,92	14,68	14,89		-3,95	-1,64	-0,82	-8,15	-3,85	
Jasa Dunia Usaha	19,67	17,94	0,94	-1,42	-3,09	-0,06		0,48	6,90	1,71	1,35	2,47		-5,14	30,00	28,79	28,97	2,90	
Jasa Sosial	19,31	-2,52	-9,56	-2,98	2,08	0,05		9,15	5,75	0,18	0,57	1,00		-12,22	12,20	3,88	-5,57	-4,48	
Agregat	20,05	22,72	-0,38	-2,31	0,55	0,55		7,75	15,58	9,93	9,85	9,86		5,72	10,05	16,87	9,88	7,47	

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah



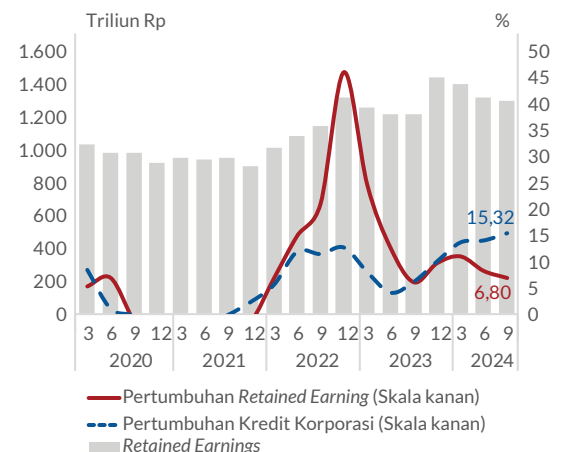
Sumber: BEI, Bloomberg, dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1. Perkembangan Pertumbuhan Penjualan dan KMK Korporasi

Sumber: BEI, Bloomberg, dan Bank Indonesia, diolah

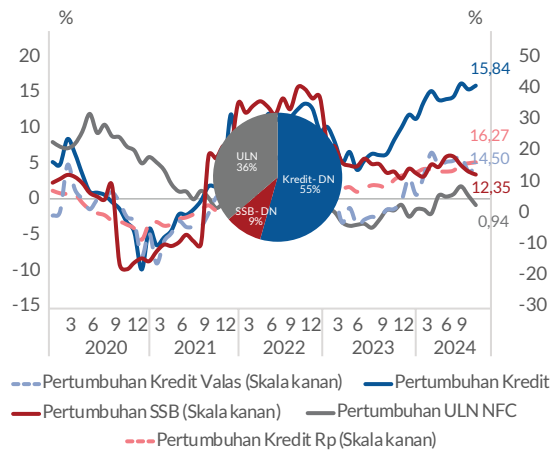
Grafik 2.3.2. Perkembangan Pertumbuhan Capex dan KI Korporasi

suku bunga kredit yang lebih rendah serta proses pengajuan kredit yang tidak sekompleks pembiayaan nonkredit, seperti penerbitan surat berharga dan saham. Kontribusi kredit perbankan terhadap total pembiayaan eksternal korporasi mencapai 55%, dengan pertumbuhan yang meningkat di tengah kontribusi pembiayaan nonkredit yang stabil (Grafik 2.3.4 dan Grafik 2.3.5). Sementara itu pertumbuhan dana internal korporasi relatif melambat, tecermin dari pertumbuhan laba ditahan pada triwulan III 2024 sebesar 6,80%, lebih rendah dibandingkan dengan 2023. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan kredit korporasi dari perbankan yang mencapai 15,32% pada triwulan III 2024 (Grafik 2.3.3).

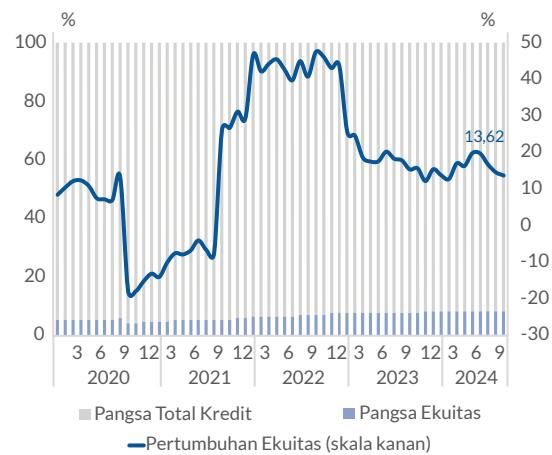


Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.3.3. Pertumbuhan Retained Earnings Korporasi

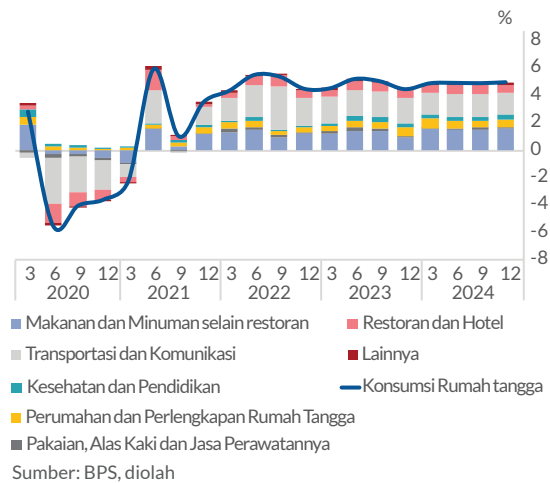


Grafik 2.3.4. Pertumbuhan Pembiayaan UDN & ULN Korporasi

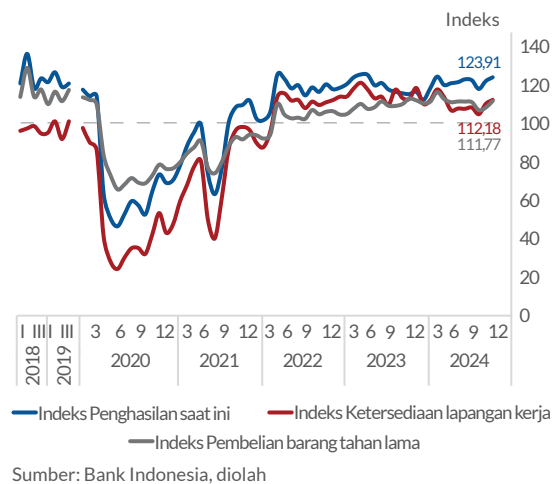


Grafik 2.3.5. Pertumbuhan Pembiayaan Saham Korporasi

Konsumsi RT terjaga, didukung segmen kelas atas. Konsumsi RT tumbuh 4,94% pada 2024, lebih tinggi dari 2023 sebesar 4,82%, ditopang oleh konsumsi RT kelas atas. Hal ini tecermin pada indeks penghasilan kelas atas yang masih lebih tinggi dibandingkan RT kelas lainnya, dengan konsumsi barang/jasa tersier yang masih kuat. Pertumbuhan konsumsi RT dikontribusikan kelompok pengeluaran berupa transportasi dan komunikasi, serta makanan dan minuman selain restoran (Grafik 2.3.6). Kendati meningkat, namun pertumbuhan konsumsi RT masih lebih rendah dibandingkan periode prapandemi yang lebih tinggi dari 5%. Di tengah peningkatan penghasilan konsumen, indeks ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama relatif menurun dibandingkan dengan 2023 (Grafik 2.3.7). Perbaikan konsumsi ke depan masih tertahan tingginya pangsa tenaga kerja informal dalam struktur tenaga kerja nasional dengan upah yang lebih rendah dan jaminan sosial yang terbatas.

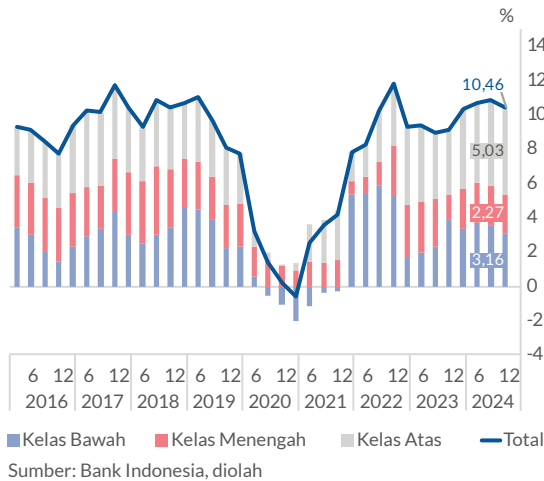


Grafik 2.3.6. Perkembangan Konsumsi RT Berdasarkan Sektor

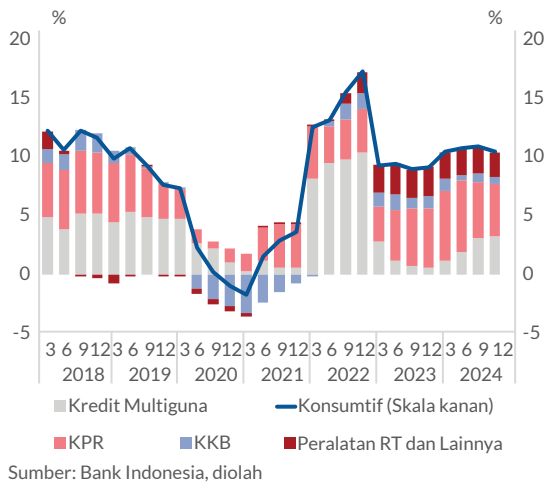


Grafik 2.3.7. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

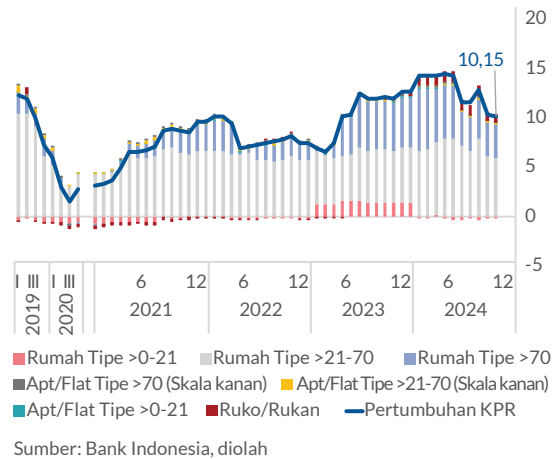
Perbaikan konsumsi RT mendorong tetap kuatnya pertumbuhan kredit konsumsi RT. Kredit konsumsi RT tumbuh sebesar 10,46% pada 2024, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terutama dikontribusikan RT kelas atas, dengan kontribusi pertumbuhannya sebesar 5,03% (Grafik 2.3.8). Berdasarkan jenisnya, kredit konsumsi RT tetap ditopang KPR meski mengalami tren perlambatan pertumbuhan sejak semester II 2024 (Grafik 2.3.9). Namun demikian, suku bunga KPR yang masih kompetitif, insentif pemerintah berupa PPN DTP, dan kebijakan LTV Bank Indonesia berhasil menahan perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam, sehingga KPR masih tumbuh kuat sebesar 10,15% di akhir 2024 (Grafik 2.3.10).



Grafik 2.3.8. Andil Pertumbuhan KK RT menurut Kelas Pendapatan



Grafik 2.3.9. Andil Pertumbuhan KK RT menurut Jenis Kredit



Grafik 2.3.10. Andil Pertumbuhan KPR Berdasarkan Jenis KPR

Di tengah kecenderungan perilaku yang lebih berhati-hati (*selective lending*) oleh perbankan, permintaan RT terhadap pembiayaan turut didukung pembiayaan nonbank, terutama melalui *fintech lending*. Kredit bank kepada RT kelas bawah tetap terbatas, dengan kontribusi pertumbuhan pada 2024 sebesar 3,16%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,88%. Pembiayaan nonbank, khususnya melalui *fintech lending*, meningkatkan akses pembiayaan bagi RT, termasuk kelas bawah, didukung adopsi digitalisasi yang mengedepankan kemudahan dan kecepatan layanan. Penyaluran kredit *fintech lending* kepada debitur perorangan tumbuh tinggi sebesar 31,77% pada 2024, dengan pangsa terhadap total penyaluran kredit *fintech lending* mencapai 93,34%.

Boks 2.1

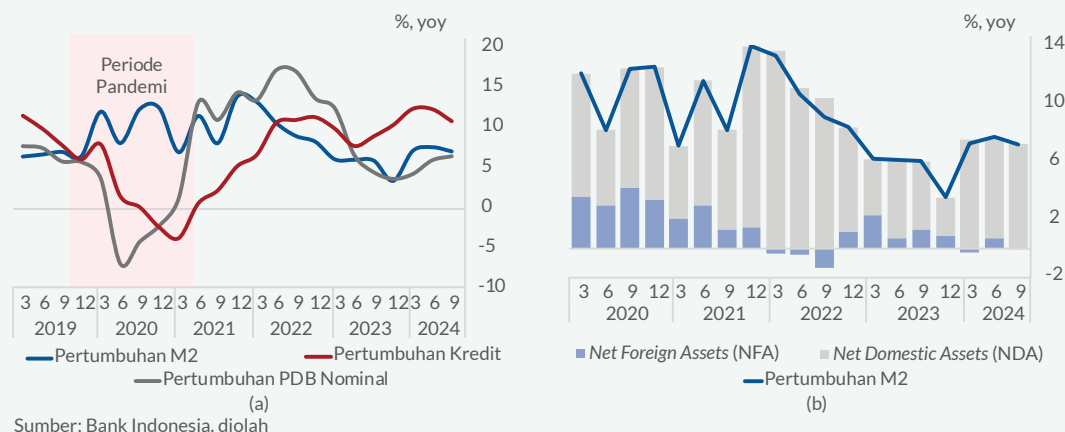
Demand Constraint Beberapa Sektor Kredit Berdasarkan Disequilibrium Model

Asesmen kinerja kredit bank dapat dilihat dari perspektif penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Pendekatan ekuilibrium Maddala (1986) membantu dalam melakukan dekomposisi data realisasi kredit menjadi estimasi *supply* dan *demand* yang membentuknya. Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan Karpanagiotis (2024) mampu menambahkan aspek penyesuaian harga dalam modelnya berdasarkan tingkat sensitivitas agen *supply* dan *demand* terhadap perubahan harga. Model dimaksud terdiri atas 3 (tiga) alternatif, di antaranya: (i) **model basic**, model tanpa penyesuaian harga yang terjadi pada periode *credit crunch*; (ii) **model directional**, model dengan penyesuaian harga pada salah satu agen, yaitu *supply* atau *demand*; dan (iii) **model deterministic**, model dengan penyesuaian harga pada kedua agen, baik *supply* maupun *demand*. Model *directional* terjadi pada kondisi *supply* atau *demand dominant*. Sementara itu, model *deterministic* terjadi pada kondisi pasar kredit yang kompetitif dan terbuka, dimana tidak terdapat *information asymmetry* antara agen *supply* dan *demand*.

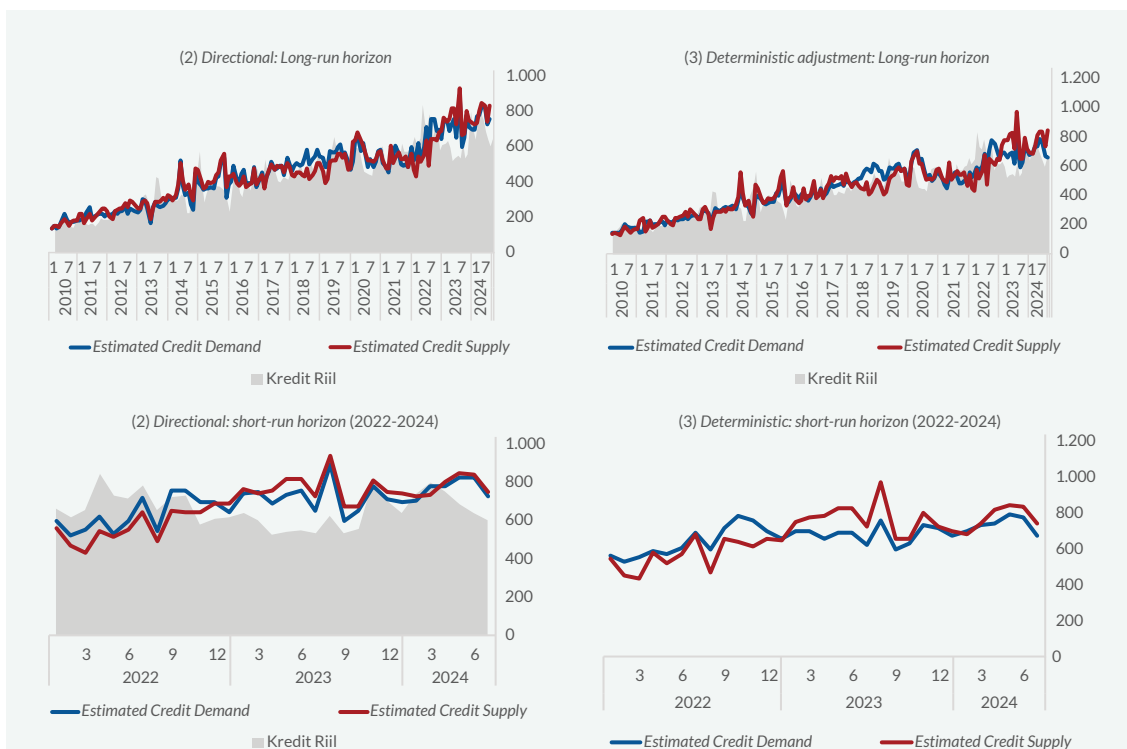
Kecukupan sisi penawaran kredit dipengaruhi oleh kapasitas likuiditas dalam perekonomian, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan uang dalam arti luas (M2). Pertumbuhan M2 yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) menunjukkan adanya kecukupan likuiditas untuk bertransaksi dan berinvestasi, sehingga mendorong aktivitas ekonomi (Grafik B2.1.1a). Pada perekonomian

yang bergantung pada bank sebagai sumber pembiayaan dan investasi (*bank-based economy*), pertumbuhan M2 berkaitan erat dengan kredit bank sebagai sumber utama pembiayaan ekonomi nasional. Saat ini, penciptaan likuiditas domestik Indonesia ditopang oleh tagihan bersih kepada sektor swasta (*Net Claims on Private Sectors*), dengan kontribusi faktor eksternal (*Net Foreign Assets*) yang menurun terhadap penciptaan uang seiring dengan penurunan arus modal asing dan meningkatnya peran pelaku pasar domestik di pasar keuangan (Grafik B2.1.1b).

Model disequilibrium mengindikasikan kecukupan *supply* kredit perbankan dapat memenuhi seluruh kebutuhan *demand* kredit dari pelaku ekonomi industri (*kondisi demand constraint*). Hasil estimasi menggunakan model *directional* dan *deterministic* dengan data selama 15 tahun terakhir (2010 – 2024) menunjukkan kondisi *demand constraint* pada pasar kredit Indonesia, utamanya pada periode *recovery* pascapandemi (2022 – 2024) (Grafik B2.1.2). Kondisi ini terjadi khususnya pada beberapa sektor ekonomi utama yang mengalami pertumbuhan PDB lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB secara agregat di tahun 2024, yaitu pada sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan (Grafik B2.1.3). Gejala *demand constraint* pada ketiga sektor utama ini terlihat dari *demand* kredit yang lebih tidak elastis terhadap perubahan suku bunga kredit dibandingkan *supply*, walaupun dengan suku bunga tren menurun atau



Grafik B2.1.1. Perkembangan Pertumbuhan M2, PDB, dan Pertumbuhan Kredit (a) serta Kontribusi Faktor Pertumbuhan M2 di Indonesia (b)



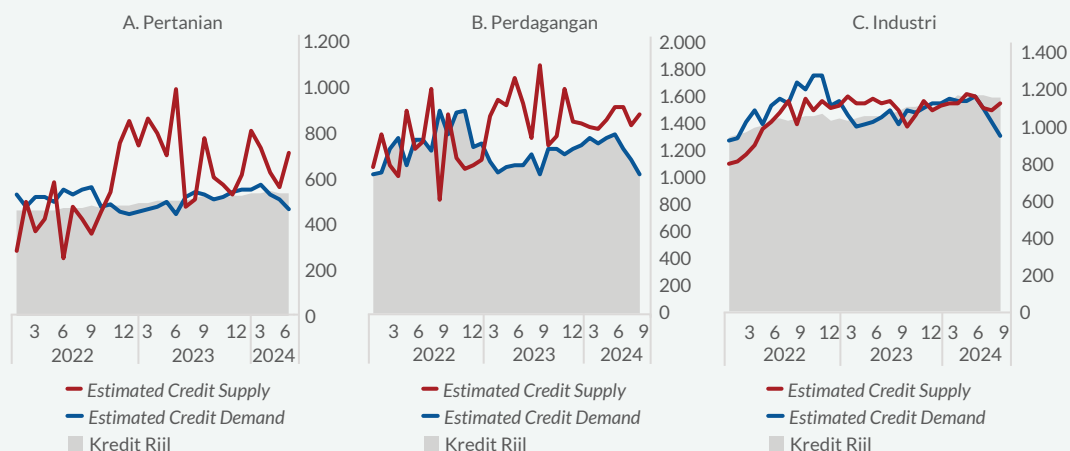
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.2. Hasil Simulasi Model *Equilibrium Directional* (a) dan *Deterministic* (b)

relatif lebih rendah pada ketiga sektor tersebut. Meski demikian, sektor-sektor tersebut masih memiliki prospek peningkatan kredit ke depan, sebagaimana ditunjukkan dengan alokasi *undisbursed loan committed* yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Ke depan, sustainability pertumbuhan kredit ditopang oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan dapat ditingkatkan dengan upaya pendalaman sektor keuangan di Indonesia. Gejala *demand constraint* yang terjadi pada pasar

kredit di Indonesia terindikasi disebabkan oleh pertumbuhan PDB yang melambat sejak tahun 2023, baik PDB secara keseluruhan maupun PDB sektoral. Rendahnya efisiensi investasi nasional, sebagaimana terlihat dari tingginya rasio ICOR, juga dapat memperlambat peningkatan kapasitas produksi domestik. Oleh karena itu, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat memengaruhi perkembangan likuiditas domestik yang kemudian dapat meningkatkan sustainability pertumbuhan kredit ke depan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.3. Hasil Estimasi Disekuilibrium Kredit untuk Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri



BANK INDONESIA

Bab 3

KETAHANAN SISTEM KEUANGAN MENDUKUNG KINERJA INTERMEDIASI

Ketahanan sisi permintaan pembiayaan pada 2024 terjaga, didukung oleh tetap baiknya kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga, di tengah peningkatan risiko kredit rumah tangga. Kemampuan bayar korporasi tetap terjaga dengan rasio utang berisiko (DaR) yang tetap terkendali. Profitabilitas korporasi yang masih tumbuh positif, likuiditas yang memadai, serta PD yang rendah menunjukkan ketahanan korporasi yang masih solid. Namun, pemberlakuan kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat diperkirakan dapat berdampak negatif pada kinerja korporasi Indonesia melalui jalur perdagangan dan harga komoditas. Sementara itu, penghasilan rumah tangga menunjukkan perbaikan, terutama pada kelas atas dan menengah. Di tengah relatif terjaganya kemampuan bayar rumah tangga, terjadi peningkatan risiko kredit terutama pada kelas menengah dan bawah yang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.

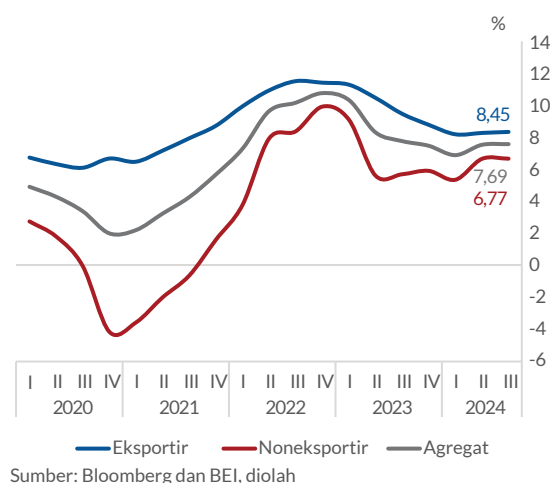
Ketahanan sisi penawaran pembiayaan juga masih solid, didukung likuiditas yang memadai, profitabilitas yang terjaga dan permodalan yang kuat. Risiko kredit

perbankan masih terjaga, tecermin dari NPL dan LaR yang menurun. Risiko pasar juga terjaga, seiring kepemilikan SBN yang menurun dan eksposur valas yang terbatas. Likuiditas perbankan tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan kredit seiring dengan rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan panjang yang berada di atas batasan minimum yang ditetapkan otoritas. Di tengah moderasi NIM, profitabilitas perbankan tetap terjaga didukung oleh diversifikasi pendapatan bank dan perbaikan kualitas kredit (koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN). Kendati demikian, perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pembentukan CKPN, serta menjaga tingkat permodalan yang mampu mendukung ketahanan sektor keuangan. Risiko kredit dari PP dan fintech lending juga tetap terjaga meskipun sedikit meningkat. Risiko interkoneksi antara IKNB dan perbankan juga masih terbatas karena eksposur yang rendah. Sementara itu, risiko kepemilikan ULN pada perbankan dan korporasi relatif terjaga, didukung oleh kecukupan likuiditas, serta tingginya dominasi loan agreement dan tenor jangka panjang dalam komposisi ULN.

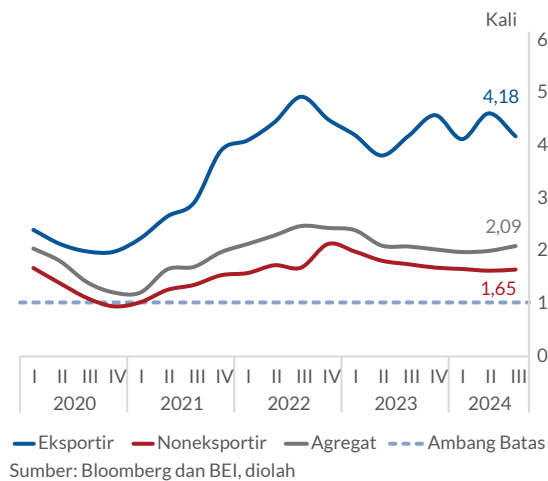
3.1 Risiko dan Kemampuan Bayar Korporasi Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah dinamika geopolitik global, kinerja korporasi meningkat terbatas, mendukung kenaikan penjualan dan margin laba (*profit margin*). *Profit margin* korporasi tercatat sebesar 7,69% pada triwulan III 2024, meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 7,64%. Beberapa sektor utama dengan kenaikan *profit margin*, tertinggi yaitu sektor Pertambangan, Konstruksi, dan Pengangkutan. Selain itu, korporasi dengan orientasi ekspor cenderung memiliki *profit margin* yang lebih tinggi dibandingkan agregat (Grafik 3.1.1). Peningkatan tersebut salah satunya didukung oleh membaiknya harga komoditas.

Kemampuan bayar korporasi tetap terjaga dengan rasio utang berisiko yang terkendali, di tengah nilai tukar yang cenderung terdepresiasi dan harga komoditas yang tumbuh positif. Kemampuan bayar korporasi terjaga sebagaimana tecermin dari rasio ICR agregat sebesar 2,09 pada triwulan III 2024 yang meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 2,08 (Grafik 3.1.2). Berdasarkan orientasi penjualan, ICR korporasi eksportir dan noneksportir juga masih terjaga di atas ambang batas aman, masing-masing sebesar 4,18 dan 1,65 pada triwulan III 2024. Hal ini didorong utamanya oleh kenaikan harga jual *Crude Palm Oil* (CPO), yang tecermin dari peningkatan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI)



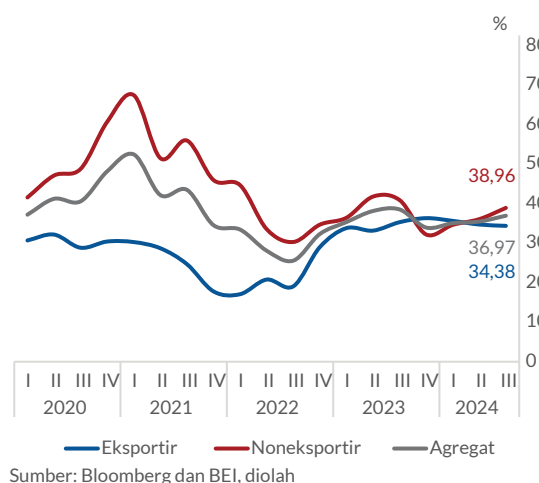
Grafik 3.1.1. Perkembangan Net Profit Margin



Grafik 3.1.2. Perkembangan Interest Coverage Ratio

CPO sepanjang 2024. Rasio utang berisiko (*DaR*) juga masih terjaga, namun perlu diwaspadai karena dalam tren meningkat (Grafik 3.1.3). Peningkatan ini sejalan dengan pendapatan korporasi yang terbatas di tengah kondisi nilai tukar yang cenderung terdepresiasi.

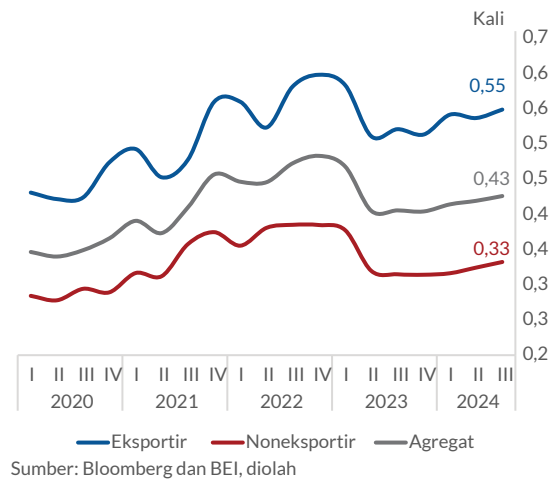
Kecukupan likuiditas korporasi mendukung terdaganya kemampuan bayar. Likuiditas korporasi secara agregat meningkat, tecermin dari kenaikan *current ratio* dan *cash ratio* pada triwulan III 2024 berturut-turut sebesar 1,46 kali dan 0,43 kali, lebih



Grafik 3.1.3. Perkembangan Debt at Risk

tinggi dibandingkan dengan akhir 2023 (Grafik 3.1.4 dan Grafik 3.1.5). Peningkatan likuiditas korporasi didukung oleh meningkatnya penjualan.

Rendahnya PD korporasi pada akhir 2024 menunjukkan ketahanan korporasi yang masih terjaga. Secara umum, PD korporasi terjaga karena PD *fundamental*⁸ dan PD *market signal*⁹ agregat korporasi pada akhir 2024 berada di bawah rata-rata historisnya (periode 2008 - 2024). PD *fundamental* tercatat sebesar 3,18%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis sebesar 4,59%. Sementara, PD *market signal* tercatat sebesar 4,48%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis sebesar 5,71% (Grafik 3.1.6). Selain itu, kedua indikator PD juga menunjukkan tren

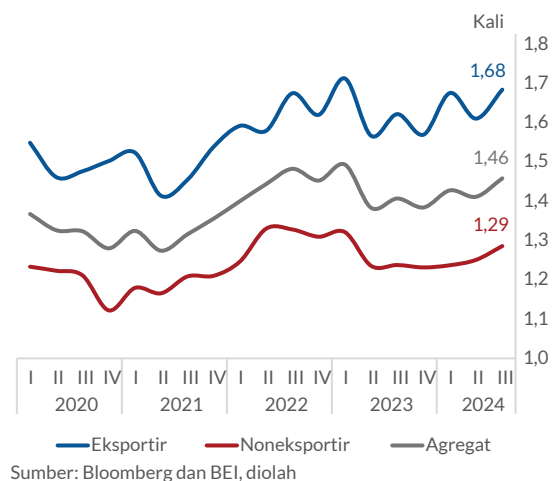


Grafik 3.1.5. Perkembangan Cash Ratio

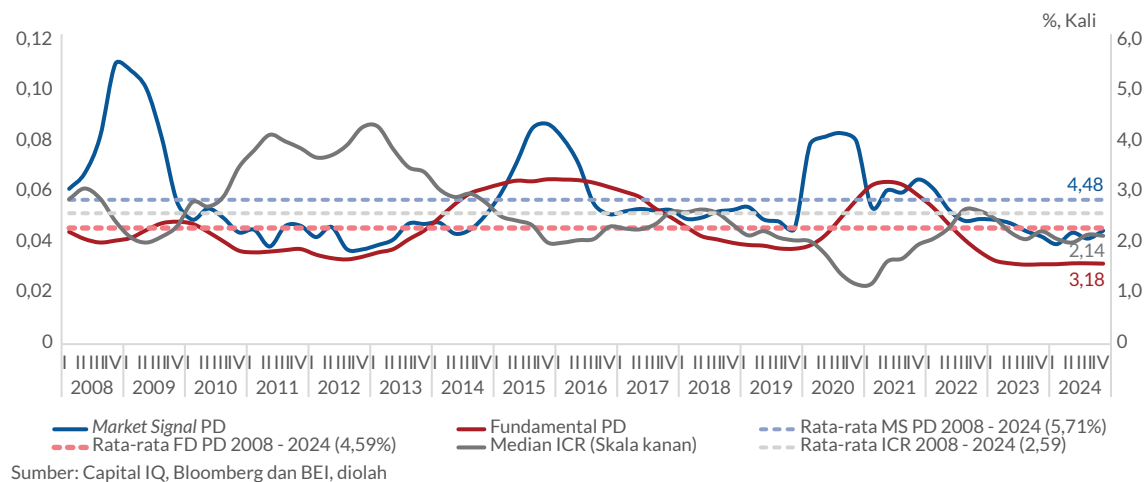
penurunan sejak periode pascapandemi. Rendahnya risiko *default* korporasi mendukung ekspansi usaha yang selanjutnya dapat meningkatkan permintaan pembiayaan korporasi.

Penerapan kebijakan proteksi perdagangan AS berpotensi memengaruhi kinerja korporasi Indonesia melalui jalur perdagangan (*trade channel*) dan jalur harga komoditas (*commodity channel*). Proteksi perdagangan menekankan pada kebijakan penetapan tarif tinggi dan renegotiasi perjanjian dagang dengan negara mitra. Kebijakan ini memengaruhi ekspor dan impor, menciptakan ketidakpastian pasar, serta berpotensi merugikan sektor-sektor yang bergantung pada rantai pasokan global. Dari jalur perdagangan, proteksi perdagangan AS dapat memengaruhi kinerja korporasi Indonesia melalui dampaknya pada terbukanya peluang pasar ekspor yang lebih luas ke AS untuk menggantikan Tiongkok yang akan terkena tarif ekspor lebih tinggi. Selain itu, melalui dampaknya

- 8 PD *fundamental* merupakan PD korporasi berdasarkan indikator laporan keuangan
- 9 PD *market signal* merupakan PD korporasi berdasarkan indikator pasar



Grafik 3.1.4. Perkembangan Current Ratio

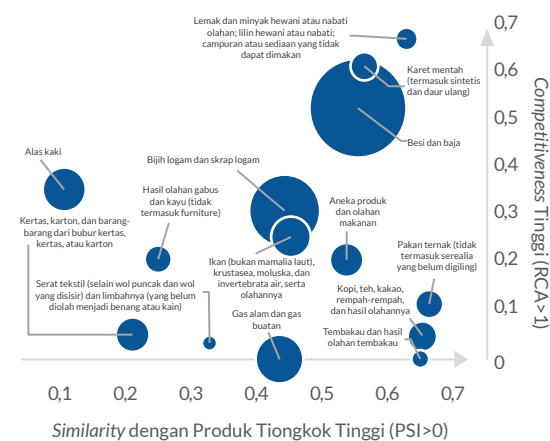


Grafik 3.1.6. ICR, PD Market Signal dan PD Fundamental Korporasi

pada potensi realokasi produk ekspor Tiongkok ke pasar internasional selain AS. Selanjutnya, kebijakan ini juga berpotensi memiliki *second round effect* melalui jalur harga komoditas, yaitu adanya potensi perlambatan permintaan beberapa komoditas energi seperti batubara sebagai akibat dari perlambatan ekonomi Tiongkok.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perluasan pasar ekspor Indonesia di AS berpotensi meningkatkan kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi. Berdasarkan analisis *Product Similarity Index* (PSI)¹⁰ dan *Revealed Comparative Advantage* (RCA)¹¹ produk Indonesia dan Tiongkok (Grafik 3.1.7), Indonesia memiliki setidaknya 14 produk ekspor dengan keunggulan dan berpotensi menggantikan produk Tiongkok di pasar AS. Beberapa di antaranya adalah komoditas alas kaki, gas alam, tembakau, perikanan, dan hasil olahan kayu. Meningkatnya pangsa ekspor Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekspor dan penjualan korporasi sehingga meningkatkan kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi. Hasil simulasi¹² menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kenaikan penjualan korporasi diperkirakan sebesar 0,1%.

Realokasi produk ekspor Tiongkok di pasar internasional akibat pembatasan ekspor ke AS berdampak terbatas pada ketahanan korporasi. Pembatasan ekspor Tiongkok ke AS berpotensi



Grafik 3.1.7. Persebaran Produk berdasarkan Kesamaan dan Keunggulan terhadap Produk Tiongkok

mendorong terjadinya *oversupply* dan menjadi pesaing produk ekspor korporasi Indonesia yang sejenis di pasar internasional. Beberapa produk ekspor utama Tiongkok ke AS yang memiliki kemiripan dengan Indonesia, antara lain bahan kimia organik, logam *non-ferrous*, serta sereal dan olahan. Namun, hasil simulasi¹³ menunjukkan realokasi tersebut berdampak terbatas bagi ketahanan korporasi dengan ekspor sejenis, sebagaimana tecermin dari ICR dan DaR pada Grafik 3.1.8.

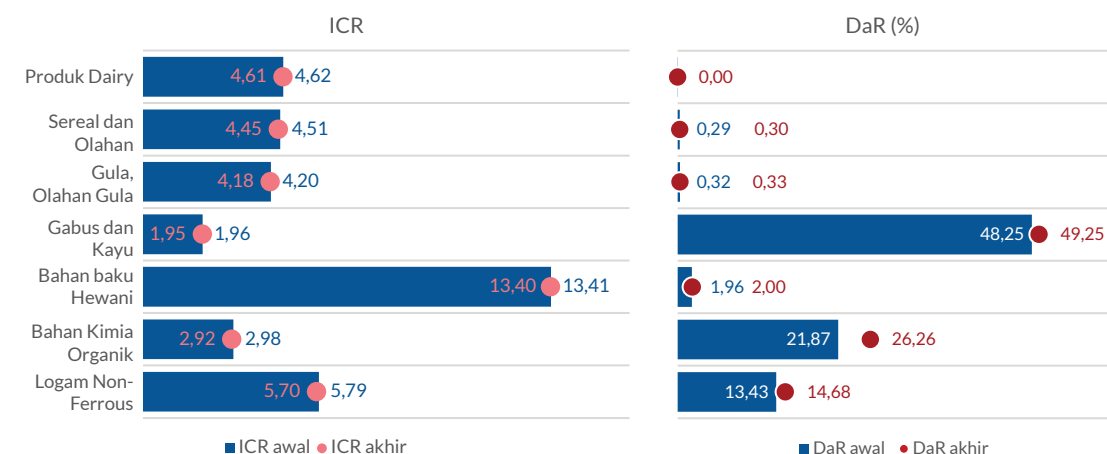
Dampak melalui jalur harga komoditas terhadap ketahanan dan risiko kredit korporasi juga diperkirakan relatif terbatas. Berdasarkan analisis historis terhadap dampak kebijakan proteksi perdagangan AS pada periode 2018 sampai dengan

10 Indeks PSI adalah indeks yang menunjukkan derajat kesamaan produk di antara dua negara.

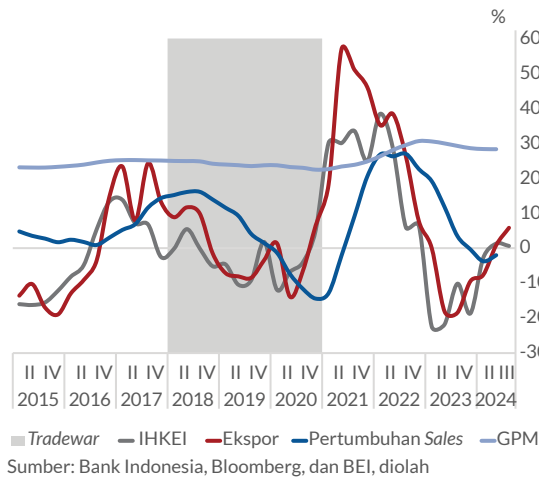
11 Indeks RCA adalah indeks yang menunjukkan keunggulan produk di antara dua negara.

12 Simulasi peningkatan penjualan dilakukan pada sektor yang berpotensi menggantikan produk Tiongkok di pasar AS.

13 Simulasi dilakukan pada sektor dengan produk yang sama dengan produk ekspor utama Tiongkok ke AS.

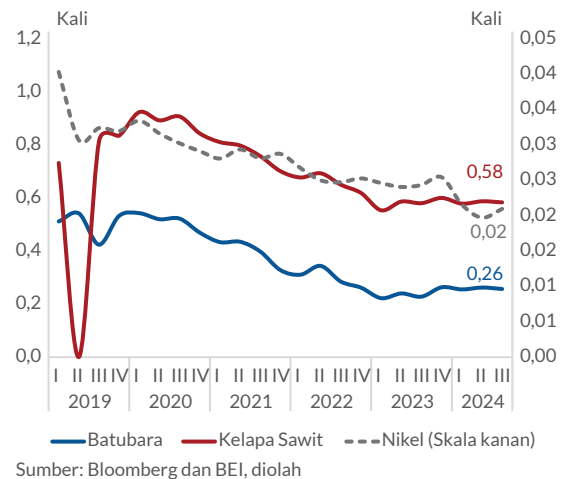


Grafik 3.1.8. Dampak Terbatas Oversupply Produk Tiongkok terhadap Ketahanan Korporasi

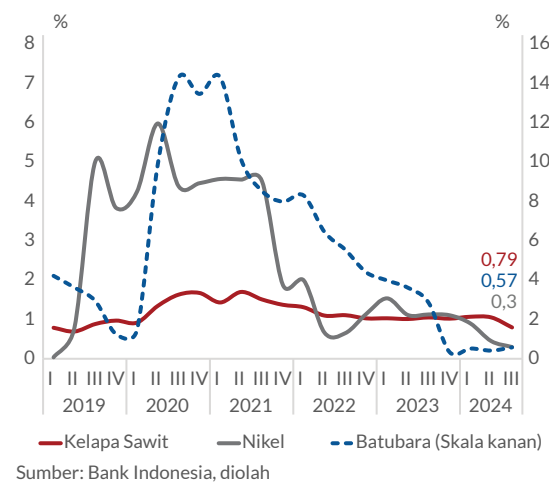


Grafik 3.1.9. Kinerja Korporasi Agregat

2020, penjualan korporasi khususnya komoditas seperti batubara, nikel, dan CPO cenderung menurun sebagai akibat penurunan harga. Namun demikian, *profit margin* masih relatif terjaga (Grafik 3.1.9). Ke depan, beberapa *downside risk* bagi ketahanan korporasi yang perlu diwaspadai adalah melambatnya produksi batubara akibat penurunan permintaan mitra dagang, serta melambatnya produksi CPO seiring berlanjutnya dampak dari El Nino. Risiko kredit korporasi komoditas diperkirakan relatif tetap terjaga karena cenderung menggunakan dana internal, yang ditunjukkan oleh tren *Debt to Equity Ratio* (DER) yang menurun (Grafik 3.1.10), dan NPL yang rendah pada triwulan III 2024 (Grafik 3.1.11).



Grafik 3.1.10. Perkembangan DER Korporasi Berbasis Komoditas



Grafik 3.1.11. Perkembangan NPL Korporasi Berbasis Komoditas

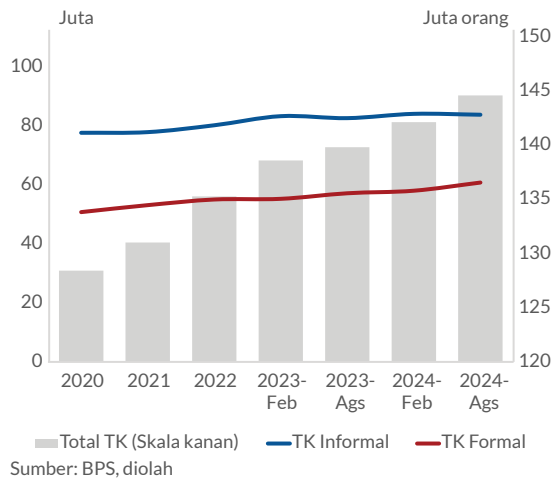
3.2

Risiko dan Kemampuan Bayar Rumah Tangga Terjaga

Dinamika pertumbuhan tenaga kerja (TK) formal dan informal memengaruhi penghasilan RT. TK mengalami peningkatan sebesar 3,43% pada semester II 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan semester II 2023 sebesar 3,36% (Grafik 3.2.1). Pertumbuhan TK terutama didorong oleh sektor formal yang pangsaanya meningkat dari 40,89% pada semester II 2023 menjadi 42,05% pada semester II 2024, sementara sektor informal mengalami penurunan pangsa menjadi 57,96% pada 2024 dari total TK. Namun demikian, pangsa TK formal Indonesia belum kembali kepada level prapandemi, yaitu sebesar 44%. Selain itu, TK informal memiliki tingkat upah yang lebih rendah

dengan tren kenaikan upah yang cenderung lebih terbatas dibandingkan kenaikan upah pada TK formal (Grafik 3.2.2). Dinamika TK formal dan informal pada sektor *labor intensive* dalam hubungannya dengan ketahanan rumah tangga akan dibahas lebih lanjut pada boks 3.1.

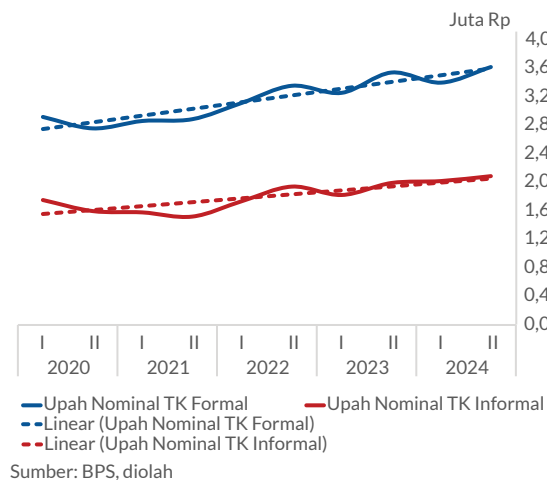
Penghasilan RT menunjukkan perbaikan, meskipun terdapat perbedaan tren pemulihan antar kelas penghasilan. Indeks penghasilan RT meningkat menjadi 121,24 pada akhir 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 115,74. Berdasarkan kelas penghasilannya, indeks penghasilan RT kelas



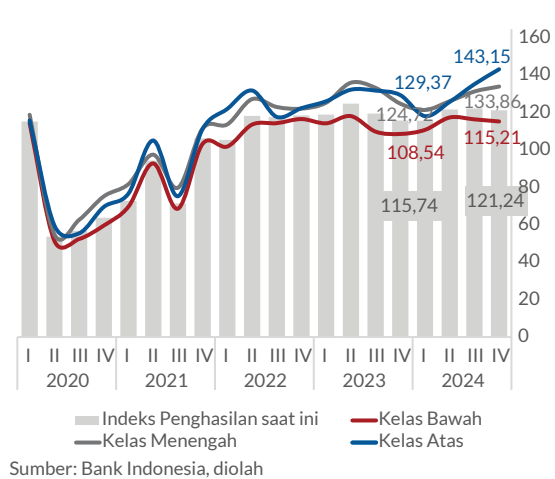
Grafik 3.2.1. Perkembangan TK Formal dan Informal

atas dan menengah telah meningkat dibandingkan dengan periode prapandemi, namun indeks penghasilan kelas bawah masih lebih rendah (Grafik 3.2.3). Pemulihan upah yang cenderung terbatas pada kelas bawah terutama disebabkan oleh struktur TK di Indonesia yang masih didominasi oleh TK informal dan realisasi anggaran bantuan sosial yang cenderung menurun setiap tahunnya pada periode pascapandemi (Grafik 3.2.4).

Penghasilan yang membaik mendukung terjaganya kemampuan bayar, namun risiko kredit RT cenderung mengalami peningkatan. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit, risiko kredit RT pada akhir 2024 tetap terjaga meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan 2023 (Grafik 3.2.5). Rasio NPL RT tercatat sebesar 2,02% pada akhir 2024, meningkat dibandingkan dengan 2023 sebesar 1,80%.



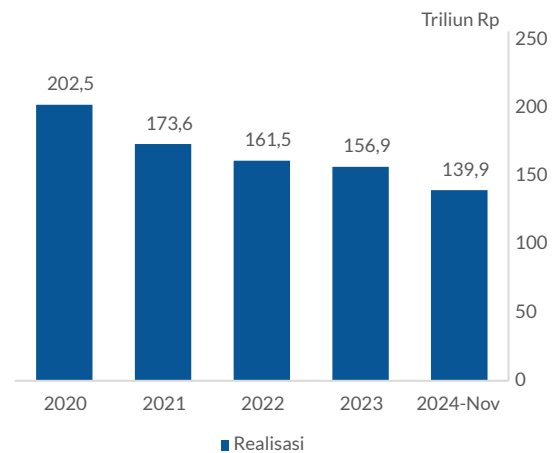
Grafik 3.2.2. Perkembangan Upah TK Formal dan Informal



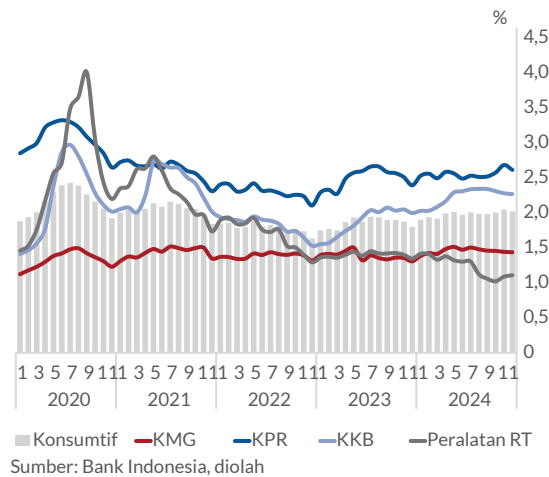
Grafik 3.2.3. Perkembangan Indeks Penghasilan RT

Berdasarkan jenisnya, KPR memiliki NPL tertinggi sebesar 2,61%, diikuti KKB sebesar 2,26%, dan Kredit Multiguna (KMG) sebesar 1,43% pada akhir 2024.

Segmen RT kelas atas mengalami penurunan risiko kredit. NPL pada segmen RT kelas atas menurun menjadi sebesar 2,19% pada akhir 2024 dibandingkan dengan 2,24% pada akhir 2023 (Grafik 3.2.6). Penurunan risiko kredit terutama terjadi pada kredit jenis KPR, tecermin dari NPL KPR yang mengalami penurunan menjadi sebesar 2,60% pada akhir tahun 2024 dibandingkan dengan 2,70% pada akhir tahun 2023. Sejalan dengan penurunan NPL, DSR segmen RT kelas atas juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28,28% pada akhir 2024 dibandingkan dengan 28,20% pada akhir 2023 (Grafik 3.2.7). Penurunan NPL dan peningkatan DSR pada segmen RT kelas atas mencerminkan kondisi keuangan yang lebih kuat dan



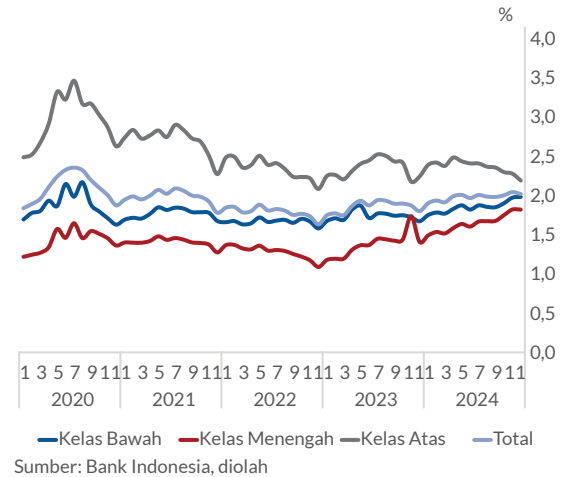
Grafik 3.2.4. Perkembangan Realisasi Bantuan Sosial



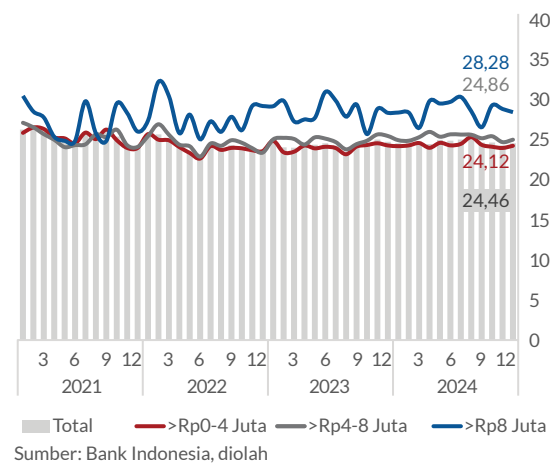
Grafik 3.2.5. Perkembangan NPL RT

stabil dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, serta memiliki kemampuan diversifikasi sumber pendapatan melalui pengelolaan aset keuangan.

Sementara itu, segmen RT kelas menengah dan bawah yang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi mengalami peningkatan risiko kredit. NPL RT tangga kelas menengah dan bawah masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,82% dan 1,98% pada akhir 2024 dibandingkan dengan 1,40% dan 1,67% pada akhir tahun 2023. Peningkatan risiko kredit dikontribusikan oleh NPL dari KPR pada RT kelas menengah dan bawah yang masing-masing meningkat menjadi sebesar 1,82% dan 1,98% di akhir 2024, dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 1,40% dan 1,67%. Sejalan dengan peningkatan NPL, DSR kelas menengah dan bawah masing-masing mengalami penurunan menjadi sebesar 24,86% dan 24,12% pada akhir tahun 2024 dibandingkan dengan 25,32% dan 24,16% pada akhir tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan kemampuan RT kelas bawah dan menengah untuk mendapatkan fasilitas kredit baru maupun memenuhi kewajiban yang telah dimiliki.



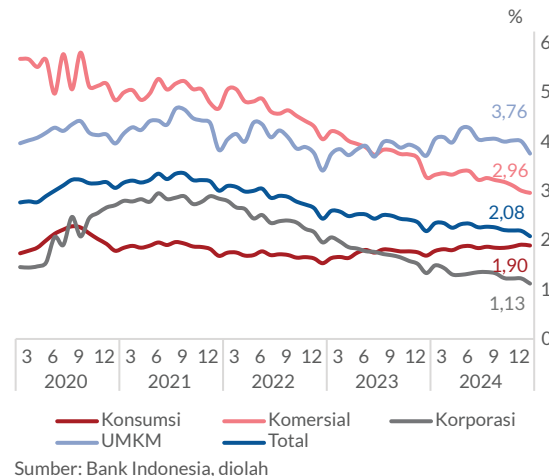
Grafik 3.2.6. Perkembangan NPL RT per Kelas Pendapatan



Grafik 3.2.7. Perkembangan DSR RT

3.3 Ketahanan Industri Perbankan dan IKNB Mendukung Intermediasi

Risiko kredit perbankan terjaga, meskipun terjadi peningkatan risiko kredit pada segmen UMKM. NPL perbankan terjaga rendah di bawah ambang batas sebesar 5%. Pada Desember 2024, NPL tercatat sebesar 2,08%, lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 2,19% (Grafik 3.3.1). Penurunan NPL terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali pada sektor Pertanian dan Perdagangan yang mayoritas didominasi oleh UMKM (Tabel 3.3.1). Berdasarkan segmen debitur, penurunan NPL terutama dikonstruksikan oleh segmen korporasi yang menurun menjadi sebesar 1,13% pada akhir 2024 dari 1,34% pada akhir 2023. Sementara itu, segmen UMKM mengalami peningkatan NPL tertinggi pada akhir 2024 menjadi sebesar 3,76% dari sebelumnya 3,71% pada Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian kualitas kredit UMKM setelah berakhirnya relaksasi restrukturisasi Covid-19.



Grafik 3.3.1. Perkembangan NPL (bruto) Berdasarkan Segmen

Tabel 3.3.1. Perkembangan NPL per Sektor Ekonomi

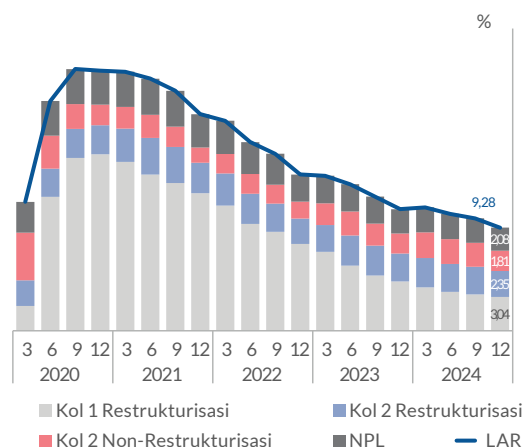
Sektor Ekonomi	NPL (Triliun Rp)		Kredit (Triliun Rp)		NPL (%)		Δ Des-24 & Des-23		
	Des-23	Des-24	Des-23	Des-24	Des-23	Des-24	Nominal NPL	Nominal Kredit	Rasio NPL
A. Pertanian	10,37	11,07	518,46	543,57	2,00	2,04	0,70	25,11	0,04
B. Pertambangan	3,56	4,09	290,47	373,51	1,23	1,10	0,53	83,04	-0,13
C. Industri Pengolahan	36,38	35,97	1117,34	1224,14	3,26	2,94	-0,41	106,80	-0,32
D. Listrik Gas Air	0,66	0,52	183,96	220,29	0,36	0,24	-0,14	36,33	-0,12
E. Konstruksi	14,28	11,74	395,10	395,18	3,62	2,97	-2,54	0,08	-0,64
F. Perdagangan	41,10	42,95	1269,95	1324,21	3,24	3,24	1,85	54,26	0,01
G. Pengangkutan	3,77	4,24	373,42	444,98	1,01	0,95	0,46	71,56	-0,06
H. Jasa Dunia Usaha	8,22	8,10	725,74	820,73	1,13	0,99	-0,12	94,99	-0,15
I. Jasa Sosial	3,93	3,68	282,16	341,83	1,39	1,08	-0,25	59,67	-0,32
J. Lain - lain	32,69	40,54	1933,66	2138,73	1,69	1,90	7,85	205,07	0,20
Total	154,98	162,91	7090,24	7827,15	2,19	2,08	7,93	736,90	-0,10

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Risiko kredit yang terjaga juga tecermin dari penurunan LaR. Rasio LaR tercatat sebesar 9,28% pada akhir 2024, terendah dalam lima tahun terakhir dan telah mendekati level prapandemi, yaitu sebesar 9,93% pada 2019 (Grafik 3.3.2). Tren perbaikan LaR didorong oleh berkurangnya kredit yang direstrukturisasi pada semua segmen usaha (Grafik 3.3.3). Hal ini sejalan dengan membaiknya kemampuan bayar debitur yang mengikuti program kredit restrukturisasi.

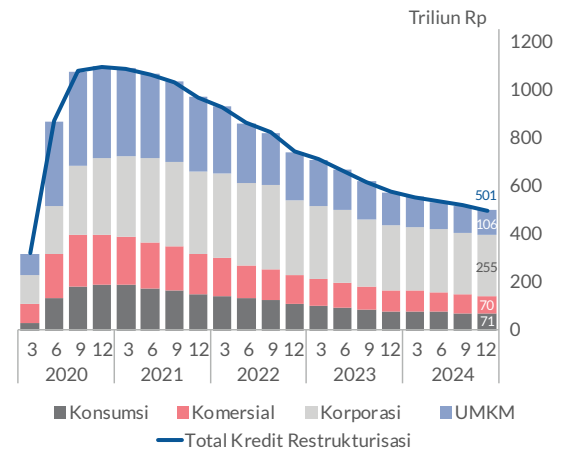
Sementara itu, risiko pasar akibat penurunan suku bunga dan nilai tukar relatif terbatas, seiring dengan kepemilikan SBN yang menurun dan posisi liabilitas valas yang terbatas. Risiko reinvestasi dan perubahan harga wajar akibat penurunan suku bunga tergolong terbatas seiring dengan kepemilikan SBN yang semakin menurun pada perbankan (Grafik 3.3.4). Risiko pasar perbankan dari pelemahan nilai tukar juga relatif terbatas karena eksposur yang minim dan berada pada *long position*¹⁴. Kondisi tecermin pada rasio Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap modal perbankan yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 1,41% pada Desember 2024.

Likuiditas perbankan masih memadai untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan kredit. Sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit, rasio AL/DPK mengalami penurunan, terutama pada KBMI 4 sebagai penopang pertumbuhan kredit (*growth driver*). Rasio AL/DPK tercatat sebesar 25,59% pada Desember 2024, menurun dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 28,73%. Namun demikian, rasio AL/DPK masih berada di atas ambang batas 10% dan di atas rata-rata AL/DPK prapandemi, yaitu sebesar 20,66% (Grafik 3.3.5).



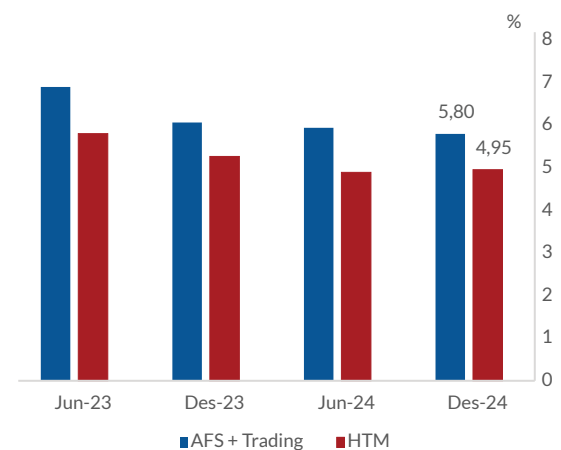
Grafik 3.3.2. Perkembangan Komposisi Loan at Risk (LaR) Perbankan

¹⁴ Long PDN merupakan posisi dimana perbankan memiliki aset valas yang lebih tinggi dari liabilitas valas.

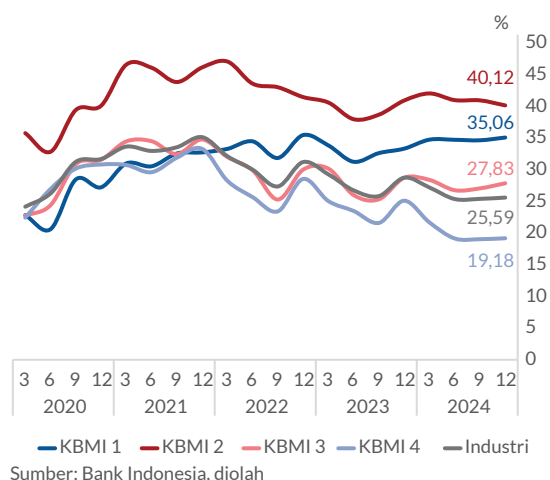


Grafik 3.3.3. Perkembangan Kredit Restrukturisasi Perbankan Berdasarkan Segmen

Ketahanan likuiditas perbankan tecermin pada rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang yang masih di atas ambang batas yang diwajibkan otoritas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan pada September 2024 tercatat sebesar 239,29%, meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 220,18%. Selain itu, rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) juga masih relatif tinggi meskipun mengalami penurunan terbatas dari 131,40% pada Desember 2023 menjadi 129,50% pada September 2024. Kedua rasio likuiditas tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan otoritas, yaitu sebesar 100% (Grafik 3.3.6). Hal ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam mengelola pemenuhan kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.

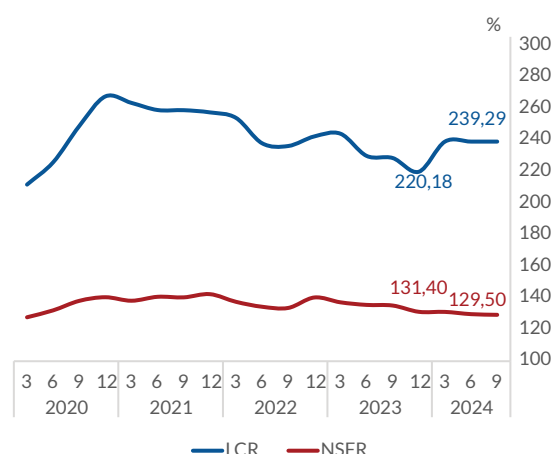


Grafik 3.3.4. Kepemilikan SBN Pada Perbankan

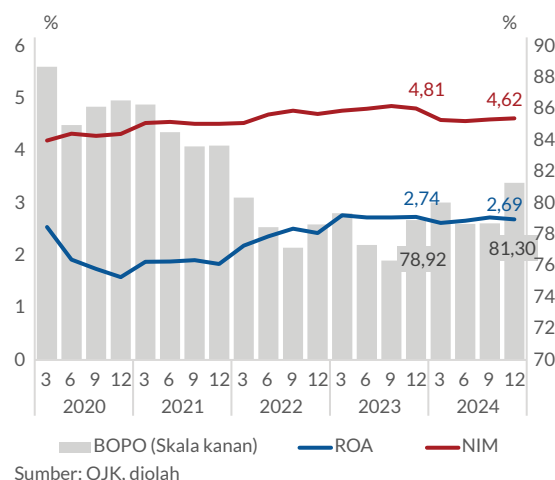


Grafik 3.3.5. AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank

Di tengah termoderasinya NIM perbankan, profitabilitas perbankan tetap terjaga, didukung oleh diversifikasi pendapatan, koreksi CKPN, dan efisiensi operasional. Rasio *Return on Asset* (ROA) perbankan sedikit menurun sejak akhir 2023 hingga akhir 2024, ke level 2,69%. Penurunan rasio ROA lebih terbatas di tengah penurunan NIM yang lebih dalam karena adanya pendapatan dari *fee-based income*, pendapatan bunga dari surat berharga, serta adanya koreksi CKPN. Rasio NIM menurun menjadi sebesar 4,60% pada September 2024 dari sebelumnya 4,81% pada akhir 2023 (Grafik 3.3.7) sejalan dengan tekanan *spread* suku bunga. Sementara itu, pendapatan *fee-based income* dan pendapatan bunga dari surat berharga masing-masing meningkat menjadi 10,53% dan 48,80% pada September 2024 dibandingkan dengan akhir 2023. Pendapatan dari koreksi CKPN juga relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 3.3.8).



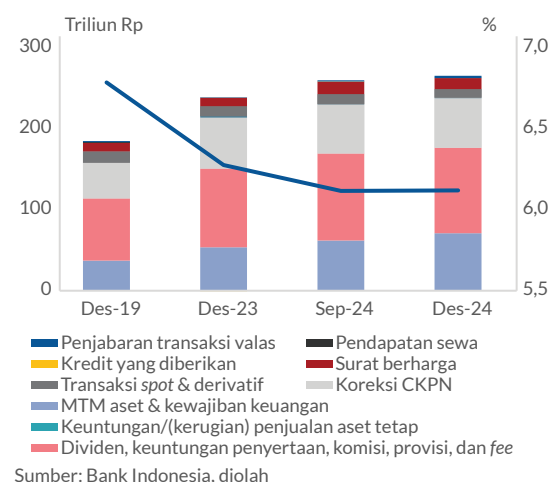
Grafik 3.3.6. Perkembangan LCR dan NSFR



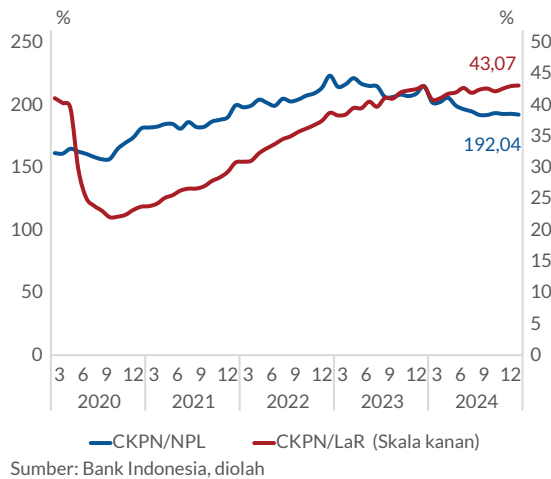
Grafik 3.3.7. ROA, NIM, dan BOPO Perbankan

Di tengah perbaikan kualitas kredit, perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pembentukan CKPN untuk mengantisipasi risiko ke depan. Rasio CKPN terhadap NPL dalam tren yang menurun, sejalan dengan menurunnya risiko kredit. Namun, perbankan masih memiliki akumulasi CKPN yang relatif tinggi, tecermin dari rasio CKPN terhadap NPL sebesar 192,04% dan rasio CKPN terhadap LaR sebesar 43,07% pada akhir 2024 (Grafik 3.3.9). Tren penurunan rasio CKPN terhadap NPL mengindikasikan optimisme perbankan terhadap perbaikan kualitas kredit ke depannya, meski tetap berhati-hati dengan menjaga cadangan kerugian pada level yang masih relatif tinggi.

Selain itu, tingkat permodalan yang relatif tinggi turut mendukung ketahanan perbankan. Rasio permodalan tecermin dari CAR perbankan yang



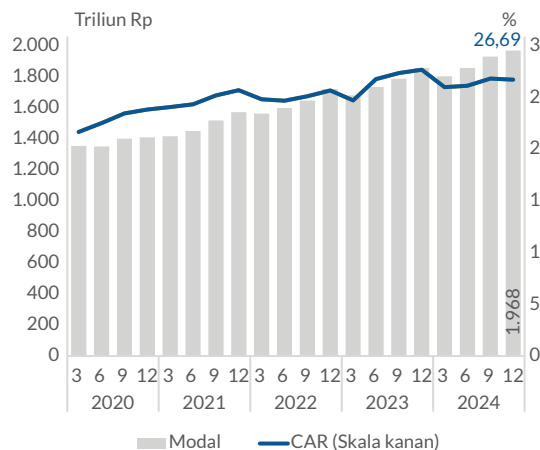
Grafik 3.3.8. Perkembangan Pendapatan Bersih Nonbunga Bank (Disetahunkan)



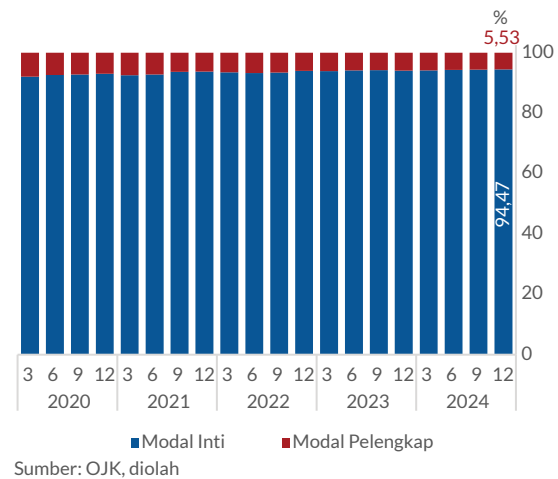
Grafik 3.3.9. Perkembangan Coverage CKPN terhadap Risiko Kredit

terindikasi kuat, yaitu sebesar 26,69% pada Desember 2024 (Grafik 3.3.10). Stabilitas permodalan bank juga ditunjukkan oleh tingginya persentase modal inti, yaitu sebesar 94,47% pada Desember 2024 (Grafik 3.3.11). Hal ini menunjukkan kemampuan permodalan bank yang lebih baik dalam menyerap kerugian jika terjadi materialisasi risiko kredit.

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Hasil *solvency stress test* menunjukkan tingkat NPL masih dibawah 5% dengan CAR diperkirakan masih diatas 20%. Tingkat permodalan perbankan yang tinggi diperkirakan mampu menahan dampak risiko kredit dan pasar sesuai skenario makroekonomi yang parah (*severe*), yaitu kenaikan inflasi yang signifikan, tekanan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar, termasuk dampak kebijakan proteksi perdagangan AS. Lebih lanjut, hasil *liquidity stress test* juga menunjukkan ketahanan likuiditas perbankan yang memadai,



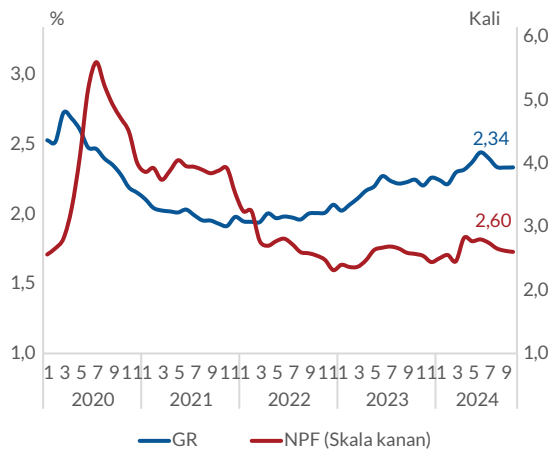
Grafik 3.3.10. Perkembangan Permodalan



Grafik 3.3.11. Perkembangan Komposisi Modal

tercermin dari nilai *counterbalancing capacity* industri, yaitu persediaan aset yang tidak sedang dibebani/ dipinjamkan atau sumber pendanaan lain yang tersedia serta dapat digunakan segera bagi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dalam skenario *stress test*, ketersediaan *counterbalancing capacity* industri perbankan terhadap total DPK diperkirakan masih berada pada kisaran 32% sampai dengan 41% sehingga dinilai masih cukup memadai dalam menghadapi potensi penarikan DPK serta penurunan *cash inflow* di tengah peningkatan risiko pasar dan risiko kredit.

Risiko kredit dari PP dan *fintech lending* tetap terjaga, namun sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Risiko kredit PP dan *fintech lending* pada Oktober 2024 masih terjaga pada kisaran yang rendah. Risiko kredit PP tecermin dari *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 2,60%, sementara risiko kredit *fintech lending* tecermin dari TWP 90 Agregat sebesar 2,37%. Namun, terdapat kenaikan risiko pembiayaan PP sebagaimana tecermin dari NPF yang lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 2,44% (Grafik 3.3.12). Demikian pula risiko kredit pada *fintech lending*, khususnya TWP 90 untuk golongan debitur badan usaha yang mencapai 9,40% pada Oktober 2024, meningkat dibandingkan dengan akhir 2023 sebesar 7,60%. Namun pangsa penyaluran dana *fintech lending* ke golongan debitur badan usaha relatif terbatas, yaitu hanya sebesar 8,07%, sementara penyaluran dana lebih banyak diberikan kepada golongan debitur perseorangan dengan TWP 90 sebesar 1,75% (Grafik 3.3.13). Dari sisi ketahanan permodalan, *Gearing Ratio* (GR) PP tercatat sebesar 2,34 kali, mengindikasikan tingkat permodalan yang memadai.



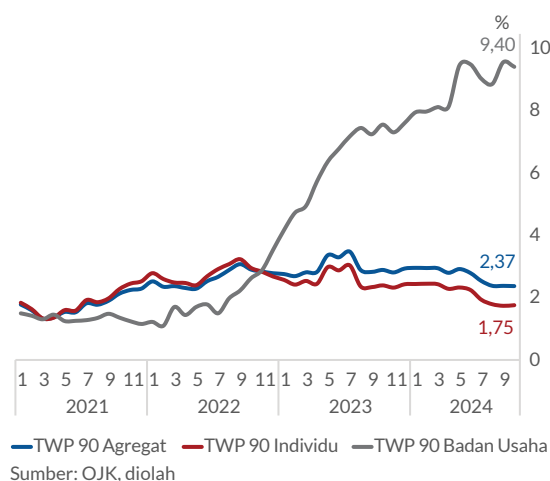
Grafik 3.3.12. NPF dan GR Perusahaan Pembiayaan



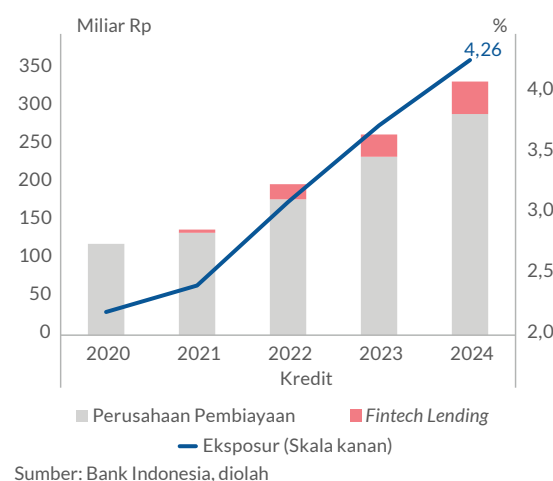
Grafik 3.3.14. Eksposur PP pada Total DPK Perbankan

Risiko interkoneksi antara IKNB dan perbankan pada akhir 2024 masih terbatas seiring eksposur yang rendah. Risiko interkoneksi bank dengan IKNB, khususnya PP dan *fintech lending*, timbul akibat penempatan dana oleh IKNB pada DPK bank dan/atau pemberian pembiayaan dari bank kepada IKNB. Risiko interkoneksi antara PP dan *fintech lending* ke perbankan melalui penempatan dana pada DPK masih terjaga karena eksposur yang sangat minim, yaitu berupa penempatan deposito oleh PP dengan pangsa hanya sebesar 0,53% terhadap total DPK (Grafik 3.3.14). Demikian pula dengan rendahnya risiko interkoneksi dari pendanaan PP dan *fintech lending* dari kredit perbankan sejalan dengan eksposur yang rendah sebesar 4,26% terhadap total kredit perbankan (Grafik 3.3.15).

Sementara itu, risiko operasional berupa risiko siber dan *fraud* relatif terjaga, didukung oleh penguatan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Pemanfaatan teknologi informasi pada industri keuangan berpotensi menimbulkan risiko siber dan *fraud* yang dapat menjadi ancaman terhadap SSK. Oleh karena itu, sesuai dengan mandat UU P2SK, Bank Indonesia mengatur dan memastikan ketahanan siber di sektor keuangan, khususnya pada SP melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengukuran tingkat maturitas ketahanan siber untuk menilai tingkat kesiapan PSP. Selengkapnya terkait ketahanan sistem keuangan dari risiko siber dan *fraud* dapat dilihat pada boks 3.2.



Grafik 3.3.13. Risiko Pembiayaan Fintech Lending

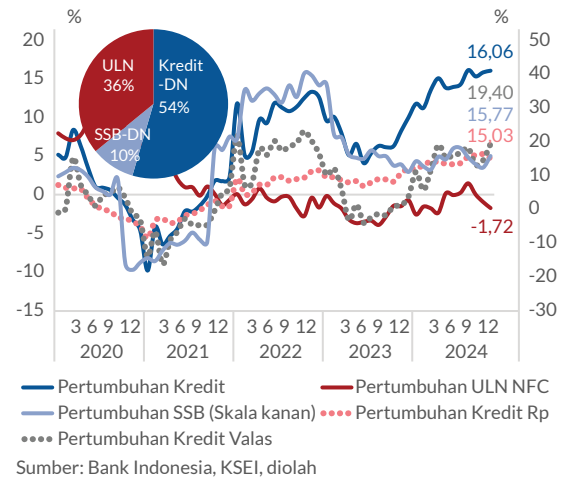


Grafik 3.3.15. Eksposur PP dan Fintech Lending pada Total Kredit Perbankan

3.4 Perkembangan Risiko ULN Korporasi dan Perbankan di Tengah Dinamika Suku Bunga dan Nilai Tukar

Pertumbuhan ULN korporasi dalam fase kontraksi akibat kenaikan tingkat suku bunga (*pricing*). Korporasi memanfaatkan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan selain kredit perbankan domestik dan penerbitan obligasi. Pertumbuhan ULN korporasi terkontraksi sebesar 1,7% dengan nominal USD156,36 miliar pada November 2024, lebih rendah dibandingkan kontraksi ULN pada November 2023 sebesar 1,5% dengan nominal USD159,09 miliar. Pertumbuhan ULN korporasi saat ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan dan obligasi (Grafik 3.4.1). Kontraksi pertumbuhan ULN korporasi dipengaruhi oleh *pricing* ULN yang cenderung meningkat sejalan dengan tren suku bunga global yang terjaga tinggi.

Dinamika suku bunga dan nilai tukar memengaruhi keputusan korporasi dalam memanfaatkan ULN sebagai sumber pembiayaan. Analisis historis menunjukkan ULN korporasi cenderung tumbuh positif pada periode suku bunga rendah, contohnya pada periode 2009 sampai dengan 2015. Pertumbuhan ULN tersebut juga dipengaruhi dinamika nilai tukar Rupiah, yaitu ULN cenderung meningkat pada periode apresiasi Rupiah (2010 - 2011) dan menurun pada periode depresiasi Rupiah (2012 - 2015) (Grafik 3.4.2). Pada 2024, pertumbuhan ULN korporasi terkontraksi yang dipengaruhi oleh tingginya suku bunga dan depresiasi nilai tukar. Dinamika perubahan makroekonomi, termasuk suku bunga dan nilai tukar,



Grafik 3.4.1. Pertumbuhan Pembiayaan UDN dan ULN serta Pangsa

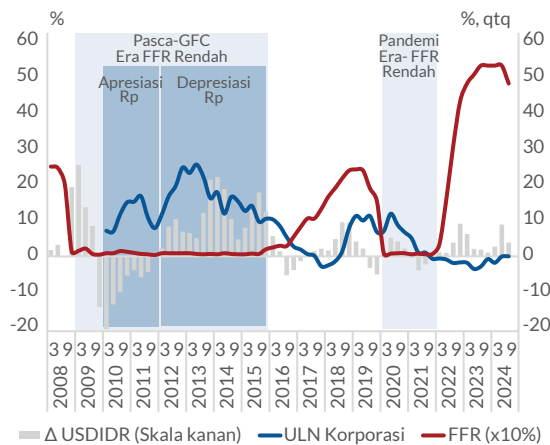
menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh korporasi dalam memanfaatkan ULN karena memengaruhi kinerja keuangan dan prospek usahanya.

Di tengah kontraksi pertumbuhan ULN korporasi, pertumbuhan ULN pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masih tercatat positif. Berdasarkan sektoral, *outstanding* ULN tertinggi dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan, LGA, dan Pertambangan dengan total pangsa mencapai lebih dari 70% (Tabel 3.4.1). Di tengah kontraksi pertumbuhan ULN korporasi, sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki pertumbuhan yang masih positif

Tabel 3.4.1. Perkembangan ULN Korporasi Sektoral

No	SEKTOR EKONOMI	ULN (USD miliar)		Porsi terhadap Total		Pertumbuhan ULN (yoy)		Kontribusi	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
		Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov
1	Pertanian	4,00	3,74	2,5%	2,4%	-13,0%	-6,4%	-0,3%	-0,2%
2	Pertambangan	33,23	31,04	20,9%	19,9%	-10,1%	-6,6%	-2,1%	-1,3%
3	Industri Pengolahan	44,58	48,08	28,0%	30,8%	11,0%	7,8%	3,1%	2,4%
4	LGA	38,18	36,97	24,0%	23,6%	-4,3%	-3,2%	-1,0%	-0,8%
5	Bangunan	1,23	1,22	0,8%	0,8%	-25,9%	-0,3%	-0,2%	0,0%
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,81	9,27	5,5%	5,9%	3,7%	5,3%	0,2%	0,3%
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	14,09	14,06	8,9%	9,0%	-1,9%	-0,3%	-0,2%	0,0%
8	Lainnya	14,97	11,98	9,4%	7,7%	-2,4%	-20,0%	-0,2%	-1,5%
TOTAL		159,09	156,36	100,0%	100,0%	-1,5%	-1,7%	-1,5%	-1,7%

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

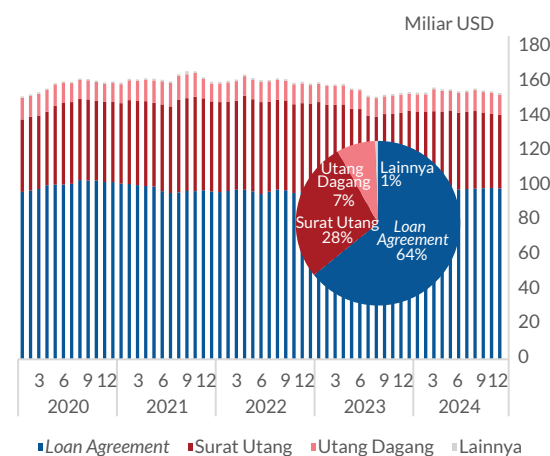


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4.2. Perkembangan ULN pada Periode Depresiasi & Suku Bunga Tinggi

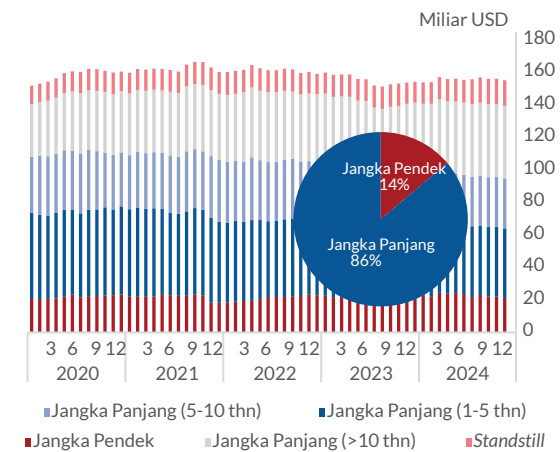
pada November 2024, masing-masing sebesar 7,8% dan 5,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspor yang relatif stabil, sehingga korporasi cenderung meningkatkan produksi serta memanfaatkan pembiayaan ULN.

Risiko ULN korporasi relatif terjaga karena didominasi oleh *loan agreement*, tenor jangka panjang dan suku bunga yang tetap. Komposisi ULN didominasi oleh *loan agreement* dengan pangsa mencapai 64% pada November 2024 (Grafik 3.4.3). Sementara berdasarkan tenor dan suku bunga, ULN korporasi didominasi tenor jangka panjang dengan suku bunga tetap (Grafik 3.4.4 dan Grafik 3.4.5). Berdasarkan pola historis tersebut, risiko ULN tetap terjaga seiring dengan mayoritas korporasi yang cenderung mengambil ULN bersifat jangka panjang dengan suku bunga tetap.



Sumber: Bank Indonesia, November 2024, diolah

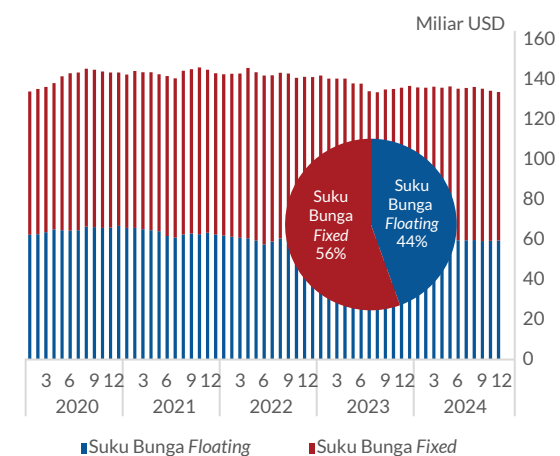
Grafik 3.4.3. Posisi Outstanding ULN Berdasarkan Jenis ULN



Sumber: Bank Indonesia, November 2024, diolah

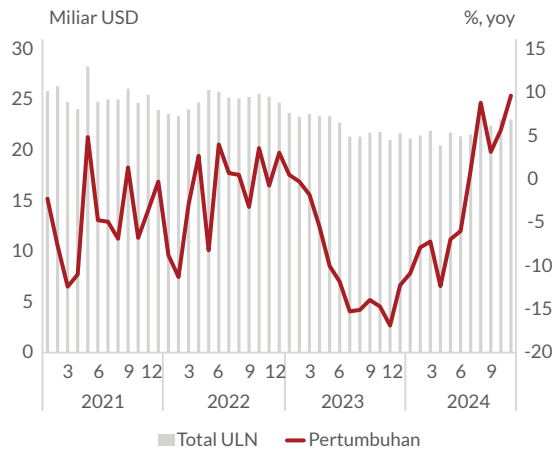
Grafik 3.4.4. Posisi Outstanding ULN Korporasi Berdasarkan Jatuh Tempo

Bank juga memanfaatkan ULN untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas dan pembiayaan valas. Meskipun sempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,32% menjadi USD22,69 miliar pada November 2023, ULN perbankan meningkat sebesar 1,60% pada November 2024 menjadi USD23,05 miliar (Grafik 3.4.6). Berdasarkan jenisnya, ULN perbankan didominasi oleh *loan agreement* sebesar 65,21%, sedangkan sisanya berupa obligasi dan lainnya sebesar 34,79% (Grafik 3.4.7). Sementara berdasarkan jatuh temponya, ULN perbankan didominasi jangka panjang sebesar 54,19% (Grafik 3.4.8). Preferensi ini menunjukkan orientasi perbankan terhadap stabilitas pendanaan, serta mitigasi risiko tekanan likuiditas dan fluktuasi nilai tukar.



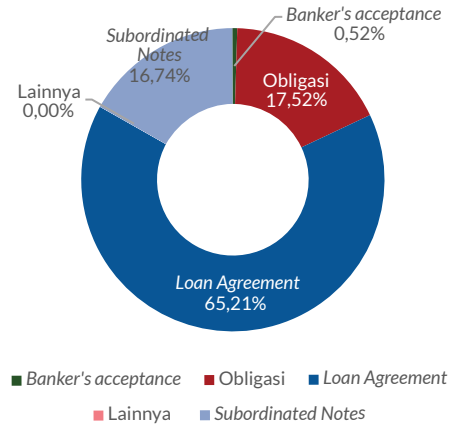
Sumber: Bank Indonesia, November 2024, diolah

Grafik 3.4.5. Posisi Outstanding ULN Berdasarkan Suku Bunga

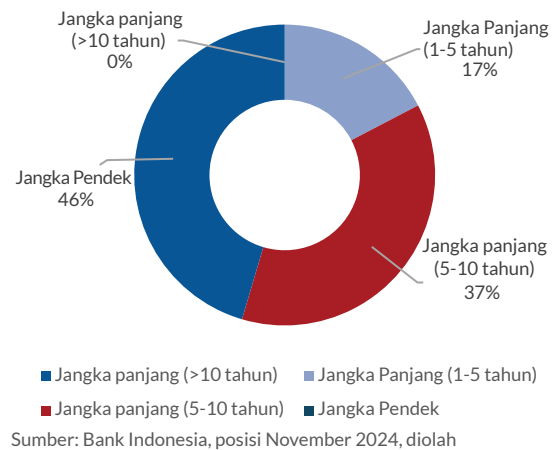


Grafik 3.4.6. Perkembangan Outstanding ULN Bank

Ketahanan perbankan tetap terjaga meskipun memanfaatkan ULN karena pangsa ULN terhadap aset yang rendah, komposisi ULN yang rendah risiko, dan likuiditas yang memadai. ULN perbankan memiliki risiko yang terbatas karena rendahnya pangsa ULN terhadap aset, yaitu hanya sebesar 3,29% pada akhir 2024. Komposisi ULN juga mendukung risiko ULN yang terbatas, yaitu dominasi tenor jangka panjang dan berupa *loan agreement*. *Loan agreement* umumnya lebih stabil dibandingkan obligasi karena memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian persyaratan, jumlah penarikan, suku bunga, dan tenor pinjaman. Selain itu, bank juga memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban ULN yang tecermin dari rasio total AL/DPK yang berada di atas *threshold* sebesar 10% pada sebagian besar bank yang memiliki eksposur ULN.



Grafik 3.4.7. Posisi Outstanding ULN Jangka Panjang Bank Berdasarkan Jenis ULN



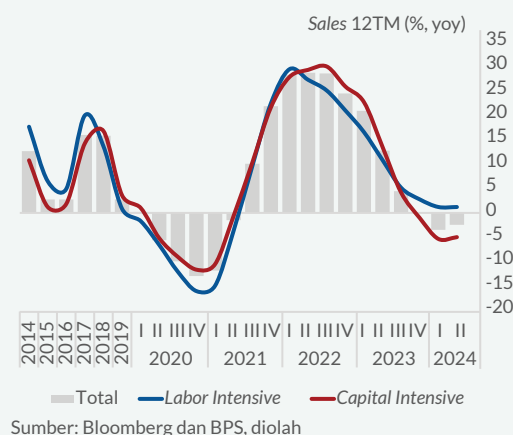
Grafik 3.4.8. Posisi Outstanding ULN Perbankan Berdasarkan Jatuh Tempo

Boks 3.1

Potensi Peningkatan Ketahanan Rumah Tangga melalui Dorongan Sektor *Labor Intensive*

Sektor padat karya (*labor intensive/LI*)¹⁵ memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Sektor LI umumnya menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan sektor padat modal (*capital intensive/CI*). Berdasarkan data statistik tenaga kerja per Agustus 2024 yang dirilis oleh BPS, sektor LI menyerap sekitar 71,16% dari total TK di Indonesia. Beberapa sektor LI dengan tingkat penyerapan TK tertinggi antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,18%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,89%, serta Konstruksi sebesar 6,55%. Sektor LI diperkirakan memiliki prospek yang baik, tecermin dari pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan sektor CI (Grafik B3.1.1).

Sektor LI berperan dalam meningkatkan ketahanan RT melalui peningkatan jumlah tenaga kerja, kenaikan upah, serta tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menurun. Peningkatan pertumbuhan jumlah TK terutama terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,31%, serta sektor perdagangan sebesar 2,92%. Sektor LI juga mengalami pertumbuhan upah sektor riil sebesar 1,83% pada Agustus 2024 (Tabel B3.1.1).

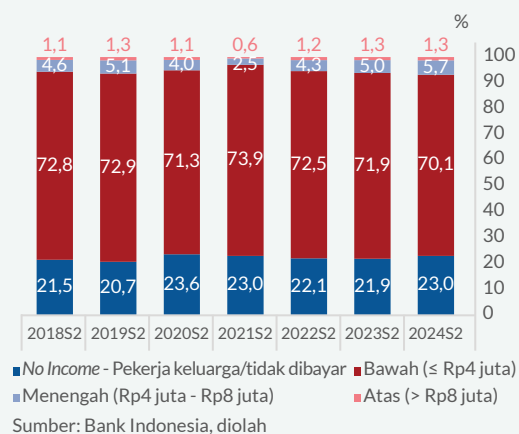


Grafik B3.1.1. Penjualan Sektor *Labor Intensive* dan *Capital Intensive*

¹⁵ Klasifikasi sektor LI dan CI disusun berdasarkan tabel *Input-Output* 2016; Sektor merupakan LI jika perbandingan surplus usaha neto terhadap kompensasi tenaga kerja <60%.

Peningkatan upah tertinggi terutama terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (3,19%), perdagangan dan penjualan eceran (1,70%), jasa pendidikan (3,59%), dan jasa lainnya (4,79%). Selain itu, PHK pada sektor LI juga menunjukkan penurunan signifikan. Beberapa di antaranya adalah sektor jasa perusahaan, sektor perdagangan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pangsa PHK terhadap total TK di sektor tersebut masing-masing sebesar 0,06%, 0,07%, dan 0,02%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa tahun sebelumnya sebesar 0,46%, 0,10%, dan 0,16%.

Meskipun menyerap TK lebih banyak, sektor LI masih dihadapkan pada tantangan tingkat informalitas yang tinggi dan upah yang lebih rendah. Sebagian besar pekerja sektor LI (61,27%) merupakan TK informal, utamanya pada sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Selain itu, TK informal cenderung memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan dengan TK formal. Di lihat dari kelas pendapatannya, TK pada sektor informal masih didominasi oleh pekerja kelas bawah (upah ≤ 4 juta) dengan pangsa pekerja keluarga/tidak dibayar yang meningkat (Grafik B3.1.2).



Grafik B3.1.2. Perkembangan TK Informal berdasarkan Kelas Pendapatan

Tabel B3.1.1. Perkembangan Jumlah TK, PHK dan Upah Sektor *Labor Intensive*

KBLI	CI/ LI	Share 2024	Kontribusi Jumlah TK (% yoy)			Jumlah PHK (orang)			% PHK terhadap Jumlah TK Sektoral			Upah Nominal (Juta Rp)			Upah Riil Sektoral (% yoy)		
			Ags 2022	Ags 2023	Ags 2024	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2024	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2024	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2024	Ags 2022	Ags 2023	Ags 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	LI	28,18%	1,20%	0,55%	0,93%	3.358	4.798	2.579	0,01%	0,01%	0,01%	1,73	1,81	1,90	17,45%	1,88%	3,19%
Konstruksi	LI	6,55%	0,14%	0,57%	0,16%	2.499	6.402	2.048	0,03%	0,07%	0,02%	2,79	3,04	3,01	11,51%	6,08%	-2,66%
Perdagangan Besar dan Eceran	LI	18,89%	0,35%	0,27%	0,55%	27.564	27.535	19.344	0,11%	0,10%	0,07%	2,76	2,93	3,04	20,69%	3,26%	1,70%
Jasa Keuangan dan Asuransi	LI	1,18%	0,02%	0,01%	0,05%	3.760	3.064	4.819	0,23%	0,19%	0,28%	5,18	5,12	5,07	19,24%	3,77%	-2,60%
Jasa Perusahaan	LI	1,69%	0,17%	0,07%	0,08%	3.646	10.617	1.387	0,16%	0,46%	0,06%	4,23	4,90	4,94	23,18%	12,71%	-0,89%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	LI	3,52%	0,02%	0,00%	0,15%	3.284	2.105	1.224	0,07%	0,04%	0,02%	3,85	3,97	4,16	3,59%	0,34%	2,93%
Jasa Pendidikan	LI	4,95%	0,02%	0,30%	0,17%	3.037	3.064	875	0,05%	0,04%	0,01%	2,66	2,67	2,81	0,68%	-2,14%	3,59%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	LI	1,64%	0,03%	-0,02%	0,12%	650	3.490	360	0,03%	0,16%	0,02%	3,58	3,67	3,79	5,36%	-0,43%	1,61%
Jasa Lainnya	LI	4,56%	0,20%	0,26%	0,14%	6.570	4.697	3.047	0,11%	0,07%	0,05%	1,96	1,94	2,07	20,80%	3,90%	4,79%
Total		71,16%	2,15%	2,02%	2,36%	54.368	65.772	35.683	0,79%	1,15%	0,53%				13,17%	2,07%	1,83%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, beberapa sektor CI yang menyerap banyak TK juga mendukung ketahanan RT melalui upah yang lebih baik. Sektor CI umumnya menyerap TK lebih sedikit dibandingkan sektor LI. Namun, terdapat beberapa sektor CI yang mampu menyerap banyak TK karena jumlah perusahaan yang banyak, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 13,83%, sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman sebesar 7,79%, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 4,29%. Sektor CI dengan penyerapan TK yang tinggi turut meningkatkan ketahanan RT karena umumnya memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor LI.

Kedepannya, beberapa program Pemerintah diharapkan mampu mendorong kinerja sektor LI yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan RT. Program Asta Cita berpotensi meningkatkan kinerja beberapa sektor LI terkait, antara lain pertanian, pengangkutan dan industri makanan dan minuman. Selain itu, juga terdapat program peningkatan kualitas TK, diantaranya kebijakan penempatan angkatan kerja muda usia 18–24 tahun sebagai karyawan tetap serta reformulasi perhitungan Upah Minimum Provinsi, yang berpotensi mendorong peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan perbaikan upah TK. Dengan meningkatnya kinerja korporasi dan implementasi kebijakan TK yang lebih efektif, kesejahteraan serta ketahanan ekonomi RT diharapkan semakin membaik.

Boks 3.2

Ketahanan Sistem Keuangan Indonesia dari Risiko Siber dan *Fraud*

Pemanfaatan teknologi informasi pada industri keuangan berpotensi menimbulkan risiko siber dan *fraud* yang dapat menjadi ancaman terhadap SSK. Pemanfaatan teknologi informasi pada industri keuangan menimbulkan eksposur tinggi terhadap keamanan data sensitif yang rentan terhadap risiko siber dan *fraud*. Insiden siber dapat mengganggu ketahanan operasional institusi keuangan, termasuk Penyedia Sistem Pembayaran (PSP). Pada gilirannya, insiden siber dapat mengancam SSK secara luas melalui tiga *key channels*¹⁶, yaitu: (1) *loss of confidence* atau hilangnya kepercayaan kepada PSP yang berpotensi memicu terjadinya risiko likuiditas dan permasalahan solvabilitas; (2) *lack of substitute*, apabila insiden siber terjadi pada institusi keuangan dan penyelenggara infrastruktur keuangan yang tidak mudah digantikan; dan (3) *interconnectedness* antar institusi keuangan, termasuk PSP, melalui keterkaitan teknologi atau keterkaitan keuangan.

UU P2SK memberikan mandat bagi Bank Indonesia untuk mengatur dan memastikan ketahanan siber di sektor keuangan, khususnya Sistem Pembayaran (SP). Sesuai dengan mandat untuk menjaga stabilitas SP dan upaya mitigasi risiko siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber (disebut KKS) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber. PBI tersebut menjadi pedoman bagi PSP dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi yang dikelola untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap sistem keuangan. PSP diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan secara komprehensif, termasuk tata kelola, manajemen risiko, deteksi dan penanganan insiden, serta kolaborasi antar lembaga.

Berdasarkan pengukuran tingkat maturitas ketahanan siber, masih terdapat ruang bagi PSP untuk memperkuat ketahanannya. Bank Indonesia melakukan pengukuran tingkat maturitas setiap tahun yang ditujukan untuk menilai tingkat kesiapan dan kemampuan PSP dalam menghadapi risiko siber. Penilaian maturitas KKS dilakukan dengan mengacu pada PBI KKS yaitu mencakup tujuh domain penilaian, yaitu strategi dan kebijakan, audit dan budaya, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, serta pemulihan. Hasil penilaian maturitas kelompok PSP menunjukkan maturitas siber industri masih perlu diperkuat pada aspek pemulihan, proteksi, respons, identifikasi, strategi dan kebijakan, serta deteksi yang masih kurang memenuhi standar (Grafik B3.2.1). Sementara itu, domain audit dan budaya berada pada level yang baik.

Sementara itu, ketahanan industri SP ritel masih terjaga, meskipun tingkat *fraud* meningkat. Risiko siber dan *fraud* juga mengancam masyarakat sebagai konsumen layanan keuangan, antara lain *card trapping*, *phishing*, *skimming*, pengambil



Sumber: Bank Indonesia, diolah

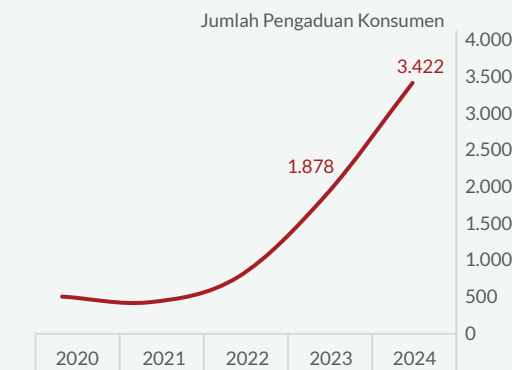
Grafik B3.2.1. Pemetaan Tingkat Maturitas Siber PUSK

¹⁶ International Monetary Fund, "Global Financial Stability Report: The Last Mile: Financial Vulnerabilities and Risks", April 2024.

alihan *subscriber identity module*, dan penipuan *mule account*. Berdasarkan data pengaduan konsumen ke Bank Indonesia tahun 2024, terjadi peningkatan *fraud* sebesar 82,22% (Grafik B.3.2.2). Namun demikian, tingkat *fraud* yang terjadi dalam industri SP ritel masih terjaga, tecermin dari rasio nominal *fraud* terhadap total transaksi SP ritel yang masih di bawah 0,01% (Grafik B.3.2.3). Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) melalui penerbitan Ketentuan ASPI Nomor ASPI/K-11/003/X/2024 tentang Penanganan Transaksi Transfer Dana Antar Penyelenggara Sistem Pembayaran terhadap Rekening/Akun Pengguna Jasa yang Terindikasi *Fraud* (KASPI *Fraud*), serta pelaksanaan *pilot project money trail*. Ketentuan dan inisiatif tersebut bertujuan untuk mendefinisikan jenis-jenis *fraud* yang sering terjadi dan merugikan konsumen, serta membentuk

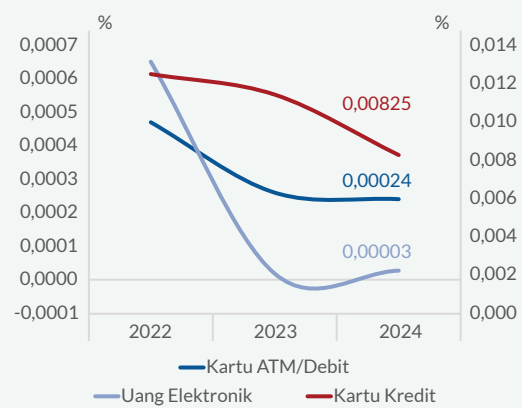
mekanisme penanganan transaksi transfer dana antar PSP terhadap rekening atau akun konsumen yang terindikasi *fraud*, termasuk melakukan *tracing* aliran dana *fraud*.

Kedepannya, Bank Indonesia akan terus berupaya mendorong institusi keuangan untuk memperkuat KKS. PSP masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek/domain KKS agar mampu mencegah risiko siber termaterialisasi dan teramplifikasi ke dalam ekosistem sistem keuangan. Selain penguatan yang harus dilakukan oleh industri, diperlukan upaya kolaborasi dan sinergi antar otoritas dan lembaga pengatur dan pengawas di sektor keuangan untuk membangun KKS melalui harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi, serta pengawasan yang lebih *preemptive*.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.2. Tren Pengaduan Konsumen ke Bank Indonesia perihal *Fraud*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.3. Tren Rasio Frekuensi *Fraud* terhadap Volume Transaksi SP Ritel



BANK INDONESIA

Bab 4

KEUANGAN INKLUSIF DAN HIJAU

Pembiayaan kepada UMKM pada 2024 tumbuh melambat dipengaruhi oleh belum pulihnya kinerja keuangan UMKM serta masih berlanjutnya upaya perbaikan kualitas kredit oleh perbankan. Kredit UMKM tumbuh 3,37% dengan kontribusi perlambatan terutama pada segmen mikro dan kelompok bank BUMN. Pertumbuhan pembiayaan alternatif UMKM melalui IKNB, baik pada PP maupun fintech lending, turut melambat. Penjualan dan kinerja keuangan UMKM yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya pertumbuhan pembiayaan. Perbankan dan IKNB juga cenderung meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, di tengah peningkatan risiko kredit UMKM. Namun di sisi lain, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan pembiayaan inklusif yang kuat dengan kualitas aset yang terjaga. Pembiayaan perbankan syariah pada sektor unggulan ekonomi syariah juga menunjukkan kinerja yang baik. Pembiayaan hijau juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh pengembangan ekosistem hijau.

Pemerintah dan Bank Indonesia melanjutkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan inklusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pemerintah berupaya untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR), penyusunan skema penyaluran kredit inklusif yang inovatif, serta penerapan kebijakan hapus tagih untuk memberi kesempatan bagi UMKM dalam mendapatkan kembali akses pembiayaan. Bank Indonesia juga terus mendorong kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Langkah-langkah ini termasuk optimalisasi RPIM, KLM untuk sektor-sektor inklusif dan berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM hijau melalui fasilitasi model bisnis yang berkelanjutan.

4.1 Kinerja UMKM dan Perbaikan Kualitas Aset Kredit Masih Membayangi Pertumbuhan Pembiayaan Inklusif

Pertumbuhan pembiayaan inklusif pada 2024 cenderung melambat pada seluruh segmen, dikontribusikan oleh sektor ekonomi dengan pangsa kredit UMKM terbesar. Kredit UMKM tumbuh sebesar 3,37% pada 2024, lebih rendah dari tahun lalu sebesar 8,03%. Moderasi pertumbuhan kredit UMKM terutama disumbang oleh segmen mikro yang hanya tumbuh sebesar 1,01%, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada 2023 sebesar 24,33% (Grafik 4.1.1). Kelompok bank BUMN berkontribusi pada perlambatan tersebut, tumbuh sebesar 1,64%, lebih rendah dari kelompok bank lainnya. Pertumbuhan kredit UMKM terutama melambat pada sektor Perdagangan dan Pertanian yang memiliki pangsa kredit terbesar (Tabel 4.1.1).

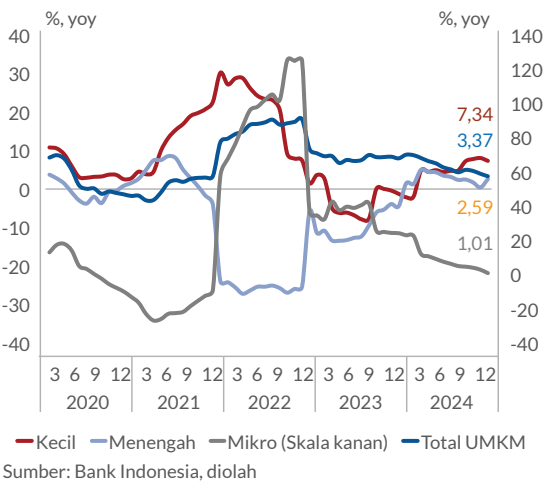
Terbatasnya pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh kinerja keuangan UMKM yang belum pulih, konsolidasi kualitas aset yang masih berlanjut, serta peningkatan risiko kredit yang memengaruhi minat kredit perbankan. Dari sisi permintaan, penurunan kondisi keuangan UMKM pascapandemi, antara lain disebabkan kinerja penjualan yang belum pulih, sebagaimana tercermin dari Indeks Kinerja UMKM¹⁷ tahun 2024 yang menurun dibandingkan dengan tahun 2023 (Grafik 4.1.2). Penurunan penjualan terjadi baik di pasar domestik maupun global. Dari sisi domestik, melemahnya daya beli masyarakat kelas bawah sebagai konsumen utama produk UMKM dan pelemahan

Tabel 4.1.1. Tabel Kredit UMKM per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% yoy)				
		Des-24	Jun-23	Des-23	Jun-24	Des-24
1. Pertanian	18,53	17,52	13,94	10,75	6,42	
2. Pertambangan	0,64	0,42	15,07	32,91	18,95	
3. Industri Pengolahan	9,93	7,37	7,07	3,99	2,96	
4. Listrik Gas Air	0,29	-6,63	23,41	47,91	-1,75	
5. Konstruksi	3,61	-5,09	4,23	0,17	-0,13	
6. Perdagangan	50,73	4,67	4,99	3,06	1,39	
7. Pengangkutan	3,87	17,49	15,30	9,80	11,75	
8. Jasa Dunia Usaha	4,65	1,15	10,20	8,84	2,74	
9. Jasa Sosial	7,75	13,10	14,20	10,44	7,50	
Total UMKM	100	7,34	8,03	5,68	3,37	

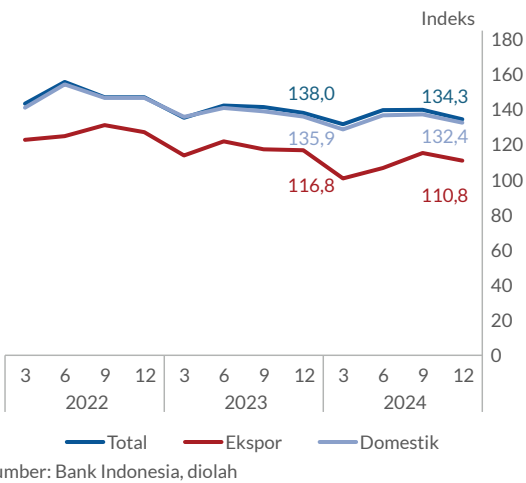
Sumber: Bank Indonesia, diolah

produksi akibat *scarring effect* El Nino di awal tahun, turut memengaruhi penjualan UMKM. Dari sisi global, terdapat pelemahan permintaan pasar global dari Asia dan Eropa yang merupakan target pasar utama UMKM. Dinamika tersebut turut memengaruhi permintaan kredit UMKM, sebagaimana tercermin dari Indeks Permintaan Kredit UMKM yang mencatatkan kontraksi hingga 5,47% (Grafik 4.1.3). Namun, UMKM masih memiliki ketahanan keuangan yang cukup baik untuk

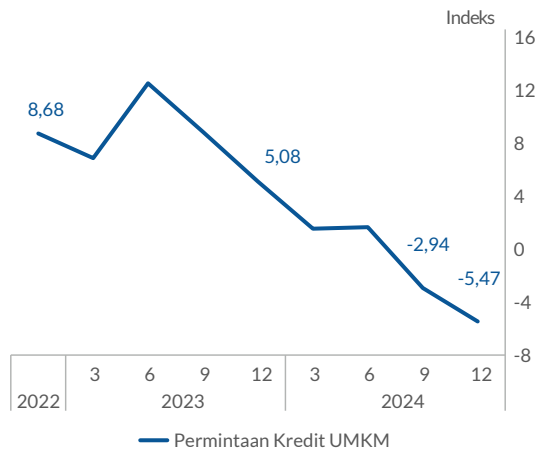


Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Kredit UMKM per Segmen

17 Indeks Kinerja UMKM merupakan hasil survei Bank Indonesia untuk mengetahui kondisi penjualan UMKM terhadap 750 UMKM binaan Bank Indonesia.



Grafik 4.1.2. Indeks Kinerja UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.3. Indeks Permintaan Kredit UMKM

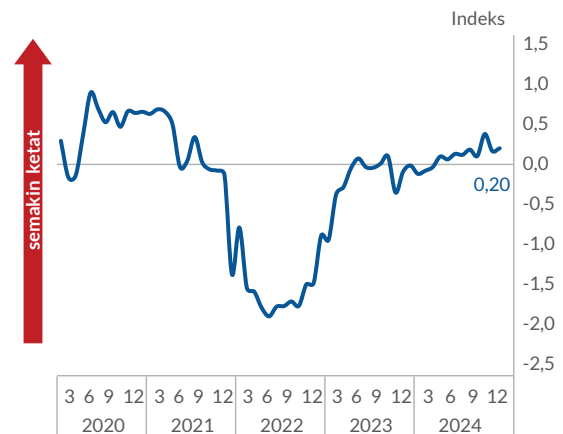
untuk menjaga keberlangsungan usaha, tecermin dari indeks ketahanan keuangan UMKM yang tetap optimis (di atas 100) (Grafik 4.1.4).

Darisi penawaran, perbankan meningkatkan kehati-hatian dan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang cenderung ketat untuk UMKM. Kondisi ini tecermin dari kenaikan ILR (Grafik 4.1.5). Pengetatan ILR disumbangkan oleh pertumbuhan plafon yang melambat. Perbankan pada 2024 lebih berfokus pada upaya perbaikan kualitas kredit UMKM dibandingkan ekspansi, terutama pascaberakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 bagi UMKM pada Maret 2024. Bank meningkatkan kehati-hatian dalam menilai kualitas kredit UMKM dengan menurunkan kualitas kredit menjadi NPL terhadap debitur UMKM yang telah direstrukturisasi tetapi belum menunjukkan perbaikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.4. Indeks Ketahanan Keuangan UMKM

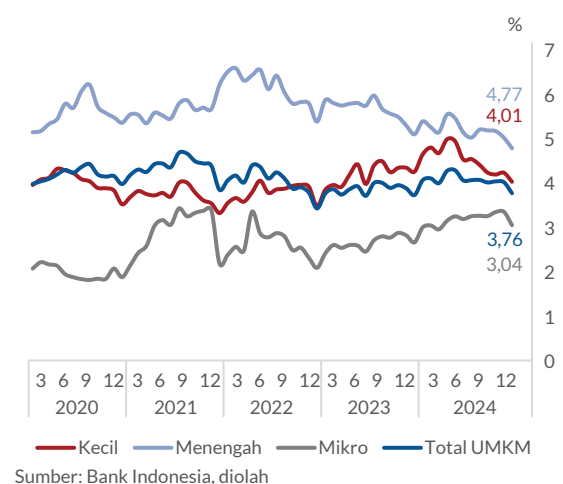


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.5. ILR UMKM

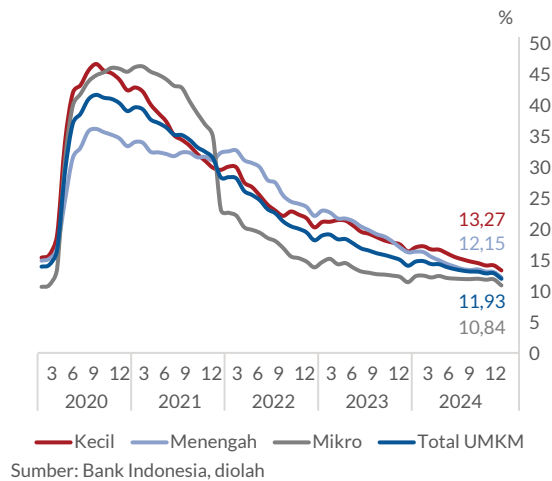
kemampuan bayar. Akibatnya, NPL meningkat sebesar 28 bps pada satu bulan setelah penghentian kebijakan dimaksud. Dalam setahun, NPL meningkat menjadi sebesar 3,76% dari 3,71% pada 2023 (Grafik 4.1.6). Sementara itu, LaR menurun dari 14,05% pada 2023 menjadi 11,93% pada 2024 (Grafik 4.1.7).

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit UMKM industri, pembiayaan UMKM dari perbankan syariah pada 2024 tumbuh kuat, didukung kualitas pembiayaan yang membaik. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM mencapai 8,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Minat pembiayaan yang terjaga didukung kualitas pembiayaan UMKM perbankan Syariah yang membaik, dengan tren NPF UMKM yang cenderung menurun menjadi 3,74% pada akhir 2024 (Grafik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

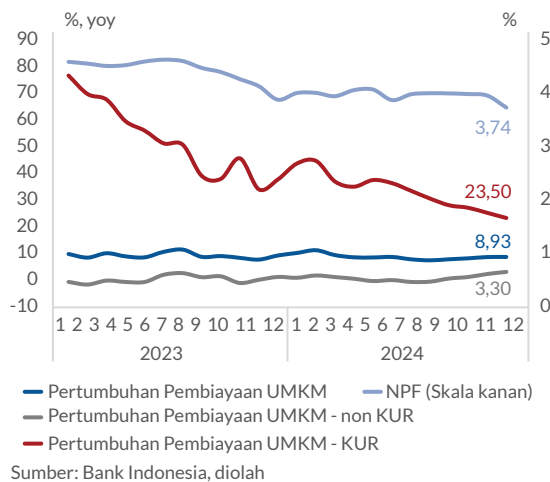
Grafik 4.1.6. NPL Kredit UMKM per Segmen



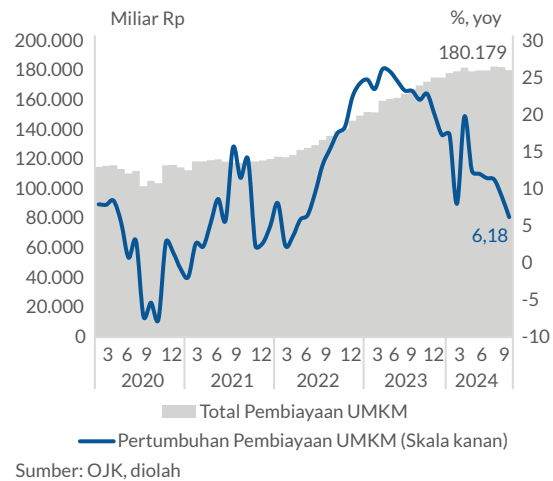
Grafik 4.1.7. LAR Kredit UMKM per Segmen

4.1.8). Kinerja pembiayaan UMKM ini tergolong lebih baik dibandingkan pembiayaan syariah pada segmen korporasi yang melambat dan hanya tumbuh 5,67%. Pembiayaan perbankan syariah pada segmen UMKM, antara lain ditopang oleh terjaganya minat perbankan syariah dalam menyalurkan KUR, khususnya pada sektor dengan ekosistem yang telah terbentuk baik, seperti perkebunan kelapa sawit (skema inti-plasma). Selain itu, pembiayaan UMKM juga digalakkan pada segmen *Islamic Ecosystem*, antara lain jasa pendidikan dan jasa kesehatan terkait ormas Islam serta biro haji umrah, yang tergolong sebagai *captive market* bagi perbankan syariah.

Pada IKNB, pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh PP turut melambat, bahkan berkontraksi pada segmen mikro. Tren pelambatan terjadi sejak awal 2024, setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi pada 2023 (Grafik 4.1.9). Pada September 2024, total pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM mencapai Rp180.179 miliar dengan pertumbuhan sebesar



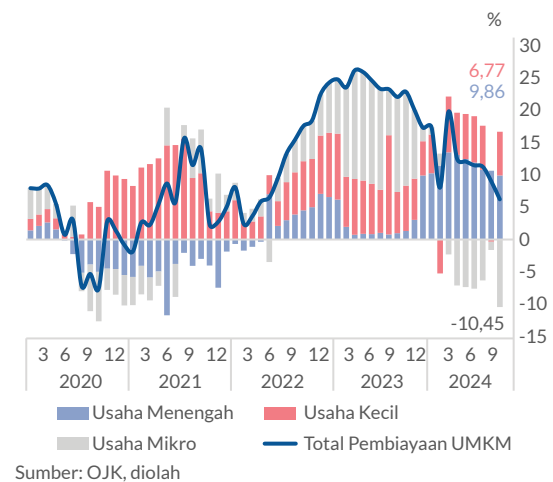
Grafik 4.1.8. Pertumbuhan dan NPF Pembiayaan Syariah ke UMKM



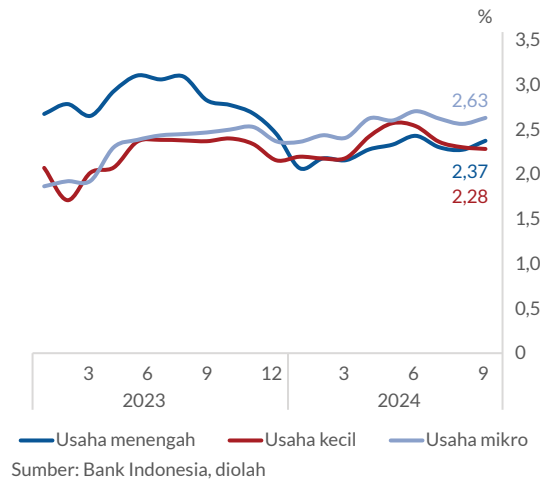
Grafik 4.1.9. Perkembangan Pembiayaan PP Kepada UMKM

6,18%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan kepada usaha menengah dan kecil dengan kontribusi pertumbuhan masing-masing sebesar 9,86% dan 6,77%. Sebaliknya, pembiayaan kepada usaha mikro mengalami kontraksi kontribusi pertumbuhan sebesar 10,45% (Grafik 4.1.10), seiring dengan NPF segmen mikro yang meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan segmen menengah dan kecil (Grafik 4.1.11). Usaha menengah dan usaha kecil mendominasi pembiayaan PP kepada UMKM, masing-masing sebesar Rp67.317 miliar (37,36%) dan Rp65.690 miliar (36,46%), diikuti segmen mikro sebesar Rp47.172 miliar (26,18%).

Alternatif pembiayaan UMKM dari IKNB lainnya, yakni *fintech lending*, juga berkontraksi. Pada September 2024, pinjaman *fintech lending* kepada UMKM hanya mencapai Rp19.927 miliar, turun 2,08% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp20.350 miliar (Grafik 4.1.12). Pangsa pinjaman *fintech lending* kepada UMKM tercatat menurun dalam satu tahun



Grafik 4.1.10. Kontribusi Pertumbuhan Pembiayaan PP Kepada UMKM



Grafik 4.1.11. NPF UMKM PP

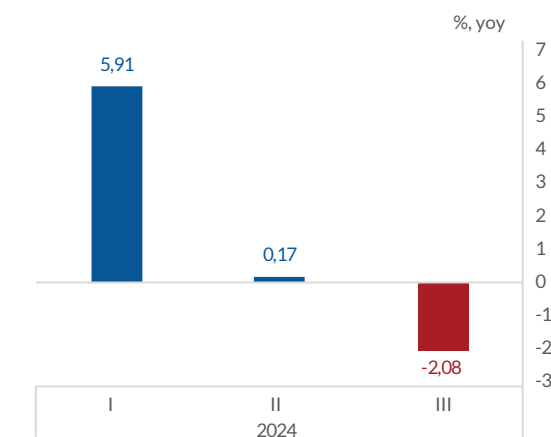
terakhir akibat pergeseran alokasi pembiayaan kepada segmen perorangan non-UMKM yang didukung dengan TWP 90 yang lebih terjaga. Dinamika ini menyebabkan pangsa pinjaman *fintech lending* kepada UMKM menurun dari 36,54% terhadap total pinjaman pada September 2023 menjadi 26,75% pada September 2024. Lebih lanjut, sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dicanangkan OJK, porsi pembiayaan *fintech lending* kepada sektor produktif dan UMKM pada 2025-2026 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 40-50%.

Di sisi lain, pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan UMKM, yakni *Securities Crowdfunding (SCF)* cenderung meningkat. Pada tahun 2024, total dana perolehan (*fund raise*) dari SCF mencapai Rp384 miliar, meningkat 23,08% atau Rp72 miliar

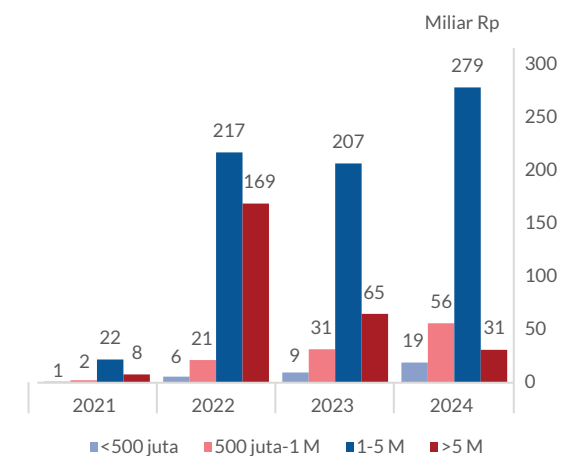
dibandingkan tahun 2023. Nominal *fund raise* didominasi oleh *tiering SCF* Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar yang mencapai Rp279 miliar (Grafik 4.1.13). Pembiayaan melalui SCF menjadi menarik bagi UMKM karena dapat dimulai dari nominal yang cukup kecil, di bawah Rp500 juta.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai dukungan kebijakan untuk mendorong pembiayaan inklusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. Pada 2025, Komjak KUR telah menetapkan plafon KUR sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,3 juta dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta. Target plafon KUR ini meningkat secara nominal dibandingkan dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp280 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah penguatan ekosistem KUR. Pemerintah mendorong perbankan untuk memanfaatkan *Innovative Credit Scoring* dalam melakukan asesmen kredit calon debitur KUR. Hal ini akan dilakukan melalui pemanfaatan data kependudukan, historis kredit perbankan, serta data alternatif seperti histori data telekomunikasi, jaminan kesehatan, pembayaran listrik, dan transaksi *e-commerce*. Optimalisasi penyaluran KUR juga akan dilakukan melalui penguatan skema penyaluran kepada pekerja migran Indonesia dengan menggunakan pola *linkage*, termasuk mengkaji tambahan lembaga keuangan penyalur.

Selain itu, akan dibentuk juga skema baru penyaluran pembiayaan inklusif melalui Kredit Industri Padat Karya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Skema ini ditujukan untuk pembiayaan revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas



Grafik 4.1.12. Perkembangan Pinjaman Fintech Lending Kepada UMKM



Grafik 4.1.13. Perkembangan Fund Raise SCF Berdasarkan Nominal

sektor industri padat karya dengan plafon pinjaman yang besar hingga Rp10 miliar. Skema ini memberikan subsidi suku bunga sebesar 7-7,5%, dengan tenor pinjaman 5-8 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing hasil produksi sektor padat karya baik di pasar domestik maupun ekspor, diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru, antara lain pada sektor tekstil, furnitur, dan kulit.

Pada November 2024, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar mendapat pembiayaan kembali melalui penghapusan dan pemutihan piutang macet pada bank maupun nonbank BUMN¹⁸. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih diperkirakan memiliki dampak yang cukup baik bagi prospek pertumbuhan kredit inklusif ke depan. Bagi bank, kebijakan hapus tagih tidak menambah beban pada laba rugi mengingat bank telah membentuk CKPN sebesar 100% ketika dilakukan hapus buku. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa kerugian yang timbul dari hapus tagih tidak tergolong sebagai kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik, sesuai perundang-undangan, anggaran dasar, dan tata kelola. Bagi UMKM, kebijakan ini membuka peluang bagi debitur yang sebelumnya macet untuk kembali memperoleh akses keuangan. UMKM menyambut baik kebijakan ini dengan berencana mengambil kredit baru didukung optimisme kemampuan bayar karena kondisi usaha yang telah lebih baik.

Bank Indonesia turut mendukung sisi permintaan kredit UMKM dengan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan

penguatan daya saing UMKM melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain hilirisasi komoditas pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, memperluas akses pasar UMKM di pasar global (*Go Export*) dan pasar digital (*Go Digital*), mengembangkan UMKM pendukung pariwisata sebagai sumber devisa nasional, serta mendorong praktik ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM hijau. Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan akses dan literasi keuangan inklusif dan hijau melalui kombinasi program untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital nasional secara *end-to-end* dan edukasi untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan. Dalam rangka mengimplementasikan program edukasi keuangan yang *targeted*, masif dan terstruktur, Bank Indonesia menyusun kerangka *core competencies* literasi keuangan yang berisi kompetensi inti utama yang dibutuhkan. Program peningkatan literasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, dari sisi penawaran, Bank Indonesia terus memperkuat dukungan pembiayaan kepada sektor inklusif melalui kebijakan makroprudensial akomodatif. RPIM akan terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan minat bank pada penyaluran kredit inklusif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempertimbangkan perbedaan model bisnis bank. Selain itu, dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk pembiayaan juga terlihat dari berlanjutnya pemberian KLM pada sektor inklusif, termasuk atas capaian RPIM dan pembiayaan ultra mikro. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif serta koordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka meningkatkan pembiayaan inklusif ke depan.

18 Peraturan Pemerintah No.47 2024 perihal Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa kriteria utang yang dapat dihapustagihkan antara lain adalah nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 Jt per debitur dan telah dihapusbukukan minimal 5 (lima) tahun pada Peraturan Pemerintah yang berlaku. Kredit juga bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan dan tidak terdapat agunan atau terdapat agunan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual/sudah terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman. Ketentuan lain yang berlaku adalah masa berlaku kebijakan selama 6 bulan sejak Peraturan Pemerintah diterbitkan dan pemutihan pada SLIK OJK mengubah status debitur menjadi "Lunas Sesuai Program Pemerintah" sehingga selanjutnya UMKM bisa mengajukan permohonan kredit/ pembiayaan baru.

4.2 Optimalisasi Pembiayaan Hijau Untuk Mendukung Pencapaian Target Transisi Hijau Nasional

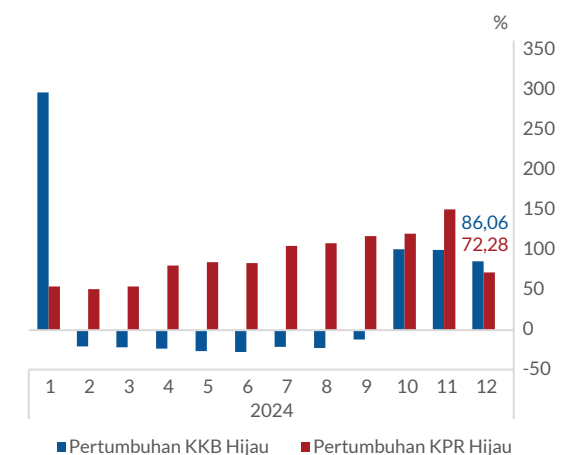
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengamanatkan pentingnya dukungan ekosistem keuangan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹⁹. Penguatan ekosistem berkelanjutan bertujuan untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu, penguatan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan hijau melalui inovasi produk keuangan dan mobilisasi penyaluran pembiayaan oleh sektor keuangan. Ekosistem keuangan berkelanjutan, antara lain mencakup aspek strategi kebijakan, *framework/taksonomi/roadmap*, infrastruktur, serta sinergi dan koordinasi. Melalui pembentukan ekosistem yang lengkap, aktivitas transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan akan semakin marak sehingga menarik pembiayaan hijau dari sektor keuangan.

Pembiayaan transisi berperan penting sebagai katalis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon mengingat tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia pada bahan bakar fosil. Transisi menuju ekonomi dengan jejak karbon yang lebih rendah secara bertahap dan terukur membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar. Pembiayaan transisi akan meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar global dengan meningkatkan reputasi pelaku usaha dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Hal ini penting untuk diterapkan terutama di negara-negara yang rentan terhadap risiko iklim seperti Indonesia. Langkah tersebut akan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan jangka panjang, serta mendukung pencapaian target *net-zero emission* yang telah ditetapkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution*.

Bank Indonesia turut berkontribusi pada upaya penguatan ekosistem berkelanjutan dengan menerbitkan tiga kebijakan makroprudensial. Pertama, kebijakan LTV untuk kredit properti berwawasan lingkungan maksimum sebesar 100% dan Uang Muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) listrik berbasis baterai minimum sebesar

0% sejak Desember 2019. Kedua, kebijakan RPIM dengan memasukkan kepemilikan Surat Berharga Berkelanjutan dan pembiayaan kepada lembaga penugasan *blended finance* sebagai komponen pemenuhan target RPIM. Ketiga, KLM berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) *averaging* kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor tertentu, inklusif termasuk usaha Ultra Mikro, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan penyusunan *climate risk stress test* sektor perbankan dan pedoman Pengembangan UMKM Hijau pada 2024, serta pengembangan Kalkulator hijau sebagai alat penghitung emisi Gas Rumah Kaca yang diluncurkan pada 2024. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah memiliki berbagai riset dan kajian terkait ekonomi dan keuangan berkelanjutan.

Dukungan kebijakan makroprudensial akomodatif berdampak positif pada berlanjutnya pertumbuhan penyaluran kredit hijau, meskipun pangsa kredit masih rendah dibandingkan dengan kredit nonhijau. KKB hijau²⁰ tumbuh sebesar 86,06% dan KPR berwawasan lingkungan tumbuh sebesar 72,28% pada 2024 (Grafik 4.2.1.). Pertumbuhan ini didukung dengan risiko kredit yang terjaga, yaitu NPL KKB hijau sebesar 0,46% dan NPL KPR hijau sebesar 0,58%, jauh



Grafik 4.2.1. Pertumbuhan KPR dan KKB Hijau

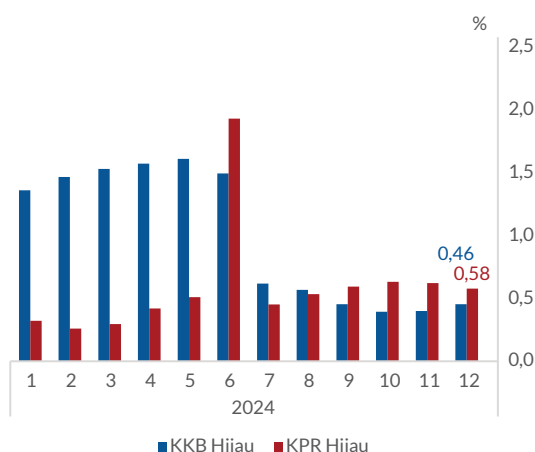
¹⁹ Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didefinisikan sebagai perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

²⁰ Data KKB dan KPR Hijau bersumber dari pelaporan bank ke Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 23/2/PBI/2021.

di bawah ambang batas 5% (Grafik 4.2.2.). Kedepan, penyaluran KKB dan KPR hijau oleh perbankan berpotensi terus ditingkatkan kontribusinya untuk mendorong pertumbuhan kredit industri.

Kebijakan KLM telah memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau untuk mendukung pembiayaan lebih lanjut. KLM memberikan pengurangan GWM hingga 50 bps bagi bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau mencapai *threshold* tertentu. Per 1 Januari 2025, pemberian KLM hijau diperkuat tidak hanya memperhitungkan KKB dan KPR Hijau, tetapi juga memperhitungkan kredit pada sektor ekonomi Daur Ulang Limbah.

OJK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menerbitkan berbagai panduan guna mempersiapkan lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha untuk bertransisi menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan. OJK telah menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019)* pada 2015 dan *Tahap II (2021-2025)* pada 2021, Taksonomi Hijau Indonesia pada 2022, peraturan perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia pada 2023, serta Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* pada 2024. Adapun Kemenkeu telah menyusun kerangka kerja *Green Bond* dan *Green Sukuk* pada 2018 dan *Sustainable Development Goals Government Securities Framework* pada 2021. Ekosistem keuangan berkelanjutan yang terbentuk saat ini masih perlu terus diperkuat guna mendukung dan memfasilitasi kesiapan entitas ekonomi baik lembaga jasa keuangan maupun sektor riil dalam bertransisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2.2. Rasio NPL KPR dan KKB Hijau

Keterlibatan Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK dalam Dewan Standar Keberlanjutan (DSK)²¹ juga turut berperan penting. DSK berencana menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) untuk mendukung adopsi IFRS S1 dan S2 dalam rangka memenuhi kebutuhan investor di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. SPK menjadi panduan bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan rencana aksi terkait risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk transisi menuju ekonomi rendah karbon. Rencana transisi tersebut, antara lain mencakup penetapan target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan target iklim. Selain itu, perlu dilakukan penetapan strategi dekarbonisasi yang jelas dan terukur, serta *monitoring* perkembangan pencapaian target secara berkala. Dalam hal ini, Kalkulator Hijau dapat digunakan sebagai alat penghitung emisi gas rumah kaca yang menjadi rujukan nasional dalam rangka pengungkapan keberlanjutan.

UU P2SK juga memberikan mandat pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan dengan anggota Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK. Komite Keuangan Berkelanjutan menjadi wadah sinergi yang vital dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, strategi, kebijakan, dan program, serta optimalisasi kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Selain itu, Komite Keuangan Berkelanjutan juga berperan penting dalam mengembangkan basis data dan infrastruktur, serta berkoordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan. Terkait hal ini, dukungan kebijakan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan pembiayaan transisi yang optimal bagi sektor riil untuk mencapai ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan, ekonomi dan keuangan yang berketahanan, dan transisi yang berkeadilan (inklusif).

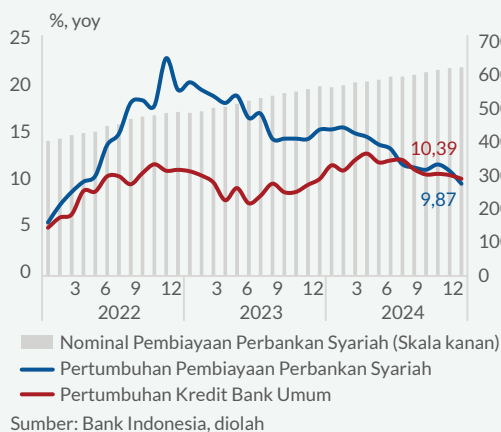
Peran aktif Bank Indonesia di berbagai fora internasional memperkuat relevansi dalam rangka sinergi dan koordinasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Dalam konteks kerja sama di kawasan, peran aktif Bank Indonesia dalam upaya turut mendorong keuangan berkelanjutan di ASEAN juga mewarnai langkah sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas lain. Hal tersebut dilakukan, antara lain melalui posisi Bank Indonesia sebagai *co-chairs* untuk ASEAN SLC TFSF pada September 2024 bersama State Bank of Vietnam yang mengusung agenda *ASEAN Green Map* dan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*.

²¹ <https://web.iaiglobal.or.id/Pengurus-IAI/dewan-standar-keberlanjutan#gsc.tab=0>

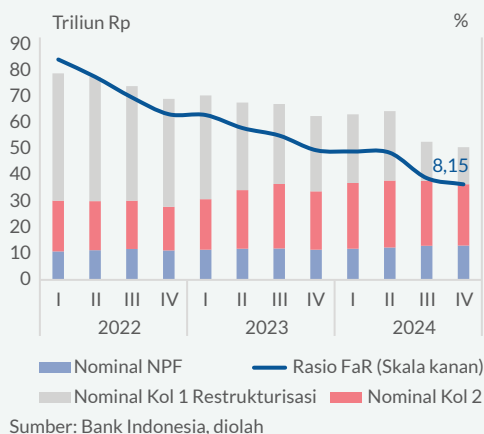
Boks 4.1

Dukungan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh positif dengan kualitas terjaga, di tengah ketidakpastian global. Kualitas yang terjaga tercermin dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang mencapai 9,87% pada 2024, walau melambat dari 2023 (Grafik B4.1.1). Risiko pembiayaan perbankan syariah relatif terjaga, tercermin dari rasio NPF yang rendah sebesar 2,11% dan rasio *Financing at Risk* (FaR) yang menurun menjadi sebesar 8,15% pada 2024 (Grafik B4.1.2.).



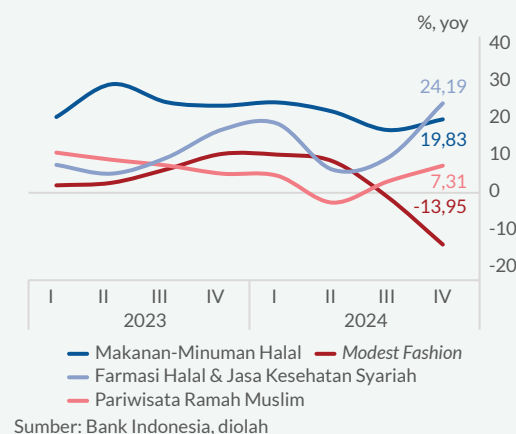
Grafik B4.1.1. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah



Grafik B4.1.2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah

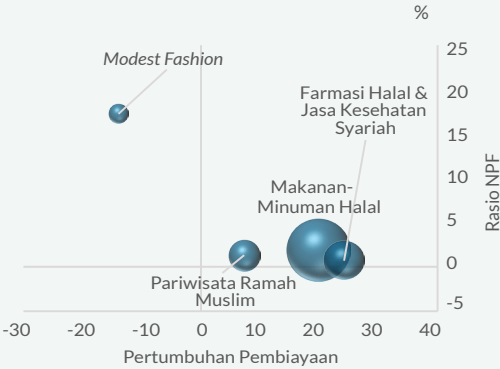
Pembiayaan perbankan syariah diarahkan untuk mendukung sektor unggulan ekonomi sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian syariah. Hal ini sesuai dengan amanat *Roadmap RP3SI 2023-2027* yang menyebutkan agar perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap ekosistem ekonomi syariah. Sejumlah sektor yang menjadi fokus dari pengembangan ekonomi syariah, antara lain Makanan-Minuman Halal; *Modest Fashion*; Pariwisata Ramah Muslim; dan Farmasi Halal dan Jasa Kesehatan Syariah²².

Pembiayaan perbankan syariah pada sektor-sektor unggulan ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan yang baik, sejalan dengan kinerja usaha sektor unggulan, kecuali pada sektor *modest fashion* (Grafik B4.1.3). Kualitas pembiayaan yang terjaga pada masing-masing sektor turut berkontribusi pada pertumbuhan pembiayaan yang baik (Grafik B4.1.4). Selain itu, tingkat pertumbuhan PDB dan penjualan dari masing-masing sektor juga menunjukkan perkembangan yang positif (Grafik B4.1.5). Perlambatan pertumbuhan pada sektor *modest fashion* disebabkan oleh kenaikan risiko kredit dan dampak tekanan aliran produk impor dan PHK terhadap kinerja penjualan (Tabel B4.1.1).



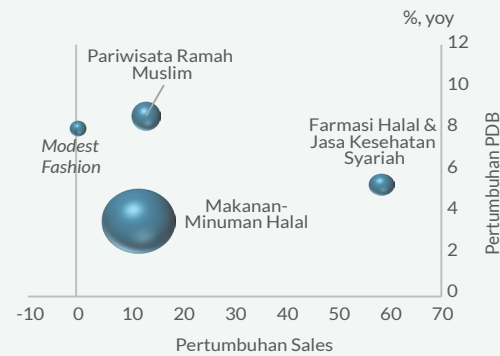
Grafik B4.1.3. Perkembangan Pembiayaan pada Sektor Unggulan Ekonomi Syariah

²² Merujuk pada sektor ekonomi syariah pada *State of Global Islamic Economy Report* (SGIER).



Sumber: Bank Indonesia, diolah
Ket: Ukuran gelembung menunjukkan nilai outstanding pembiayaan

Grafik B4.1.4. Kuadran Sisi Supply Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah per TW IV 2024



Sumber: BPS dan Bloomberg, diolah
Ket: Ukuran gelembung menunjukkan nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Grafik B4.1.5. Kuadran Sisi Demand Pembiayaan Sektor Unggulan Ekonomi Syariah per TW III 2024

Tabel B4.1.1. Perkembangan Supply dan Demand Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Unggulan Ekonomi Syariah

Klaster Sektor Ekonomi Syariah	Pertumbuhan Pembiayaan (yoy)		NPF		Pertumbuhan PDB (yoy)	Pertumbuhan Sales (yoy)
	2024		2024		2024	2024
	Sep	Des	Sep	Des	Sep	Des
Makanan-Minuman Halal	16,93%	19,83%	2,02%	1,85%	3,85%	11,93%
Modest Fashion	-1,10%	-13,95%	15,26%	17,25%	7,92%	-0,26%
Pariwisata Ramah Muslim	3,03%	7,31%	1,75%	1,32%	8,61%	12,91%
Farmasi Halal & Jasa Kesehatan Syariah	9,41%	24,19%	0,72%	0,70%	5,21%	58,37%

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah

Kedepan, prospek pembiayaan perbankan syariah pada sektor-sektor unggulan ekonomi syariah diperkirakan meningkat. Sektor-sektor unggulan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Selain itu, perbankan syariah memiliki minat yang terjaga untuk mendorong pembiayaan pada sektor unggulan didukung prospek positif perekonomian nasional. Lebih lanjut, pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan bersinergi dengan *Islamic Ecosystem* (industri halal, organisasi keagamaan, dan lembaga syariah lainnya).

Namun, sejumlah tantangan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian bagi penguatan intermediasi perbankan syariah ke depan. Kapasitas pembiayaan atau pendanaan yang terbatas pada bank-bank syariah kecil (khususnya KBMI 1-Bank Umum Swasta Nasional (BUSN)). Hal ini menyebabkan persaingan suku bunga pendanaan yang kemudian berpengaruh pada kondisi likuiditas dan profitabilitas bank. Selain itu, berlanjutnya upaya perbaikan kualitas kredit segmen UMKM non-KUR selama 2024 sehingga memengaruhi minat pada pembiayaan UMKM.

Boks 4.2

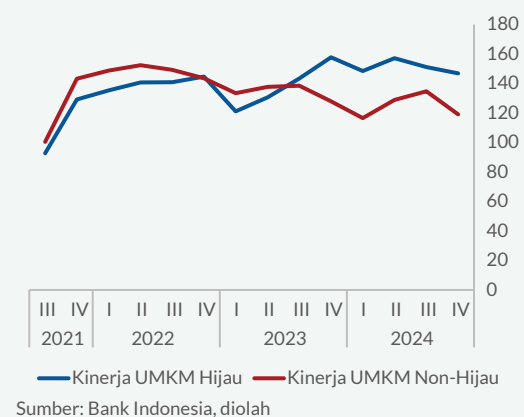
Inisiatif UMKM Hijau Bank Indonesia

Di tengah isu perubahan iklim dan pemanasan global, pengembangan UMKM ke depan menghadapi tantangan dari sisi aspek keberlanjutan. Preferensi masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan dan inklusif semakin meningkat, termasuk perhatian atas aspek perlindungan anak dan kaum disabilitas. Sementara itu, UMKM dengan kapasitas untuk menyesuaikan model bisnis sesuai prinsip keberlanjutan masih terbatas. Ke depan, bisnis yang mengedepankan prinsip keberlanjutan berpotensi memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta mempermudah akses terhadap pasar ekspor. Oleh karena itu, Bank Indonesia turut mendorong pengembangan UMKM Hijau di Indonesia.

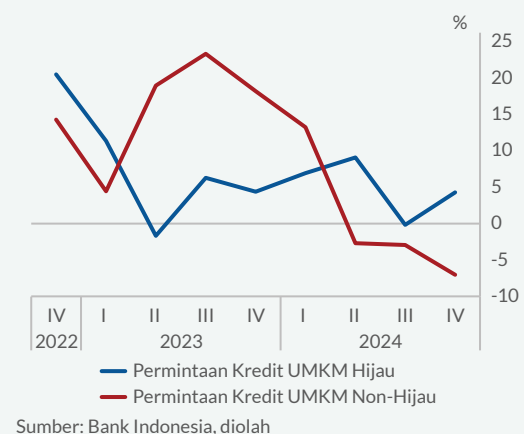
Untuk mendorong transisi hijau pada UMKM, Bank Indonesia telah meluncurkan pedoman dan model bisnis UMKM Hijau. Pedoman tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat adopsi transisi hijau, yaitu *Pra Eco-Adopter*, *Eco-adopter*, *Eco-entrepreneur*, dan *Eco-innovator*. Pengelompokan UMKM ini didasarkan pada penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah melaksanakan perluasan fasilitasi model bisnis UMKM Hijau kepada 27 UMKM yang terdiri dari 14 UMKM kerajinan dan 13 UMKM pertanian di 15 Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada tahun 2024. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa 13 UMKM berada pada tahap *pra eco-adopter* dan 14 UMKM pada tahap *eco-adopter*. Beberapa fasilitasi telah dilakukan untuk meningkatkan tahapan, seperti penerapan pertanian organik, penyusunan *sustainability report*, pengelolaan limbah, penyusunan *green SOP*, dan alokasi biaya lingkungan. Berbagai fasilitasi ini berhasil mendorong UMKM naik tahapan menjadi 11 UMKM *eco-adopter* dan 16 UMKM *eco-entrepreneur*.

Urgensi pengembangan UMKM Hijau bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar. Data menunjukkan bahwa UMKM hijau yang telah mendapatkan fasilitas model bisnis memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM nonhijau. Di tengah penurunan kinerja UMKM sepanjang 2024, indeks kinerja UMKM hijau

tercatat 146,8 lebih tinggi dibandingkan UMKM nonhijau sebesar 119 (Grafik B4.2.1.). Penguatan indeks didukung oleh kinerja penjualan ekspor maupun domestik bagi produk UMKM hijau yang tetap kuat dibandingkan UMKM nonhijau. Hal ini tidak lepas dari preferensi pasar yang telah memiliki kesadaran terhadap isu lingkungan. Peningkatan permintaan produk bagi UMKM hijau turut mendorong peningkatan ketahanan maupun permintaan kredit. Dari sisi ketahanan keuangan, likuiditas UMKM hijau lebih baik yang tercermin dari indeksnya sebesar 123,2 lebih baik dibandingkan UMKM nonhijau sebesar 106,2. Dari sisi permintaan pembiayaan, hasil survei juga menunjukkan bahwa UMKM hijau cenderung memiliki kebutuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan UMKM nonhijau (Grafik B4.2.2.).



Grafik B4.2.1. Indeks Kinerja UMKM Hijau dan Nonhijau



Grafik B4.2.2. Permintaan Kredit UMKM Hijau dan Nonhijau



BANK INDONESIA

Bab 5

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL MENJAGA KETAHANAN DAN MENDORONG INTERMEDIASI

Kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth) dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Optimalisasi instrumen kebijakan makroprudensial terus dilakukan selama 2024 sampai dengan awal 2025, antara lain melalui penguatan KLM untuk mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, instrumen kebijakan makroprudensial lainnya seperti kebijakan Countercyclical Capital Buffer (CcyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti, dan uang muka KKB/PKB, tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit. Sementara itu, fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit tetap diberikan melalui implementasi rasio PLM. Penetapan kebijakan RPLN juga dilakukan guna memperkuat pendanaan luar negeri jangka

pendek bank untuk mendukung kecukupan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menindaklanjuti amanat UU P2SK, Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat area kebijakan termasuk yang terkait dengan kebijakan makroprudensial.

Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas sektor keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Sinergi kebijakan nasional untuk sektor keuangan dilakukan melalui KSSK dalam rangka memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu SSK. Sinergi dan koordinasi antarotoritas sektor keuangan dengan OJK dan LPS juga terus dilakukan secara kontinu dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional di area makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

5.1 Kebijakan Makroprudensial Tetap Longgar

Di tengah dinamika perekonomian global dan rambatannya kepada ekonomi domestik, kebijakan makroprudensial tetap longgar selama 2024 untuk mendorong pertumbuhan kredit dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Penetapan kebijakan makroprudensial longgar didasari Siklus Keuangan Indonesia (SKI) yang saat ini masih berada di bawah kapasitas pembiayaan optimalnya sehingga pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong. Pertumbuhan kredit juga didukung ketahanan bank yang baik, tecermin dari ISSK yang berada pada zona Normal.

Selama 2024, Bank Indonesia terus meningkatkan efektivitas berbagai instrumen kebijakan makroprudensial untuk mencapai sasaran pembiayaan yang optimal, sistem keuangan yang berdaya tahan, dan keuangan yang inklusif dan hijau. Dalam kaitan dengan sasaran pertama, yaitu pembiayaan yang optimal, Bank Indonesia kembali memperkuat KLM pada pertengahan 2024 dan awal 2025 untuk pembiayaan kepada sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan pelanggaran LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan uang muka KKB/PKB dan mempertahankan kebijakan RIM. Pada 2024, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan RPLN untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian. PLM dipertahankan pada level yang akomodatif dan rasio CCyB dipertahankan sebesar 0%, guna mendukung sasaran kedua, yaitu sistem keuangan yang stabil. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian sasaran yang ketiga, Bank Indonesia melanjutkan implementasi kebijakan RPIM dalam rangka mendorong inklusi keuangan.

Bank Indonesia melakukan evaluasi berkala terhadap KLM dan terus melakukan reformulasi untuk memperkuat efektivitas implementasi KLM. KLM dengan implementasi kali pertama pada 2022, merupakan kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan bertujuan memitigasi dampak negatif dari intermediasi yang rendah terhadap stabilitas sistem keuangan. Insentif KLM diberikan kepada bank dalam bentuk pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Sejak 1 Juni 2024, Bank Indonesia melakukan

penguatan KLM melalui penambahan sektor baru yang merupakan sektor pendukung program Pemerintah atau sektor dengan daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, penyesuaian distribusi alokasi insentif KLM pada sektor yang lebih mendukung pertumbuhan, dan tambahan alokasi insentif KLM sebesar 0,2% pada bank dengan kontribusi pertumbuhan kredit yang tergolong tinggi. Penyesuaian distribusi alokasi insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bank terhadap insentif KLM sehingga meningkatkan minat perbankan untuk menyalurkan kredit pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian.

Terhitung sejak 1 Januari 2025, KLM kembali diperkuat yang diarahkan untuk meningkatkan kredit perbankan kepada sektor prioritas serta mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sektor prioritas yang tercakup dalam KLM difokuskan pada sektor tertentu dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta mempertimbangkan keterhubungan *backward-forward linkages* di antara sektor tersebut. Prinsip penguatan kebijakan KLM untuk mendukung peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, yang dilakukan selaras dan tersinergi dengan kebijakan dan program Asta Cita Pemerintah. Cakupan sektor dimaksud disesuaikan menjadi tiga kelompok. Pertama adalah sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan. Kelompok kedua adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kelompok ketiga adalah sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan perumahan rakyat. Untuk cakupan kredit berwawasan lingkungan, dilakukan perluasan sektor berupa penambahan subsektor terkait pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Selain itu, penguatan KLM dilakukan dengan penyesuaian besaran insentif. Insentif KLM untuk sektor dengan serapan tenaga kerja yang lebih tinggi ditetapkan lebih besar. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor tersebut, sehingga pada akhirnya dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. Perhitungan insentif KLM atas penyaluran kredit

kepada sektor prioritas didasarkan pada nilai rata-rata pertumbuhan kredit dan nilai rata-rata pangsa kredit bank kepada masing-masing kelompok sektor prioritas. Selanjutnya, untuk memberikan dukungan lebih kepada bank dengan pangsa kredit dan pertumbuhan kredit yang tinggi, terdapat tambahan insentif KLM sebesar 0,3%. Secara keseluruhan, besaran total insentif KLM untuk setiap bank adalah tetap, yaitu paling tinggi sebesar 4%.

Dalam rangka terus mendorong penyaluran kredit inklusif, termasuk kredit kepada UMKM, dilakukan penyesuaian kriteria perolehan insentif KLM atas penyaluran kredit inklusif berdasarkan pencapaian RPIM. Bank dengan pencapaian RPIM paling sedikit sebesar 5% dapat memperoleh insentif KLM. Bank dengan pencapaian RPIM yang tinggi ($\geq 30\%$), akan memperoleh tambahan insentif KLM sebesar 0,3% sepanjang besaran insentif KLM secara keseluruhan belum mencapai 4%. Sementara itu, besaran KLM yang berasal dari penyaluran kredit kepada usaha ultra mikro dan yang berasal dari penyaluran kredit berwawasan lingkungan masing-masing paling tinggi sebesar 0,3% dan 0,5%. Dengan adanya kebijakan insentif KLM, perbankan diharapkan dapat lebih meningkatkan penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi target KLM. Selengkapnya terkait besaran insentif dapat dilihat pada boks 6.1.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan RPLN untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank untuk mendukung kebutuhan pembiayaan bagi perekonomian nasional, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal Bank Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan luar negeri jangka pendek bank agar dapat mendukung kebutuhan pembiayaan bagi perekonomian nasional. Dalam mengemban fungsi intermediasi, sumber pendanaan luar negeri jangka pendek tersebut dapat digunakan bank untuk mengoptimalkan kredit ke berbagai kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan RPLN mengatur batas maksimum rasio kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap modal bank yang dapat disesuaikan dengan besaran parameter kontrasiklikal Bank Indonesia. RPLN ditetapkan paling tinggi 30% dengan parameter kontrasiklikal sebesar 0%. Besaran parameter kontrasiklikal bersifat dinamis dengan



mempertimbangkan asesmen terhadap siklus keuangan, faktor eksternal, risiko stabilitas sistem keuangan, dan/atau kondisi lainnya yang relevan. Besaran parameter kontrasiklikal dievaluasi secara berkala oleh Bank Indonesia. Selain pengaturan mengenai aspek kontrasiklikal, penguatan RPLN juga dilakukan melalui tambahan ketentuan terkait cakupan RPLN. Implementasi RPLN oleh perbankan perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain mencakup manajemen risiko kredit dan risiko pasar, serta permodalan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan minimum uang muka untuk KKB/PKB. Kebijakan ini dilanjutkan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan sektor otomotif yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian dengan mempertahankan minat dan daya beli masyarakat dalam membeli properti dan kendaraan bermotor. Rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti tetap longgar, yaitu paling tinggi 100% untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF terhadap total kredit/pembiayaan secara bruto di bawah 5% dan rasio NPL/NPF terhadap total kredit/pembiayaan properti secara bruto di bawah 5%. Selain itu, uang muka KKB/PKB juga tetap longgar yaitu paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF terhadap total kredit/pembiayaan secara bruto di bawah 5% dan rasio NPL/NPF terhadap total KKB/PKB secara neto di bawah 5%. Pelonggaran LTV/FTV dan uang muka ini telah diimplementasikan sejak 2021 dan akan berlaku hingga 31 Desember 2025. Pada 2024, penerapan LTV/FTV dan uang muka longgar telah turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan KPR dan KKB, masing-masing sebesar 10,15% dan 8,46%. Dengan dilanjutkannya pelonggaran rasio LTV/FTV dan uang muka, diharapkan KPR dan KKB dapat terus mencapai pertumbuhan yang tinggi (Tabel 5.1.1).

Bank Indonesia mempertahankan kebijakan CCyB, RIM yang longgar dalam rangka terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. CCyB²³ dipertahankan sebesar 0% dengan mempertimbangkan kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan belum terdapat indikasi adanya pertumbuhan kredit berlebihan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Hal ini juga didukung dengan tingginya permodalan bank dan risiko kredit (NPL) yang terjaga rendah, sehingga bank tidak diwajibkan untuk membentuk

23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.

Tabel 5.1.1. Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti dan Kredit/Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan

Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti										Rasio LTV/FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan											
	Memenuhi Kriteria NPL/ NPF				Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF							Memenuhi Kriteria NPL/ NPF				Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF					
	KP & PP Bdsr Akad Murabahah & Akad Istishna		PP Bdsr Akad MMQ & Akad IMBT		KP & PP Bdsr Akad Murabahah & Akad Istishna		PP Bdsr Akad MMQ & Akad IMBT					KP & PP Bdsr Akad Murabahah & Akad Istishna		PP Bdsr Akad MMQ & Akad IMBT							
Fasilitas ke..	1	≥ 2	1	≥ 2	1	2	≥ 3	1	2	≥ 3	Fasilitas ke..	1	≥ 2	1	≥ 2	1	2	≥ 3	1	2	≥ 3
Rumah Tapak										Rumah Tapak											
Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Rumah Susun										Rumah Susun											
Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Tipe > 70	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%
Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Tipe > 21 - 70	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%	Tipe ≤ 21	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
Ruko / Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%	Ruko / Rukan	100%	100%	100%	100%	95%	90%	90%	95%	90%	90%

*) Kriteria NPL/NPF: 1. Rasio Kredit/Pembiayaan bermasalah secara bruto < 5% (lima persen); dan
2. Rasio KP/PP bermasalah secara bruto < 5% (lima persen)

Jenis Kendaraan	Uang Muka Kendaraan Bermotor Tidak Berwawasan Lingkungan				Uang Muka Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan			
	NPL memenuhi persyaratan*		NPL tidak memenuhi persyaratan*		NPL memenuhi persyaratan*		NPL tidak memenuhi persyaratan*	
Roda Dua	0%		10%		0%		10%	
RodaTiga/Lebih (nonproduktif)	0%		10%		0%		10%	
Roda Tiga/Lebih (produktif)	0%		5%		0%		5%	

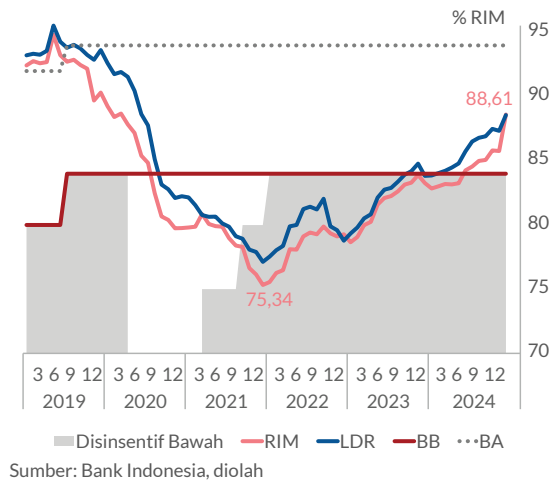
*) Kriteria NPL/NPF:
Rasio kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5%; dan
Rasio kredit kendaraan bermotor bermasalah atau rasio pembiayaan bermotor bermasalah secara neto kurang dari 5%
Sumber: Bank Indonesia, diolah

tambahan (*buffer*) modal. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit.

RIM merupakan salah satu instrumen makroprudensial yang bertujuan untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, melalui pencapaian kredit atau pembiayaan yang optimal. Kisaran RIM dipertahankan pada 84-94% untuk terus mendorong pertumbuhan kredit. Bank dengan RIM di bawah kisaran target dikenai kewajiban pemenuhan giro RIM dengan memerhatikan rasio NPL/NPF dan nilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank. Sepanjang semester II 2024, RIM perbankan dalam tren meningkat dengan pencapaian pada Desember 2024 sebesar 86,14% (Grafik 5.1.1), meningkat dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 82,10%.

Dalam rangka mencapai sasaran ketahanan sistem keuangan, kebijakan PLM²⁴ diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kecukupan likuiditas perbankan. PLM memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi perbankan dalam penyaluran kredit dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Rasio PLM untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dipertahankan sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%. Sementara itu, rasio PLM Syariah untuk Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. PLM/PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga atau surat berharga syariah Rupiah yang dimiliki BUK/BUS yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter (OM) atau OM Syariah. Secara keseluruhan, surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/PLM Syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SBI Syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, SRBI, Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan SBN. Sampai

24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyalangan Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023.



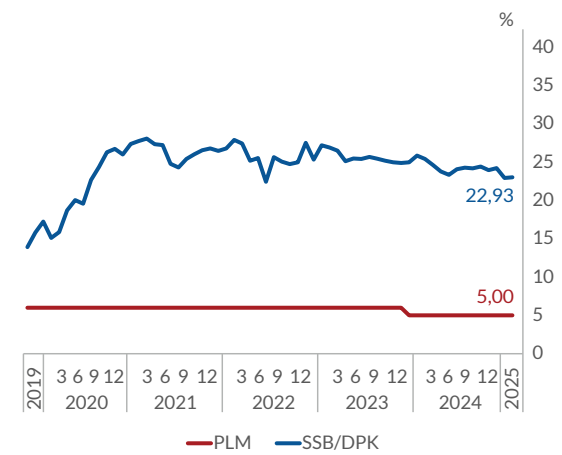
Grafik 5.1.1. Rasio Intermediasi Makroprudensial Perbankan

dengan Desember 2024, bank memiliki rasio PLM tinggi sebesar 24,38%, naik dibandingkan posisi Juni 2024 sebesar 24,08% (Grafik 5.1.2).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan pembiayaan inklusif, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan RPIM²⁵. Kebijakan RPIM bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi UMKM dan PBR. Implementasi kebijakan RPIM turut

25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

mempertimbangkan perbedaan keahlian dan model bisnis antar bank sehingga kewajiban pemenuhan RPIM didasarkan pada target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank. Pemenuhan RPIM dapat dilakukan melalui tiga modalitas. Pertama, pemberian kredit secara langsung dan rantai pasok. Kedua, pemberian kredit melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha, serta yang ketiga adalah pembelian surat berharga pembiayaan inklusif. Selain itu, Bank Indonesia memberikan insentif KLM atas pencapaian RPIM dengan *threshold* tertentu dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan inklusif, termasuk kepada UMKM.



Grafik 5.1.2. Grafik SSB/DPK dan PLM

5.2 Sinergi Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka menjaga sistem keuangan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, tugas utama KSSK mencakup koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, dan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan meliputi area fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, infrastruktur keuangan, dan resolusi bank. Setiap lembaga anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai protokol manajemen krisis masing-masing lembaga dan menyampaikan hasilnya dalam rapat KSSK, baik pada rapat berkala maupun rapat sewaktu-waktu. Pemahaman atas hasil pemantauan stabilitas sistem keuangan tersebut menjadi landasan KSSK dalam menentukan status stabilitas sistem keuangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan termasuk sinergi lintas otoritas dalam rangka mendukung ketahanan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, KSSK menyelenggarakan kegiatan berkala terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang melibatkan otoritas sektor keuangan terkait.

Seluruh lembaga anggota KSSK berkomitmen untuk terus menjaga SSK dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui bauran kebijakan lintas lembaga. Otoritas keuangan melaksanakan kebijakan sesuai mandat dan wewenangnya untuk memastikan pencapaian sasaran setiap lembaga dan melakukan koordinasi antarlembaga anggota KSSK untuk memastikan pencapaian tujuan bersama. Kemenkeu mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai *shock absorber* di tengah gejolak perekonomian global. OJK selaku pengawas mikroprudensial terus menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan sektor jasa keuangan agar tumbuh sehat dan berkesinambungan melalui penguatan pengaturan sektor keuangan dan upaya lainnya. LPS terus diarahkan untuk mendukung

terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja ekonomi nasional antara lain dengan memastikan kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap Tingkat Bunga Penjaminan. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan Asta Cita. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia melalui *bilateral buyback/debt switching*. Kedua, dukungan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam kerangka Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketiga, mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM ke sektor prioritas, antara lain sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Konstruksi, *Real Estate*, Perumahan Rakyat, serta pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan untuk akselerasi transformasi digital Pemerintah pada program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dan sektor transportasi, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, telah diselesaikan berbagai peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari UU P2SK. Sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan, antara lain ketentuan mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan makroprudensial, kebijakan pengendalian moneter, pasar uang dan pasar valuta asing, pengelolaan lalu lintas devisa, serta kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia telah mengharmonisasikan berbagai kebijakannya dengan otoritas terkait, antara lain dengan OJK. Beberapa kebijakan yang memiliki irisan kebijakan makroprudensial-mikroprudensial yang telah diselaraskan dengan OJK mencakup KLM, RPLN, serta ketentuan LTV/FTV dan uang muka. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan antara otoritas makroprudensial dan otoritas mikroprudensial. Sementara itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan harmonisasi terhadap kebijakan OJK seperti Rancangan Peraturan OJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, sehingga dapat mendorong kredit/pembiayaan perbankan utamanya terkait dengan pembiayaan inklusif. Lebih lanjut, secara bilateral, Bank Indonesia dan OJK secara berkala melaksanakan *joint stress test* guna menguji ketahanan perbankan terhadap berbagai skenario risiko yang dapat menyebabkan kebijakan intermediasi tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Bank Indonesia, OJK dan LPS berkoordinasi secara intensif dalam kerangka integrasi pelaporan perbankan untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan masing-masing lembaga. Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data, efisiensi pelaporan industri perbankan, serta memperkuat pertukaran informasi antar lembaga untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, sebagai salah satu tindak lanjut dari

UU P2SK, ketiga lembaga juga terus berkoordinasi dalam penetapan dan pemutakhiran metodologi bank sistemik secara berkala.

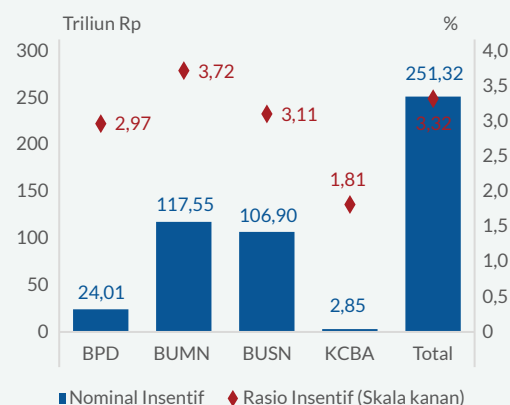
Untuk meningkatkan efektivitas upaya memperkuat SSK domestik yang berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan otoritas dan forum internasional di area makroprudensial dan SSK. Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai kerja sama dan forum internasional strategis, di antaranya Financial Stability Board (FSB) dan Basel Committee on Banking Supervision. Pertemuan FSB *Plenary* Desember 2024 berfokus pada berbagai isu utama stabilitas sistem keuangan global, di antaranya *outlook* stabilitas keuangan global di tengah peningkatan tensi geopolitik dan implikasi kebijakan *high for longer*, digitalisasi di sektor keuangan, serta risiko iklim. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan peran serta dalam mendukung peningkatan efektivitas dan penguatan pengaturan, pengawasan, dan praktik prudensial perbankan global. Dalam rangka menunjukkan kepemimpinan di kawasan regional, Bank Indonesia melalui kapasitasnya sebagai Ketua dalam forum Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks dan Working Group on Banking Supervision periode 2024-2026, juga senantiasa mendorong pembahasan isu dan sinergi antar bank sentral dan otoritas keuangan kawasan Asia Pasifik dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, inovasi kebijakan, dan penguatan praktik pengawasan sektor perbankan.

Boks 5.1

Penguatan KLM Juni 2024 Berdampak pada Peningkatan Likuiditas

Bank Indonesia melakukan penguatan KLM dalam rangka mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor berdaya ungkit tinggi bagi perekonomian. Penguatan KLM yang efektif berlaku pada Juni 2024, ditempuh melalui tiga strategi utama, yaitu perluasan sektor, penambahan sektor baru, dan penyesuaian distribusi alokasi insentif KLM. *Pertama*, perluasan sektor KLM dilakukan melalui penambahan cakupan pada sektor hilirisasi, perumahan, dan pariwisata. Misalnya, cakupan pada sektor hilirisasi diperluas dengan sektor hilirisasi komoditas buah-buahan dan karet. *Kedua*, penambahan sektor baru yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian dan mendukung program Pemerintah. Sektor baru tersebut mencakup sektor Perdagangan, LGA, otomotif, dan jasa sosial. *Ketiga*, penyesuaian alokasi distribusi insentif KLM dalam bentuk penyesuaian *tiering* dan peningkatan besaran insentif KLM sektoral. Penguatan ini dilakukan agar insentif KLM dapat lebih diakses oleh perbankan.

Penguatan KLM meningkatkan likuiditas perbankan dalam mendukung pertumbuhan kredit. Sampai dengan akhir Desember 2024, insentif KLM yang diterima perbankan adalah sebesar Rp251,3 triliun, lebih tinggi sekitar Rp88 triliun jika dibandingkan dengan insentif KLM Desember 2023 sebesar Rp163,2 triliun.

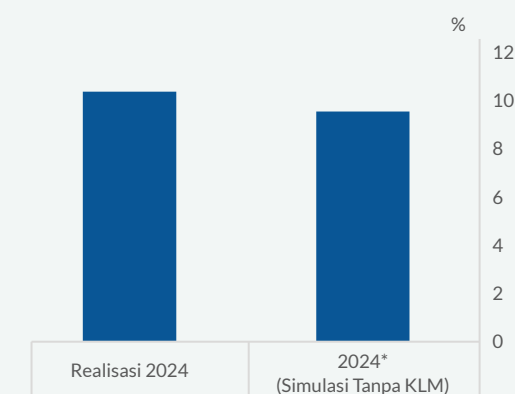


Grafik B5.1.1. Insentif Berdasarkan Kelompok Bank

Berdasarkan kelompok bank, mayoritas penerima insentif KLM adalah kelompok bank BUMN dan BUSN dengan masing-masing insentif KLM sebesar Rp117,5 triliun dan Rp106,9 triliun. Sementara itu, insentif KLM kelompok BPD dan KCBLN relatif lebih kecil, yaitu masing-masing sebesar Rp24,0 triliun dan Rp2,9 triliun. Secara individu, mayoritas bank juga telah mendapatkan insentif KLM yang tinggi, yaitu kisaran 2-3% sebanyak 46 bank dan 3-4% sebanyak 45 bank (Grafik B5.1.1).

Insentif KLM telah dimanfaatkan bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan. Hasil estimasi yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan bahwa insentif KLM mendorong tambahan peningkatan pertumbuhan kredit sekitar 0,8% sehingga realisasi pertumbuhan kredit 2024 dapat mencapai 10,38%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 9,57% (Grafik B5.1.2).

Selain itu, bank juga mengafirmasi bahwa tambahan likuiditas tersebut telah mampu membantu bank menyalurkan kredit yang lebih tinggi. Ke depan, guna terus memperkuat efektivitas KLM, Bank Indonesia akan terus melakukan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha, sehingga implementasi KLM dapat optimal mendukung peningkatan kredit bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.



Grafik B5.1.2. Simulasi Kredit Perbankan Tanpa KLM

Boks 5.2

Penguatan Kerangka Kebijakan Makroprudensial sebagai Dukungan terhadap Implementasi UU P2SK

UU P2SK yang disahkan pada awal tahun 2023 telah memperkuat landasan hukum dan memberikan penegasan kewenangan terkait tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan UU P2SK adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas SP, dan turut menjaga SSK, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK dimaksud, Bank Indonesia memperkuat transformasi kebijakan melalui penerbitan PBI Bauran Kebijakan Bank Indonesia pada Juli 2024.

Tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial diatur lebih lanjut dalam UU P2SK. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan makroprudensial, pengawasan makroprudensial, pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan

fungsi *lender of the last resort*, *reverse repo* dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh LPS pada saat LPS memerlukan likuiditas, dan koordinasi dengan otoritas terkait.

Selama semester II 2024 Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan transformasi di area kebijakan untuk mendukung implementasi UU P2SK. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia telah melakukan penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial melalui penerbitan PBI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial. Dalam PBI tersebut ditegaskan bahwa kebijakan makroprudensial merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kredit/pembiayaan yang optimal, sistem keuangan yang stabil, dan keuangan yang inklusif dan hijau. Kredit/pembiayaan yang optimal tecermin dari kredit/pembiayaan yang tumbuh secara berkualitas dengan tetap menjaga SSK dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang stabil tecermin dari terkendalinya risiko perbankan terutama pada bank-bank besar. Sementara itu, keuangan yang inklusif dan hijau tecermin dari berkembangnya kredit/pembiayaan inklusif dan hijau. Penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial juga mencakup perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi terkait kebijakan makroprudensial.



BANK INDONESIA

Bab 6

OUTLOOK INTERMEDIASI DAN ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Prospek ekonomi domestik pada 2025 diperkirakan tetap baik di tengah prospek ekonomi global yang masih diwarnai dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 3,2% pada 2025, sama dengan pertumbuhan pada 2024. Pertumbuhan 2025 tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan tetap kuat, kendati dibayangi risiko pemanasan ekonomi akibat kenaikan defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,7-5,5%, didukung oleh terjaganya permintaan domestik, kenaikan investasi, dan tetap baiknya ekspor. Nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik. Bauran kebijakan Bank Indonesia akan dioptimalkan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Intermediasi keuangan pada 2025 diperkirakan meningkat didukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Permintaan kredit korporasi yang meningkat dan kredit RT kelas atas yang terjaga mendukung optimisme pertumbuhan kredit 2025. Selain itu, optimisme ini didukung prospek perekonomian domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga, dan terbukanya ruang penurunan suku bunga kebijakan

Bank Indonesia. Ketahanan perbankan dan kapasitas pembiayaan diperkirakan terjaga didukung permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai dengan dukungan kebijakan likuiditas makroprudensial, dan risiko kredit yang membaik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2025 dalam kisaran target 11-13%. Prospek pertumbuhan kredit inklusi pada 2025 diperkirakan akan melanjutkan perbaikan. Namun demikian, terbatasnya pertumbuhan pendanaan dan tidak meratanya sebaran alat likuid perbankan menjadi tantangan utama untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2025.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga SSK. Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh melalui instrumen kebijakan yang mendukung pertumbuhan kredit optimal, yaitu penguatan KLM sejak 1 Januari 2025, mempertahankan rasio CCyB, RIM yang akomodatif, LTV dan uang muka yang longgar, serta RPLN untuk memperkuat pendanaan bank. Selain itu, instrumen kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong pembiayaan inklusif melalui instrumen PLM dan RPIM. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dukungan terhadap keberhasilan program Asta Cita Pemerintah.

6.1 Ekonomi Domestik Diprakirakan Tetap Baik di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Perekonomian dunia pada 2025 diprakirakan masih akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Tantangan ekonomi dan keuangan global pada 2024 diprakirakan masih akan berlanjut pada 2025. Ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% pada 2025, sebelum melambat menjadi 3,1% pada 2026. Ketegangan kondisi geopolitik yang disertai meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia akan mendorong divergensi pertumbuhan ekonomi antarnegara. Ekonomi AS diprakirakan tetap kuat pada 2025, kendati dibayangi risiko pemanasan ekonomi akibat membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kawasan Eropa cenderung melambat akibat lemahnya permintaan domestik dan menurunnya ekspor akibat pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara berkembang lainnya masih cukup baik, didukung oleh terjaganya permintaan domestik di tengah tantangan ekspor akibat perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Kendati menurun, inflasi global diprakirakan tetap tinggi pada level 4,5% pada 2025 dan 4,2% pada 2026. Prospek tetap tingginya inflasi global ini dipengaruhi potensi dampak perang dagang antara AS dan sejumlah mitra dagang utama terhadap kenaikan barang impor (*imported inflation*) dan gangguan rantai pasok perdagangan global. Berbagai perkembangan global tersebut memerlukan penguatan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik yang terjaga dan potensi kinerja ekspor yang membaik. Pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan stabil dibandingkan dengan 2024, dalam kisaran 4,7-5,5%, didukung peningkatan kinerja investasi dan terjaganya konsumsi RT, khususnya kelas menengah ke atas. Sementara itu, kinerja ekspor yang menopang pertumbuhan pada 2024 diprakirakan tetap baik pada 2025, diperkuat dengan prospek kenaikan harga komoditas. Berdasarkan LU, prospek LU Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan tetap tumbuh baik. Sementara secara spasial, pertumbuhan yang baik diprakirakan terjadi

di hampir seluruh wilayah, terutama Sumatera dan Jawa sejalan dengan perbaikan permintaan domestik dan diversifikasi pasar ekspor.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Memasuki awal 2025, tekanan mata uang dolar AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14% *ptp* dari level nilai tukar pada akhir 2024, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), serta memperkuat efektivitas kebijakan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2025 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi *volatile food* diprakirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Sementara inflasi *administered prices* juga terjaga sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan sebagai *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.2

Potensi Pertumbuhan Kredit Perbankan Seiring Terjaganya Makroekonomi Domestik

Prospek penyaluran kredit perbankan diperkirakan tetap tumbuh kuat untuk mendukung pembiayaan perekonomian. Kredit diperkirakan tumbuh meningkat dalam kisaran sebesar 11-13% pada 2025 dan 2026. Optimisme pertumbuhan kredit didukung oleh prospek perekonomian domestik yang tetap baik serta perbaikan harga komoditas. Kinerja penjualan dan belanja modal (*capital expenditure*) korporasi yang membaik akan mendorong perbaikan kinerja keuangan dan kenaikan permintaan kredit. Kredit modal kerja diperkirakan menjadi pendorong utama kredit, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk keberlanjutan produksi dan penjualan korporasi. Di sisi kredit konsumsi, pertumbuhan kredit diperkirakan akan tetap berkontribusi oleh pertumbuhan KPR dan KKB, terutama dari permintaan kredit RT kelas atas.

Prospek pertumbuhan kredit 2025 didukung penurunan BI Rate dan penguatan KLM. Dari sisi penawaran, perbankan tetap memiliki ketahanan yang baik untuk menopang berlanjutnya pertumbuhan kredit. Ketahanan ini didukung masih memadainya likuiditas perbankan dan longgarnya minat pembiayaan perbankan yang mendukung realokasi alat likuid ke kredit. Terbukanya ruang penurunan BI Rate ke depan akan memberikan insentif bagi bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan menurunkan biaya dana. Lebih lanjut, kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit turut diperkuat dengan insentif likuiditas KLM. Sejak 1 Januari 2025, implementasi KLM diperkuat dan diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit kepada sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Cakupan sektor prioritas dimaksud, antara lain sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Konstruksi, serta *Real Estate* dan perumahan rakyat. Dukungan kebijakan ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk tetap mendukung pertumbuhan kredit 2025 dengan tetap menjaga SSK.

Melemahnya daya beli RT kelas menengah-bawah dan kinerja UMKM diperkirakan menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan pertumbuhan kredit ke depan. Pelemahan daya beli RT kelas menengah-bawah diperkirakan berdampak pada permintaan kredit yang lebih terbatas dengan dampak rambatan pada kinerja UMKM. Hal ini sejalan dengan posisi masyarakat menengah-bawah yang merupakan segmen utama konsumen UMKM. Bank diperkirakan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitur UMKM sebagai upaya untuk menjaga kualitas kredit. Ke depan, berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain optimalisasi penyaluran KUR, kebijakan hapus tagih kredit UMKM, maupun skema kredit investasi padat karya untuk UMKM diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perbaikan kinerja UMKM. Prospek pertumbuhan kredit inklusi pada 2025 diperkirakan akan melanjutkan perbaikan.

Di sisi penawaran, pertumbuhan pendanaan dan likuiditas perbankan menjadi faktor penting untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan kredit 2025. Intermediasi perbankan pada 2024 menghadapi beberapa tantangan, antara lain terbatasnya pertumbuhan sumber pendanaan dan tidak meratanya kepemilikan alat likuid. Terbatasnya pertumbuhan pendanaan bank tecermin dari moderatnya pertumbuhan DPK sehingga berdampak pada penurunan alat likuid dan kapasitas pembiayaan bank, serta perlunya dukungan proses realokasi alat likuid ke kredit. Selain itu, bank dihadapkan pada tantangan sebaran alat likuid antarbank yang belum merata, kendati alat likuid perbankan berada pada tingkat memadai di level agregat. Beberapa bank dengan alat likuid melimpah masih cenderung menahan pertumbuhan kreditnya, sedangkan alat likuid di sejumlah bank dengan pertumbuhan kredit tinggi berada dalam tren penurunan. Sehingga, untuk mencapai target kredit 2025 dibutuhkan dukungan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan dengan kementerian dan otoritas terkait.

6.3 Arah Kebijakan: Penguatan Kebijakan Makroprudensial *Pro-growth*

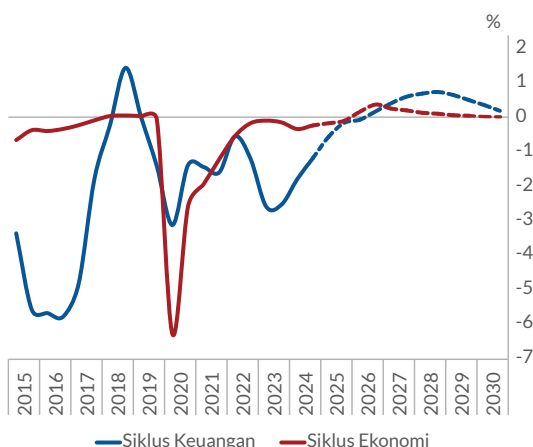
Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial longgar pada 2025 sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Di tengah ketidakpastian global, Bank Indonesia mendorong optimisme sektor keuangan dan sektor riil dengan bauran kebijakan makroprudensial *pro-growth* dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi siklus keuangan pada 2025-2026 yang masih berada di bawah kapasitas pembiayaan optimal (Grafik 6.3.1). Siklus keuangan diperkirakan belum mencapai puncaknya hingga 2028, sehingga masih dapat mendukung peningkatan kredit lebih lanjut. Kebijakan makroprudensial longgar ke depan ditujukan agar selaras dengan kebijakan sektor riil dari Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan makroprudensial yang longgar juga konsisten dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dari kerentanan yang dapat muncul dari dinamika ekonomi global maupun rambatannya ke perekonomian domestik.

Kebijakan makroprudensial *pro-growth* ditempuh untuk mendorong kredit yang optimal. Dalam rangka mencapai pertumbuhan kredit yang optimal, Bank

Indonesia akan mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%, mempertahankan kebijakan RIM akomodatif dalam kisaran 84-94%, melanjutkan kebijakan LTV dan uang muka yang longgar, serta melanjutkan kebijakan RPLN dalam rangka memperkuat pendanaan perbankan. Selanjutnya, kebijakan KLM juga diperkuat untuk mendorong pembiayaan perbankan ke sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja, segmen UMKM dan ultramikro, serta sektor hijau dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Terhitung sejak 1 Januari 2025, KLM diperkuat melalui perluasan cakupan sektor dan penyesuaian distribusi besaran insentif dengan tetap mempertahankan total insentif maksimum sebesar 4%.

Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan serta mendorong pembiayaan inklusif dan hijau. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan PLM dan PLM syariah pada level yang *prudent* untuk memastikan ketahanan likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian global. Sebagai upaya mendorong pembiayaan inklusif dan hijau, Bank Indonesia melakukan evaluasi untuk memperkuat ketentuan RPIM serta tetap mempertahankan kebijakan LTV/FTV hijau dan insentif KLM untuk pembiayaan inklusif dan hijau.

Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan sinergi bauran kebijakan nasional untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Lebih dari itu, Bank Indonesia mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3.1. Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Boks 6.1

Penguatan KLM Mendorong Sektor Penciptaan Lapangan Kerja

Bank Indonesia melakukan penguatan KLM yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Penguatan KLM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan kepada sektor usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, KLM juga tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan ultramikro serta sektor hijau. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penguatan KLM dilakukan melalui penyesuaian pada tiga aspek pengaturan, yaitu cakupan sektor tertentu, cakupan kredit berwawasan lingkungan, dan besaran insentif sektoral KLM.

KLM diperkuat pada aspek cakupan sektor tertentu yang mendukung penciptaan lapangan kerja, cakupan kredit berwawasan lingkungan, dan sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor KLM yang memiliki serapan tenaga kerja tinggi, yaitu sejumlah subsektor terkait Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, Konstruksi, *Real Estate*, dan beberapa subsektor terkait kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Keseluruhan kredit kepada subsektor yang menjadi cakupan penguatan KLM memiliki pangsa sekitar 63% dari total kredit perbankan. Penguatan

cakupan sektor juga dilakukan terhadap cakupan kredit berwawasan lingkungan yang diperluas ke sektor pengadaan air serta pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dalam rangka turut mengakselerasi peran perbankan terhadap pencapaian target emisi nasional (Tabel B6.1.1).

Insentif KLM diberikan dalam besaran yang lebih tinggi kepada sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Besaran insentif untuk sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan ditetapkan maksimal sebesar 1,5%; sektor Pengangkutan dan Pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif ditetapkan maksimal sebesar 0,4%; serta sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan perumahan rakyat ditetapkan maksimal sebesar 0,3%. Penyesuaian juga dilakukan terhadap *tiering* besaran KLM. Bank dengan pertumbuhan kredit sektoral yang lebih tinggi akan mendapatkan insentif likuiditas yang lebih tinggi. Secara agregat besaran KLM tetap sebesar maksimum 4,0% (Tabel B6.1.2).

Penguatan KLM tetap memberikan insentif kepada kredit perbankan untuk sektor UMKM, UMi, dan berwawasan lingkungan (hijau). Kendati demikian, terdapat penyesuaian, antara lain pada *tiering* untuk mendapatkan insentif. Besaran

Tabel B6.1.1. Rincian Penguatan KLM Januari 2025 Dibandingkan dengan Juni 2024

Topik	Cakupan KLM Juni 2024		Cakupan Penguatan KLM Januari 2025	
Cakupan Kredit/ Pembiayaan kepada Sektor Tertentu	No	Sektor Tertentu	No	Sektor Tertentu
	1.	Sektor Hilirisasi	1.	Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan
	2.	Sektor Otomotif, Sektor Perdagangan, dan Sektor Listrik, Gas, Air, serta Sektor Jasa Sosial	2.	Sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
	3.	Sektor Perumahan	3.	Sektor Konstruksi, <i>Real Estate</i> , dan Perumahan Rakyat
	4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Cakupan Kredit/ Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	No	Sektor Tertentu	No	Sektor Tertentu
	1.	Kredit properti/pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan/atau	1.	Kredit properti/pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan/atau
	2.	Kredit kendaraan bermotor/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan	2.	Kredit kendaraan bermotor/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan
Rumus Perhitungan Pangsa Kredit/ Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	$= \frac{\text{Kredit atau Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan} + \text{Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan}}{\text{Kredit Properti atau Pembiayaan Properti} + \text{Kredit Kendaraan Bermotor atau Pembiayaan Bermotor Berwawasan Lingkungan}} \times 100\%$		$= \frac{\text{Kredit atau Pembiayaan Properti Berwawasan Lingkungan} + \text{Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan} + \text{Kredit atau Pembiayaan kepada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan}} \times 100\%$	
Besaran KLM	Maksimal 4%		TETAP	

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel B6.1.2. Besaran Insentif Sektoral KLM

Besaran Insentif KLM per Sektor		Rincian Insentif KLM per Sektor			
PEMBIAYAAN SEKTOR TK TINGGI (Maks 220 bps)	SEKTOR KAPASITAS TK TINGGI 1. Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan (Maks 150 bps) 2. Sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Maks 40 bps) 3. Sektor Konstruksi, Real Estate, & Perumahan Rakyat (Maks 30 bps)	Sektor	Nilai Rata-Rata Pertumbuhan Kredit Pembiayaan (%yoy)	KLM(%)	
				Nilai Rata-Rata Pangsa Kredit (%)	
				Di bawah/sama dengan Threshold	Di atas Threshold
PEMBIAYAAN UMKM (Maks 100 bps)	INKLUSI Pembiayaan pada sektor Inklusif, mencakup pencapaian RPIM (Maks 100 bps)	Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan	≤10%	≤10%	>10%
			≤0%	-	1,30%
			>0%-3%	1,30%	1,40%
			>3-5%	1,40%	1,50%
			>5%	1,50%	1,5%+
		Transportasi, Pergudangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	≤5%	≤5%	>5%
			≤0%	-	0,20%
			>0%-3%	0,20%	0,30%
			>3-5%	0,30%	0,40%
			>5%	0,40%	0,4%+
		Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan Rakyat	≤10%	≤10%	>10%
			≤0%	-	0,10%
PEMBIAYAAN UMI (Maks 30bps)	Pembiayaan UMi Pembiayaan pada segmen Ultra Mikro (Maks 30 bps)		>0%-3%	0,10%	0,20%
			>3-5%	0,20%	0,30%
			>5%	0,30%	0,3%+
PEMBIAYAAN HIJAU (Maks 50 bps)	Pembiayaan Hijau Pembiayaan pada KPR dan KKB Hijau, serta Daur Ulang/Limbah (Maks 30 bps)	Pencapaian RPIM		KLM (%)	
		≥5%<15%		0,80%	
		≥15%<30%		0,90%	
		≥30%		1%+	
		Pangsa Kredit/Pembiayaan UMi		KLM (%)	
		>0%		0,3%	
		Rata-Rata Pangsa Kredit/Pembiayaan Berwawasan Lingkungan		KLM (%)	
		>0%		0,5%	

Sumber: Bank Indonesia, diolah

insentif untuk sektor UMKM dan ultramikro (UMi) dipertahankan tetap, yaitu berturut-turut sebesar 1,0% dan 0,3%. Selain itu, bank memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan insentif melalui pemberlakuan batas bawah persyaratan pencapaian RPIM yang lebih rendah. Tambahan insentif juga diberikan bagi bank dengan pencapaian RPIM yang tinggi (di atas 30%), dengan mengacu bahwa maksimum besaran insentif bagi setiap individu bank tetap sebesar 4%. Besaran insentif untuk kredit kepada sektor hijau tetap dipertahankan sebesar 0,5%.

Penguatan KLM meningkatkan insentif likuiditas bagi perbankan sehingga mendukung kapasitas intermediasi ke depan. Hingga minggu kedua Januari 2025, Bank Indonesia telah menyalurkan

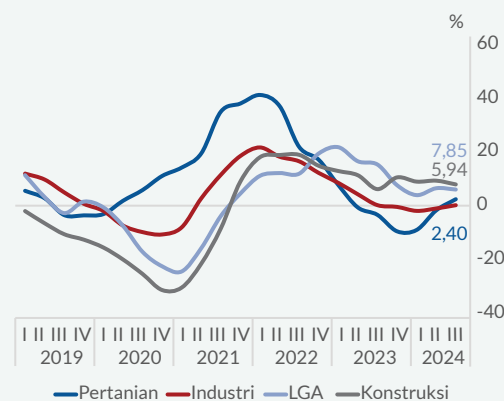
insentif KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari total insentif yang diberikan pada akhir Oktober 2024. Insentif dimaksud telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, BUSN sebesar Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan KCBLN sebesar Rp5 triliun. Tambahan kelonggaran likuiditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan minat perbankan untuk menyalurkan kredit, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, guna terus memperkuat efektivitas KLM, Bank Indonesia akan terus melakukan evaluasi dan melakukan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha.

Boks 6.2

Prospek Kredit 2025: Potensi Pembiayaan Baru dalam Mendukung Program Pemerintah “Asta Cita”

Pemerintah menyusun Asta Cita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Asta Cita terdiri dari delapan misi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, infrastruktur, hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan SDM, dan pemerataan ekonomi. Delapan misi tersebut yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas nasional jangka menengah, membutuhkan alokasi anggaran yang tepat serta penguatan koordinasi antar lembaga guna memastikan efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan.

Asta Cita diperkirakan akan memberikan dampak positif pada kinerja sektor utama dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Beberapa sektor ekonomi utama yang diperkirakan akan mendapatkan dampak positif, antara lain Konstruksi, Industri Pengolahan, Pertambangan, Pertanian, dan Ketenagalistrikan. Dampak ini kemudian berlanjut ke sektor pendukung seperti Perdagangan, *Real Estate*, Pengangkutan, dan jasa sosial melalui peningkatan permintaan barang/jasa serta rantai pasok. Kinerja empat sektor terbesar yang terdampak *first round effect* Asta Cita menunjukkan kinerja yang positif dari sisi penjualan (Grafik B6.2.1)



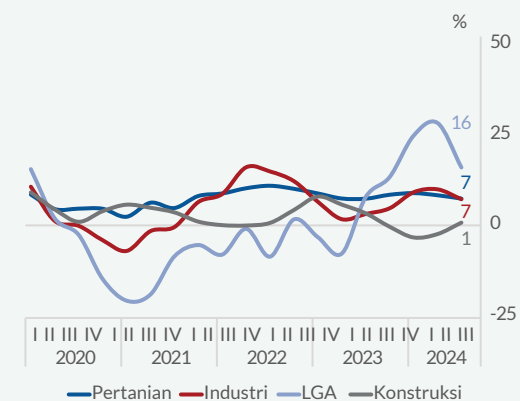
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik B6.2.1. Pertumbuhan Penjualan Tahunan Top 4 Sektor Terdampak *First Round Effect* Asta Cita

dan pertumbuhan kredit²⁶ (Grafik B6.2.2). Sektor Konstruksi yang mencatatkan pertumbuhan penjualan tertinggi pada triwulan III 2024, berpotensi semakin meningkat seiring adanya rencana proyek tiga juta rumah Pemerintah yang tertuang dalam Misi 3 Asta Cita. Pada gilirannya, kebutuhan anggaran yang meningkat berpotensi menjadi permintaan pembiayaan yang akan meningkatkan intermediasi keuangan.

Beberapa inisiatif Asta Cita dirancang untuk meningkatkan kinerja RT, termasuk kebijakan subsidi, perlindungan sosial (*perlinsos*), dan program peningkatan kualitas TK. Pada Desember 2024, realisasi anggaran *perlinsos* tercatat mencapai 91,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp496,8 triliun (Tabel B6.2.1). Sebagian besar anggaran *perlinsos* 2024 dialokasikan untuk subsidi energi dan nonenergi, program keluarga harapan, serta bantuan pangan nontunai (*sembako*). Subsidi energi meliputi listrik, BBM, dan elpiji, sementara subsidi nonenergi mencakup bantuan untuk sektor-sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Anggaran *perlinsos* 2025 diperkirakan akan tumbuh sebesar 10,4% dibandingkan dengan realisasi 2024 (Gambar B6.2.1). Peningkatan ini mencakup subsidi dan kompensasi, seperti



Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik B6.2.2. Pertumbuhan KMK Top 4 Sektor Terdampak *First Round Effect* Asta Cita

26 Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Korporasi



Gambar B6.2.1. Perlinosos 2025 dan Alokasinya

Tabel B6.2.1. Realisasi Perlinosos 2024

Program Perlindungan Sosial	Realisasi (Rp T)	% Realisasi (s.d Des 24)
PKH dan Sembako	72,3	100,2
PBI JKN	46,1	
PIP dan KIP Kuliah	29,7	
BNPB - Tanggap Bencana	4,4	
Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	1,2	25,0
Subsidi Energi	182,1	98,3
Subsidi NonEnergi	104,5	109,6
BLT Dana Desa	10,3	85,6
Total	455,9	91,8

Sumber: Kemenkeu, diolah

untuk listrik, BBM, dan elpiji, sementara jumlah penerima manfaat bansos reguler diperkirakan tetap. Program subsidi energi dan bahan pokok bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelas bawah, sehingga mereka dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli segmen ini. Selain itu, Asta Cita juga diperkirakan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara kuantitas dan kualitas, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Efektivitas perlinosos terus ditingkatkan dengan meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran, baik dengan menghindari pemberian kepada pihak yang tidak berhak maupun memastikan mereka yang berhak tidak terlewat, guna mendukung keberhasilan program. Ke depan, kebijakan perlinosos akan mengoptimalkan *database* Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS), Penysaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, memperluas cakupan bantuan sepanjang hayat untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta mendorong sinergi antarprogram. Kebijakan juga akan mempercepat graduasi kemiskinan melalui program pemberdayaan, menciptakan skema yang lebih adaptif menghadapi krisis, serta mengusulkan peningkatan nominal bansos dalam APBN 2026, termasuk kajian mengenai regionalisasi manfaat bansos dan gradasi penerimaan bansos sesuai desil RT.

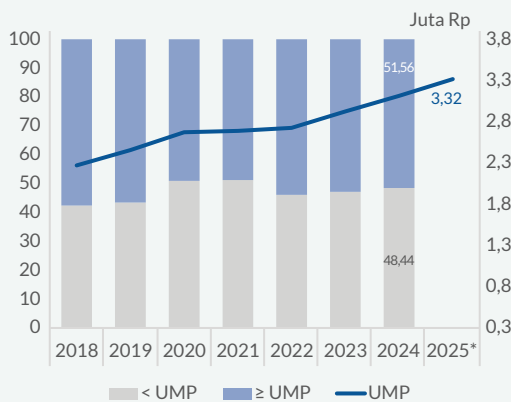
Program Asta Cita juga mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia untuk memperkuat kinerja sektor RT. Program Asta Cita 3, yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong perusahaan untuk mempekerjakan angkatan kerja muda serta mengembangkan industri kreatif dan infrastruktur. Sementara itu, Asta Cita 4 berfokus pada penguatan SDM melalui peningkatan keterampilan. Kedua program ini berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan TK di sektor padat karya melalui perbaikan formalitas pekerja serta pengaturan status karyawan tetap atau tidak tetap. Rencana untuk menempatkan angkatan kerja usia 18-24 tahun menjadi karyawan tetap diperkirakan akan berdampak pada sekitar 5,3 juta pekerja, atau sekitar 9,5% dari total pekerja yang memiliki status buruh/karyawan/pegawai, terutama di sektor industri dan perdagangan. Program ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan kesejahteraan TK, khususnya di sektor padat karya dengan memastikan pekerja memperoleh upah yang layak dan perlindungan yang lebih baik (Tabel B6.2.2).

Tabel B6.2.2. Distribusi Lapangan Kerja Berdasarkan Tipe Kontrak per Sektor Industri (2024)

Lapangan Kerja / Tipe Kontrak	PKWTT	PKWT	Lisan	Tidak Ada/Tdk Tahu/Tidak Mengungkap
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.962	83.871	103.490	322.006
Pertambangan dan Penggalian	15.478	62.969	11.473	62.854
Industri Pengolahan	299.049	1.321.446	232.482	645.490
Pengadaan Listrik dan Gas	12.688	12.747	8.052	16.083
Pengadaan Air;	1.788	9.661	3.800	6.012
Konstruksi	19.692	79.170	123.570	237.585
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	182.419	704.148	432.729	1.085.295
Transportasi dan Pergudangan	48.909	189.615	47.555	145.452
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71.295	297.968	198.962	430.448
Informasi dan Komunikasi	19.904	61.622	23.026	65.493
Jasa Keuangan dan Asuransi	41.980	162.776	74.836	95.390
Real Estat	4.416	19.069	22.701	7.564
Jasa Perusahaan	32.012	153.154	38.235	95.390
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	82.004	241.936	2.051	4.843
Jasa Pendidikan	84.199	352.518	81.785	165.758
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35.776	125.996	16.072	43.283
Jasa Lainnya	17.530	69.012	101.398	166.749
Jumlah	1.000.518	3.884.708	1.435.088	3.554.273

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah

Sementara itu, program Asta Cita 7 mendukung reformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan penghasilan yang layak bagi tenaga kerja dan perbaikan sistem birokrasi, salah satunya melalui kenaikan UMP. Meskipun kenaikan UMP pada 2025 diperkirakan memberikan dampak positif, peningkatan inflasi yang lebih tinggi dapat membatasi dampak terhadap kenaikan upah riil. Perlu dicatat bahwa kenaikan UMP ini hanya berdampak pada tenaga kerja formal, sementara sekitar 48% pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai masih digaji di bawah UMR (Grafik B6.2.3).



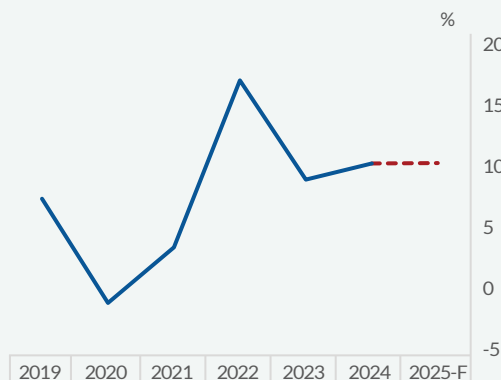
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik B6.2.3. Distribusi Pekerja Berdasarkan Status Gaji di Bawah dan di Atas UMP

Pertumbuhan kredit konsumsi RT pada 2025 diperkirakan stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh program Asta Cita. Program Asta Cita 3 yang fokus pada lapangan kerja berkualitas, Asta Cita 4 untuk penguatan SDM, dan Asta Cita 7 yang mendukung reformasi ketenagakerjaan diharapkan mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, *downside factors* seperti kondisi segmen menengah-bawah yang masih tertekan dan ketatnya standar kredit oleh perbankan dapat memengaruhi pertumbuhan kredit konsumsi RT. Sebagai respons, perbankan cenderung mengalihkan fokus penyaluran kredit ke segmen kelas atas yang memiliki daya beli lebih stabil. Kredit konsumsi RT diproyeksikan tumbuh 10,49% pada 2025 (Grafik B6.2.4), sementara rasio beban utang (DSR) diperkirakan hanya meningkat terbatas, mengingat kenaikan UMP yang lebih rendah daripada proyeksi pertumbuhan kredit konsumsi RT.

Perbankan berkomitmen mendukung keberhasilan program Asta Cita melalui optimalisasi penyaluran kredit ke berbagai sektor strategis. Sepanjang 2024, intermediasi perbankan terhadap sektor-sektor terkait Asta Cita mencatat kinerja yang positif. Bank mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran kredit ke sektor pertanian tanaman pangan dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,55% pada 2024. Selain itu, sejalan

dengan upaya pengembangan infrastruktur energi, sektor ketenagalistrikan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 16,08% pada 2024. Perbankan juga telah menyalurkan kredit ke sektor yang relevan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B6.2.4. Outlook Kredit Konsumsi Rumah Tangga 2025

dengan program makan bergizi gratis, seperti sektor penyediaan makanan dan minuman yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,01% pada 2024. Di bidang kesehatan, kredit untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terindikasi tumbuh tinggi sebesar 24,77% pada 2024. Pertumbuhan positif juga terjadi di sektor pertambangan, terutama pertambangan bijih logam, yang tumbuh sebesar 52,17% pada 2024. Penyaluran kredit ke sektor terkait Asta Cita mencapai separuh dari total kredit perbankan, mencerminkan tingginya preferensi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor tersebut. Namun, preferensi ini tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian, terutama pada sektor-sektor dengan rasio NPL yang tinggi, seperti perikanan, peternakan, dan Konstruksi, dengan pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut yang cenderung termoderasi.

Tabel B6.2.3. Pertumbuhan Kredit Subsektor Terkait Asta Cita

Sektor Ekonomi	Subsektor Terkait Asta Cita	Pangsa (%)	Pertumbuhan Kredit (% ,yoy)		NPL (%)	
		Des-24	Des-23	Des24	Des23	Des24
1. Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	5,62	7,58	5,55	1,75	1,56
	Perikanan	0,08	-4,35	-5,38	5,62	5,95
	Peternakan	0,87	15,38	4,93	2,79	4,51
2. Pertambangan	Pertambangan Minyak dan Gas	1,01	-11,79	-3,38	1,40	0,16
	Pertambangan Batubara dan Lignit	1,99	52,13	44,39	0,34	0,29
	Pertambangan Bijih Logam	1,59	30,49	52,17	0,22	1,26
3. Industri Pengolahan	Industri Makanan dan Minuman	4,82	7,92	17,03	1,47	1,27
	Industri Kimia	1,47	1,28	2,10	1,84	0,80
	Industri Logam Dasar	1,42	1,46	4,56	0,86	0,80
4. Listrik Gas Air	Ketenagalistrikan	2,35	13,22	16,08	0,18	0,13
5. Konstruksi	Konstruksi	5,05	-0,37	0,02	3,62	2,97
6. Perdagangan	Penyediaan Makanan & Minuman	1,75	5,80	5,01	2,97	2,75
7. Pengangkutan & Telekomunikasi	Pos dan Telekomunikasi	2,08	12,12	11,62	0,53	0,44
	Angkutan Rel	0,28	15,72	28,54	0,25	0,15
8. Jasa Dunia Usaha	Jasa Perusahaan	10,49	16,98	13,09	1,13	0,99
	Real Estate	2,99	9,02	6,91	1,93	1,85
9. Jasa Sosial	Jasa Pendidikan	0,23	13,32	6,15	1,35	1,38
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,60	18,68	24,77	1,22	0,83
	Administrasi Pemerintahan	1,24	48,97	48,09	0,00	0,00
Total Kredit Perbankan		100,00	10,38	10,39	2,19	2,08

Sumber: Bank Indonesia, BPS, Bloomberg, diolah



BANK INDONESIA

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

NO.44, Februari 2025

PENGARAH

Juda Agung – Solikin M. Juhro – Irman Robinson – Bambang Arianto – Evie Sylviani –
Nugroho Joko Prastowo – Dhaha Praviandi Kuantan

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Minar Iwan Setiawan – Faried Caesar Nugroho – Lisa Rienellda – Justina Adamanti – Rani Wijayanti – Rita
Harahap – Ida Ari Kusumawaty

TIM PENYUSUN

Ina Nurmalia, Galoeh Andita Widorini, Widyastanto Nugroho, Wicaksono Aryo Pradipto, Ratna Oktriyani,
Anita, Ardhitama Shaumarli, Azka Azifah Dienillah, Dwi Oktaviyanti, Afrah Asfarina Ghassani, Charvin
Lim, Kevin Josua Sinaga, Retno Khoirunnisa, Dewa Ayu Widia Lestari, Irman Ramdani, Muhammad Harits
Abdullah, Anita Permatasari, Grace Priscilla Siahaan, Muhammad Farhan Perdana, Alya Ridha Aisy, Julius
Indra Permana, Nia Nirmala Sari Ambarita, Hilda C. Tako, Berly, Nadyezdi Rifi Prihadiani, Moh. Mashudi
Arif, Mahanani Margani, Farisan Afuar, Doddy Dirgantara Putra, Imam Wahyudi Indrawan

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter dan Market (DSMM)
Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK)
Departemen Ekonomi Inklusif dan Hijau (DEIH)
Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada Februari 2025, didasarkan pada data dan informasi per Desember 2024, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEBSITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Email : DKMP-K2MK@bi.go.id



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA